

## BAB II

### EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

#### 2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

##### 2.1.1 ASPEK GEOGRAFIS

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di kota Slawi. Terletak di pesisir Utara bagian Barat dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa atau dikenal dengan pantai Utara (Pantura). Kabupaten Tegal secara administratif terdiri dari 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. Pembagian kecamatan di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Tegal Tahun 2017**

Kecamatan	Luas (ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
01. Margasari	8.684	13
02. Bumijawa	8.855	18
03. Bojong	5.852	17
04. Balapulang	7.491	20
05. Pagerbarang	4.300	13
06. Lebaksiu	4.096	15
07. Jatinegara	7.962	17
08. Kedungbanteng	8.762	10
09. Pangkah	3.551	23
10. Slawi	1.363	10 (5 desa, 5 kelurahan)
11. Dukuhwaru	2.658	10
12. Adiwerna	2.386	21
13. Dukuhturi	1.747	18
14. Talang	1.837	19
15. Tarub	2.682	20
16. Kramat	3.849	20 (19 desa, 1 kelurahan)
17. Suradadi	5.573	11
18. Warureja	6.231	12
<b>Jumlah</b>	<b>87.879</b>	<b>281 desa / 6 kelurahan</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2018

Secara geografis Kabupaten Tegal terletak pada posisi antara 108°57'06" BT - 109°21'30" BT dan 6°50'41" LS - 7°15'03" LS, dengan luas wilayah 87.879 ha atau 878,79 km<sup>2</sup>. Adapun batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Tegal
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Pemasang

Secara geografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 kategori daerah, yaitu (1) daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja; (2) daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah; dan (3) daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Dari segi topografi, wilayah Kabupaten Tegal mempunyai kemiringan tanah yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Bila ditinjau ketinggiannya terhadap permukaan laut, secara garis besar wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran rendah, kawasan dengan ketinggian 250-500 m dpl, kawasan dengan ketinggian 500-750 m dpl, dan kawasan dengan ketinggian di atas 750 m dpl.

Ditinjau dari aspek morfologi, wilayah Kabupaten Tegal terbagi atas daerah dataran rendah, daerah perbukitan landai, daerah perbukitan bergelombang, dan daerah perbukitan terjal.

Berdasarkan jenis tanahnya, wilayah Kabupaten Tegal terdiri atas tanah aluvial, litosol, regosol, dan grumosol. Sedangkan berdasarkan iklim, Kabupaten Tegal beriklim tropis dengan dua musim bergantian sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah pada bulan September. Kelembaban udara rata-rata berkisar 78 persen; tertinggi pada bulan Februari dan terendah pada bulan September.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh area non terbangun. Lahan sawah dapat ditemui di daerah Utara kabupaten yang relatif datar; sementara daerah Selatan yang relatif berbukit didominasi oleh hutan. Dua jalur regional utama (pantura pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto) menjadi generator utama pertumbuhan wilayah.

Luasan lahan sawah terus mengalami penurunan, sedangkan luasan permukiman mengalami kenaikan. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat kecenderungan yang terjadi adalah maraknya konversi dari lahan pertanian subur beririgasi teknis menjadi lahan permukiman. Jika hal ini terjadi pada daerah hulu dan menutup saluran irigasi, maka sawah pada daerah hilir akan otomatis mati. Dengan adanya kebijakan lahan sawah berkelanjutan dan prioritas untuk menguatkan ketahanan pangan, isu konversi lahan ini sepatutnya menjadi hal yang diprioritaskan penanganannya. Luas Lahan Pertanian Yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012-2032 yaitu :

- a. Kawasan Pertanian Lahan Basah : 35.946 Hektar
- b. Kawasan Pertanian Lahan Kering : 6.630 Hektar

Posisi Kabupaten Tegal pada RTRW Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai kawasan pendukung Kota Tegal, khususnya koridor Adiwerna-Slawi yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Kawasan pada jalur Tegal-Slawi merupakan kawasan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan entitasnya, dan bersama dengan Brebes membentuk kawasan strategis perbatasan Bregas. Sebagai satu koridor ekonomi, titik jual produk yang utama berada di Kota Tegal, sedangkan Kabupaten Tegal dan Brebes menjadi pendukungnya.

Kabupaten Tegal terletak pada sabuk pembangunan Jawa Tengah, kawasan yang paling cepat perkembangannya dalam provinsi Jawa Tengah. Lokasinya dilewati oleh 2 jalur jalan utama yaitu jalur pantura pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto. Perbedaan kondisi geografis wilayah mengakibatkan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga berdampak pada perbedaan komoditas unggulan yang diusahakan di setiap wilayah. Oleh karena itu Kabupaten Tegal memiliki banyak komoditas unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian. Diantara komoditas-komoditas unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah di Kabupaten Tegal, terdapat beberapa komoditas yang menjadi unggulan tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi sampai ke tingkat provinsi dan nasional.

Komoditas-komoditas khas yang menjadi unggulan di Kabupaten Tegal diantaranya dari sektor pertanian yaitu padi, jagung, sayuran antara lain bawang merah, cabai, kentang dan kubis, dari sektor peternakan yaitu sapi perah, sapi potong, domba, ayam ras pedaging dan itik serta produk turunannya. Sementara darisektor industri diantaranya kelompok industri kimia dan kertas, kelompok logam mesin dan elektronik, dan kelompok industri agro dan hasil hutan. Komoditas-komoditas tersebut menjadi unggulan baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat nasional, bahkan beberapa komoditas telah dapat bersaing di pasar internasional.

### 2.1.2 ASPEK DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 diproyeksikan adalah 1.433.515 jiwa. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.879 ha, dan kepadatan penduduk Kabupaten Tegal tahun 2017 adalah  $\pm 1.631$  jiwa/km<sup>2</sup>. sebagaimana Tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2017**

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
01. Margasari	86,84	95.965	1.105
02. Bumijawa	88,55	84.660	956
03. Bojong	58,52	62.142	1.062
04. Balapulang	74,91	82.142	1.097
05. Pagerbarang	43,00	52.746	1.227
06. Lebaksiu	40,95	84.040	2.052
07. Jatinegara	79,62	54.191	681
08. Kedungbanteng	87,62	40.483	462
09. Pangkah	35,51	101.348	2.854
10. Slawi	13,63	72.225	5.299
11. Dukuhwaru	26,58	59.884	2.253
12. Adiwerna	23,86	119.877	5.024
13. Dukuhturi	17,48	89.123	5.099
14. Talang	18,37	102.312	5.570
15. Tarub	26,82	78.566	2.929
16. Kramat	38,49	111.710	2.902
17. Suradadi	55,73	81.709	1.466
18. Warureja	62,31	60.392	969
<b>2 0 1 7*</b>	<b>878,79</b>	<b>1.433.515</b>	<b>1.631</b>
<b>2 0 1 6</b>	<b>878,79</b>	<b>1.429.386</b>	<b>1.626</b>
<b>2 0 1 5</b>	<b>878,79</b>	<b>1.424.890</b>	<b>1.621</b>
<b>2 0 1 4</b>	<b>878,79</b>	<b>1.420.132</b>	<b>1.616</b>
<b>2 0 1 3</b>	<b>878,79</b>	<b>1.415.009</b>	<b>1.610</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2018

Secara umum, wilayah yang kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi berada pada kawasan perkotaan, terutama kawasan yang mengikuti jalur regional, kawasan kota Slawi, dan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal. Hal ini terjadi karena kawasan-kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi (yang otomatis juga memiliki kualitas layanan sarana dan prasarana yang relatif baik) sehingga menarik orang untuk datang dan tinggal. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) di tahun 2017 mencapai 949.810 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 483.705. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) tahun 2017 mencapai 23,49% artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 23 penduduk tidak produktif, sebagaimana dalam Tabel 2.3 berikut ini.

**Tabel 2.3.**  
**Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Usia Tahun 2013-2017**

Usia	2013	2014	2015	2016	2017*
0 - 4	124.326	131.184	124.234	127.359	125.515
5 - 9	121.823	130.506	125.050	130.038	129.132
10 - 14	120.519	129.575	129.197	132.020	131.447
15 - 19	116.217	128.175	102.001	122.982	121.999
20 - 24	94.062	113.861	86.494	112.441	113.627
25 - 29	125.951	103.983	117.547	107.145	108.147
30 - 34	126.979	109.998	118.285	106.826	105.112
35 - 39	117.498	106.628	107.324	105.616	104.683
40 - 44	109.572	93.223	105.301	93.835	93.783
45 - 49	98.700	87.375	92.621	87.240	87.274
50 - 54	90.017	80.301	82.794	82.826	83.794
55 - 59	61.715	66.021	70.648	70.870	72.930
60 - 64	38.257	48.733	46.182	55.728	58.461
65 +	73.775	90.569	117.202	94.460	97.611
<b>Jumlah</b>	<b>1.415.009</b>	<b>1.420.132</b>	<b>1.424.890</b>	<b>1.429.386</b>	<b>1.433.515</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2018

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 adalah 1.433.515 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 712.054 jiwa dan perempuan 720.433 jiwa sehingga sex ratio mencapai 98,84. Rincian jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis kelamin tahun 2013-2017 tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini :

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

Kecamatan	Penduduk		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
1. Margasari	47.501	48.337	95.838	98,3
2. Bumijawa	42.160	42.389	84.549	99,5
3. Bojong	30.168	31.904	62.072	94,6
4. Balapulang	40.547	41.493	82.040	97,7
5. Pagerbarang	26.136	26.548	52.684	98,4
6. Lebaksiu	40.936	43.016	83.952	95,2
7. Jatinegara	26.770	27.363	54.133	97,8
8. Kedungbanteng	20.307	20.133	40.440	100,9

Kecamatan	Penduduk		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
9. Pangkah	50.602	50.462	101.064	100,3
10. Slawi	35.207	36.588	71.795	96,2
11. Dukuhwaru	29.424	30.253	59.677	97,3
12. Adiwerna	60.130	59.621	119.751	100,9
13. Dukuhturi	44.763	44.266	89.029	101,1
14. Talang	50.949	50.609	101.558	100,7
15. Tarub	39.358	38.908	78.266	101,2
16. Kramat	54.738	55.853	110.591	98,0
17. Suradadi	40.648	40.975	81.623	99,2
18. Warureja	30.169	30.155	60.324	100,0
<b>2 0 1 7</b>	<b>712.054</b>	<b>720.433</b>	<b>1.433.515</b>	<b>98.84</b>
<b>2 0 1 6</b>	<b>710.513</b>	<b>718.873</b>	<b>1.429.386</b>	<b>98.84</b>
<b>2 0 1 5</b>	<b>708.316</b>	<b>716.574</b>	<b>1.424.890</b>	<b>99,00</b>
<b>2 0 1 4</b>	<b>706.001</b>	<b>714.131</b>	<b>1.420.132</b>	<b>98.86</b>
<b>2 0 1 3</b>	<b>703.494</b>	<b>711.515</b>	<b>1.415.009</b>	<b>98,87</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2018

### 2.1.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

#### 1. Produk Domestic Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Tegal tahun 2017 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 30.044.412.28 juta dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2017 mencapai Rp. 22.371.534,53 juta. Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal, dan bisa dilihat pengaruhnya pada penggunaan lahan serta penduduk berdasar mata pencaharian.

Sektor industri pengolahan berkembang dengan adanya klaster logam di Kecamatan Talang dan Adiwerna utamanya meliputi komponen kapal, komponen alat mesin pertanian, komponen otomotif, komponen alat berat, dan peralatan rumah tangga. Produk IKM Kabupaten Tegal telah banyak dipakai di banyak daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga. Industri pengolahan makanan juga berkembang dengan baik di Kabupaten Tegal utamanya minuman dan makanan kecil khas Kabupaten Tegal diantaranya adalah teh, tahu aci, pilus, anthon, olos, dan kacang bogares. Kuliner lain selain makanan kecil adalah sate kambing muda yang terkenal gurih dan lezat danteh poci yang tidak dapat dipisahkan dari kedua kuliner khas Tegal di atas dan sangat mendukung perkembangan industri berbasis makanan ini. Industri konfeksi juga menyumbang kontribusi yang cukup besar utamanya industri batik tegalan sebagai identitas budaya khas Kabupaten Tegal. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas batik, introduksi pewarna alami, pelatihan manajemen, promosi melalui pameran, dan kebijakan untuk mengenakan batik tegalan sebagai pakaian resmi daerah yang dikenakan setiap hari Kamis.

Secara umum, industri pengolahan merupakan kontributor yang signifikan karena selain sumbangsinya yang besar pada perekonomian Kabupaten Tegal, sifat industrinya adalah padat karya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, kontribusinya relatif stabil – hampir mencapai 30% dari total perekonomian wilayah - serta tren pertumbuhannya juga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi bagus serta *backward* dan *forward linkage* yang kuat, sudah seharusnya sektor industri pengolahan dijadikan prioritas pembangunan.

Perkembangan yang terjadi pada sektor ini akan menarik sektor ekstraktif untuk maju dan mendorong sektor *tersier* untuk berkembang.

Kontribusi sektor perdagangan juga sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *outlet* penjualan di sepanjang jalur regional yang ada. Berkembangnya sektor ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya sektor lain, mengingat perkembangan perdagangan merupakan muara dari sistem produksi. Kawasan pusat ekonomi di Kabupaten Tegal adalah Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Pusat-pusat perdagangan muncul dengan pesat serta membentuk satu koridor ekonomi yang utuh. Hampir semua titik penjualan hasil produksi di Kabupaten Tegal berada di area Adiwerna dan Slawi.

Sektor perdagangan juga mengalami tren yang menaik dari tahun ke tahun, serta kontribusinya juga mengalami peningkatan. Selain karena lokasi Kabupaten Tegal yang relatif baik, perkembangan sektor ini dipengaruhi perkembangan kawasan perkotaan kecamatan, dan tumbuhnya sektor industri pengolahan. Peningkatan aktifitas sektor perdagangan dan industri memberi pengaruh terhadap ketahanan perekonomian daerah. Hal tersebut dibuktikan pada saat kondisi makro ekonomi Indonesia yang bergejolak pada tahun 2015 tidak terlalu mempengaruhi kondisi makro ekonomi Kabupaten Tegal. Perkembangan kawasan perkotaan di kecamatan juga memiliki pengaruh yang signifikan dimana perkembangan fisik dan ekonomi tidak lagi terpusat pada kawasan Slawi-Adiwerna, tetapi juga pada kawasan perkotaan kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal untuk kawasan sekitarnya. Selain itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang bagus akan secara langsung mendorong perkembangan sektor perdagangan. Setiap barang yang diproduksi pasti akan dijual, dan setiap penjualan akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Sementara, kontribusi sektor pertanian juga relatif besar meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor ini tetap harus menjadi perhatian karena merupakan sektor yang sangat strategis. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal sangat bergantung pada performa sektor pertanian. Selain itu, jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor ini sangat besar dan merupakan kontributor terbesar pada jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat Kabupaten Tegal. Sayangnya, perkembangan sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena fokus usaha di sektor ini masih berkuat pada cara ekstraktif. Cara ini sangat bergantung pada kondisi alam, dimana ketika hasil yang didapat berkualitas bagus maka sektor pertanian akan tumbuh. Sebaliknya, jika hasil yang didapat berkualitas kurang baik, maka sektor pertanian akan cenderung turun. Di samping itu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang (termasuk infrastruktur pendukungnya) juga ikut mendorong turunnya kontribusi sektor pertanian. Kedua hal tersebut menjadikan sektor pertanian hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil dalam perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya industri pengolahan di Kabupaten Tegal yang berbasis pada produk pertanian yang dihasilkan dari daerah sendiri. Industri pengolahan makanan yang memiliki kontribusi besar yaitu industri teh, mengambil bahan baku bukan dari Kabupaten Tegal. Industri pengolahan makanan kecil juga kebanyakan berbahan dasar terigu yang merupakan bahan impor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mendorong industrialisasi pertanian yang berbasis produk pertanian di Kabupaten Tegal. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka sektor industri akan berkembang, dan sektor perdagangan juga akan ikut terdorong.

**Tabel 2.5**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tegal (Juta Rupiah)**

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017*	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.468.079,63	16,7	3.411.486,14	14,89	3.869.869,62	15,13	4.114.690,91	14,84	3.755.551,54	12,50
B	Pertambangan dan Penggalian	794.613,80	3,83	1.025.944,03	4,48	1.138.617,76	4,45	1.253.014,46	4,52	1.367.020,76	4,55
C	Industri Pengolahan	6.554.374,66	31,56	7.453.897,72	32,53	8.496.555,92	33,22	9.269.703,44	33,43	10.431.419,94	34,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.634,29	0,07	14.272,17	0,07	14.773,50	0,06	15.516,37	0,06	18.026,65	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.212,93	0,05	9.004,16	0,04	9.484,63	0,04	9.922,55	0,04	12.017,76	0,04
F	Konstruksi	1.464.548,79	7,81	1.557.777,79	7,5	1.774.421,40	7,74	1.935.916,03	7,57	2.292.388,66	7,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.160.619,53	16,85	3.423.526,04	16,49	3.682.696,94	16,07	3.999.444,07	15,64	4.725.986,05	15,73
H	Transportasi dan Pergudangan	464.335,17	2,48	512.243,17	2,47	598.708,65	2,61	673.981,93	2,63	814.203,57	2,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	786.095,88	4,19	844.799,13	4,07	949.107,57	4,14	1.069.660,33	4,18	1.282.896,40	4,27
J	Informasi dan Komunikasi	521.047,92	2,78	553.765,22	2,67	600.478,85	2,62	645.062,14	2,52	799.181,37	2,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	459.825,89	2,45	489.698,89	2,36	534.264,72	2,33	593.103,79	2,32	688.017,04	2,29
L	Real Estat	315.344,41	1,68	331.638,13	1,6	370.106,44	1,62	409.786,78	1,60	495.732,80	1,65
M	Jasa Perusahaan	68.609,68	0,37	80.845,19	0,39	89.163,90	0,39	103.454,47	0,39	126.186,53	0,42
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	467.582,15	2,49	497.798,49	2,4	534.057,68	2,33	583.200,27	2,28	675.999,28	2,25
O	Jasa Pendidikan	867.566,41	4,63	1.032.184,00	4,97	1.171.260,42	5,11	1.288.282,96	5,04	1.685.491,53	5,61
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	149.174,81	0,8	162.101,67	0,78	186.174,35	0,81	198.743,34	0,78	234.346,42	0,78
Q	Jasa lainnya	386.144,28	2,06	438.870,06	2,11	510.444,00	2,23	546.165,87	2,13	639.945,98	2,13
	<b>Total</b>	<b>18.756.760,13</b>	<b>100</b>	<b>20.765.592,21</b>	<b>100</b>	<b>22.916.470,94</b>	<b>100</b>	<b>25.577.284,21</b>	<b>100</b>	<b>30.044.412,28</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Tahun 2018

**Tabel 2.6.**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013- 2017 atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tegal (Juta Rupiah)**

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017*	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.878.663,32	15,95	2.647.364,02	13,97	2.831.399,07	14,93	2.953.344,86	13,80	2.657.779,26	11,88
B	Pertambangan dan Penggalian	733.207,60	4,06	782.937,77	4,13	794.797,71	4,19	848.474,09	3,99	865.791,73	3,87
C	Industri Pengolahan	5.478.580,85	30,35	5.994.165,58	31,62	6.314.825,65	33,31	6.802.682,83	31,99	7.313.367,34	32,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14.264,96	0,08	14.664,27	0,08	14.623,63	0,08	14.677,59	0,07	15.446,87	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.918,24	0,05	9.066,72	0,05	9.294,84	0,05	9.413,22	0,04	8.817,45	0,04
F	Konstruksi	1.418.500,50	7,86	1.483.094,95	7,82	1.564.698,24	8,25	1.648.467,47	7,75	1.780.801,59	7,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.167.242,71	17,54	3.333.113,77	17,58	3.468.214,13	18,29	3.648.221,49	17,16	3.872.572,30	17,31
H	Transportasi dan Pergudangan	505.815,32	2,8	552.825,09	2,92	600.269,73	3,17	645.314,42	3,03	691.291,07	3,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	791.786,17	4,39	846.713,92	4,47	907.506,46	4,79	983.764,89	4,63	1.047.003,95	4,68
J	Informasi dan Komunikasi	583.970,08	3,23	665.456,39	3,51	692.670,72	3,68	745.335,96	3,50	823.285,16	3,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	397.941,26	2,2	407.637,25	2,15	442.095,37	2,33	473.875,08	2,23	512.316,04	2,29
L	Real Estat	320.938,30	1,78	340.514,94	1,8	340.514,94	1,80	393.993,84	1,85	425.065,71	1,90
M	Jasa Perusahaan	71.113,47	0,39	76.073,96	0,4	76.873,96	0,41	91.048,23	0,43	96.199,08	0,43
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	412.744,48	2,29	413.494,01	2,18	415.894,01	2,19	450.068,43	2,12	514.553,22	2,30
O	Jasa Pendidikan	725.443,05	4,02	795.930,56	4,2	795.930,56	4,20	931.281,14	4,38	1.042.529,57	4,66
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	136.904,74	0,76	149.536,60	0,79	148.536,60	0,78	166.751,02	0,78	178.975,03	0,80
Q	Jasa lainnya	407.570,03	2,26	443.165,91	2,34	443.165,91	2,34	477.002,67	2,24	525.739,16	2,35
	<b>Total</b>	<b>18.053.605,08</b>	<b>100</b>	<b>18.955.755,71</b>	<b>100</b>	<b>18.958.363,83</b>	<b>100</b>	<b>21.265.717,23</b>	<b>100</b>	<b>22.371.534,53</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Tahun 2018



## 2. Struktur Ekonomi PDRB Tahun Dasar 2010

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Tegal telah bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke kategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tegal. Sumbangan terbesar pada tahun 2017 dihasilkan oleh kategori Industri Pengolahan, kemudian kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kategori Konstruksi, dan kategori jasa Pendidikan. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 8 persen.

**Tabel 2.7**  
**Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013–2017**

Lapangan Usaha/Industry	2013	2014	2015	2016	2017*
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,70	14,89	15,13	12,50	15,70
Pertambangan danPenggalian	3,83	4,48	4,45	4,55	4,17
Industri Pengolahan	31,56	32,53	33,22	34,72	32,56
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Konstruksi	7,50	7,74	7,57	7,63	7,56
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,49	16,07	15,64	15,73	16,00
Transportasi dan Pergudangan	2,47	2,61	2,64	2,71	2,57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,07	4,14	4,18	4,27	2,32
Informasi dan Komunikasi	2,67	2,62	2,52	2,66	2,59
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,36	2,33	2,32	2,29	2,32
Real Estat	1,60	1,62	1,60	1,65	1,60
Jasa Perusahaan	0,39	0,39	0,40	0,42	0,40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,40	2,33	2,28	2,25	2,33
Jasa Pendidikan	4,97	5,11	5,04	5,61	5,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,81	0,78	0,78	0,78
Jasa lainnya	2,11	2,23	2,14	2,13	2,15
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dalam masa kini, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak bisa hanya dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus juga diikuti dengan pemerataan dan kesinambungan. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu yang dapat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan PDRB berdasar harga konstan, yang mengindikasikan pertumbuhan produksi total pada suatu daerah. Secara umum,

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal sedikit mengalami perlambatan karena pengaruh krisis global pada 2008. Setelah pengaruh krisis melemah, pertumbuhan ekonomi meningkat secara stabil selama dua tahun terakhir dan menunjukkan tren yang bagus. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6%. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang belum dioptimalkan, karena dengan lokasi Kabupaten Tegal yang strategis dan keunggulan komparatif yang nyata pada sektor industri pengolahan dan perdagangan, seharusnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dapat mencapai 6%.

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2016 mengalami kenaikan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal tahun 2016 mencapai 6,37 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 5,45 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori jasa pendidikan sebesar 9,43 persen. Sedangkan seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang positif.

Adapun kategori-kategorilainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya kategoriJasa Perusahaan mencatat sebesar 8,43 persen, kategori Industri Pengolahan sebesar 7,73 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,40 persen, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,93 persen, kategoriJasa Lainnya sebesar 4,37 persen, kategori Informasi dan komunikasi sebesar 7,60 persen, kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,75 persen, kategoriReal Estat sebesar 7,83 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,19 persen, kategori Konstruksi sebesar 5,35 persen, kategori Pengadaan listrik dan Gas sebesar 0,37 persen, kategori Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,40 persen, kategoriJasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,19 persen, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,27 persen, dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,96 persen.

**Tabel 2.8**  
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2012-2016**

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,90	1,51	4,30	2,78	3,63
B	Pertambangan danPenggalian	4,92	5,98	6,17	2,10	6,75
C	Industri Pengolahan	8,57	12,57	8,13	6,66	7,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,53	7,31	4,24	1,65	0,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,43	0,67	3,91	0,30	1,27
F	Konstruksi	5,70	4,32	4,51	5,54	5,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,55	4,45	5,17	4,12	5,19
H	Transportasi dan Pergudangan	5,20	9,29	9,11	8,76	7,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,14	2,26	6,94	7,18	8,40
J	Informasi dan Komunikasi	10,25	9,19	8,82	9,00	7,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,13	2,16	3,54	7,29	7,19
L	Real Estat	3,49	4,17	6,10	7,30	7,83
M	Jasa Perusahaan	5,26	11,54	8,10	9,23	8,43
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,10	2,04	0,76	5,10	2,96

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
O	Jasa Pendidikan	17,47	8,91	9,72	6,92	9,43
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,30	5,70	8,50	4,98	6,93
Q	Jasa lainnya	0,99	9,31	8,73	3,13	4,37
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5,23</b>	<b>5,23</b>	<b>6,73</b>	<b>5,03</b>	<b>6,37</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

### 3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku tahun 2011 sebesar Rp.10.830.000,- dan meningkat hingga mencapai Rp19.400.000,- pada tahun 2016. Tingkat pendapatan per kapita menurut lapangan usaha yang dominan pada tahun 2016 adalah pada industri pengolahan mencapai Rp.6.490.000,- kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp.2.880.000,- dan sektor perdagangan dan eceran sebesar Rp.1.990.000,-. Hal tersebut sesuai dengan potensi perekonomian Kabupaten Tegal yang ditopang oleh tiga sektor utama tersebut. Secara umum, pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Tegal berada pada tren yang baik dan stabil mengalami peningkatan sebagaimana Tabel 2.9 di bawah ini.

**Tabel 2.9**  
**PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp) Tahun 2012 -2016**

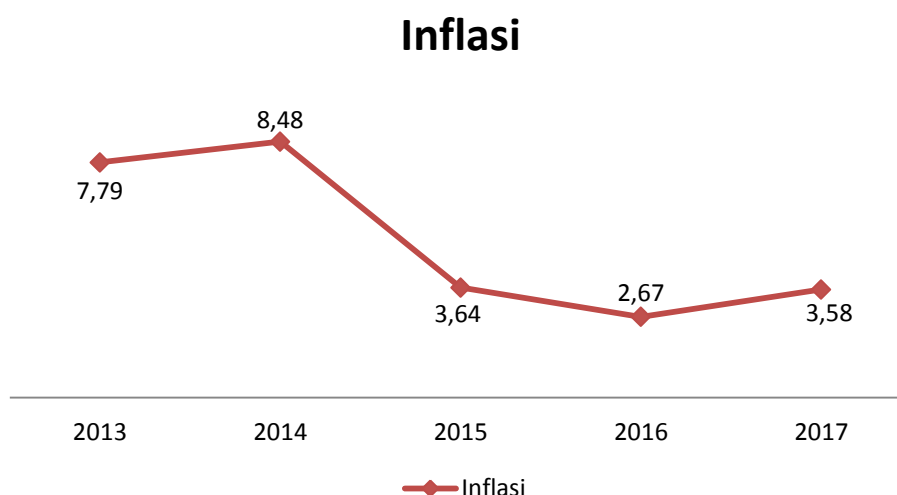
Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,26	2,45	2,40	2,72	2,88
B	Pertambangan danPenggalian	0,52	0,56	0,72	0,80	0,88
C	Industri Pengolahan	4,05	4,63	5,25	5,96	6,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	1,04	1,10	1,25	1,36	1,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,24	2,42	2,59	2,81	2,99
H	Transportasi dan Pergudangan	0,33	0,36	0,42	0,47	0,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,56	0,60	0,67	0,75	0,83
J	Informasi dan Komunikasi	0,37	0,39	0,42	0,45	0,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,33	0,35	0,38	0,42	0,45
L	Real Estat	0,22	0,23	0,26	0,29	0,32
M	Jasa Perusahaan	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,33	0,35	0,38	0,41	0,43
O	Jasa Pendidikan	0,62	0,73	0,82	0,90	0,99
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,11	0,11	0,13	0,14	0,15
Q	Jasa lainnya	0,27	0,31	0,36	0,38	0,41
<b>ProdukDomestik Regional Bruto</b>		<b>12,28</b>	<b>13,31</b>	<b>14,68</b>	<b>16,14</b>	<b>19,40</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

#### 4. Tingkat Inflasi

Selama tahun 2017 laju inflasi yang terjadi di Kota Slawi secara umum mencapai 3,58%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2,67%. Kenaikan indeks ini lebih didorong oleh kenaikan indeks pada kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuanganyang selama tahun kalender 2017 mencapai inflasi 5,75%; disusul kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar 5,47%; kelompok sandang 2,87%; kelompok kesehatan 2,27%; kelompok Bahan Makanan sebesar 2,05%; kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 1,96%; dan terakhir kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 1,86%.

Kenaikan indeks pada kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangandikarenakan kenaikan indeks pada sub kelompok Sarana dan Penunjang Transport yang mengalami inflasi sebesar 10,62%; sub kelompok Komunikasi dan Pengiriman yang mengalami inflasi sebesar 6,01%; dan sub kelompok Transport yang mengalami inflasi sebesar 5,21%. Adapun Kenaikan indeks pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar, utamanya dikarenakan kenaikan indeks pada sub kelompok Bahan Bakar, Penerangan, dan Air, yang mengalami inflasi sebesar 16,87%, dan hal ini disebabkan oleh kenaikan tarif dasar listrik yang berlangsung selama 6 bulan. Sedangkan sub kelompok yang mengalami penurunan indeks yakni sub kelompok bumbu-bumbuan yang turun sebesar 24,74%; dan sub kelompok Minuman tidak beralkohol yang turun sebesar 1,36%.



Gambar 2.1. Tingkat Inflasi Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2018

#### 5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat di dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 141.800 jiwa atau 9,9% terhadap total jumlah penduduk. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2015-2016), di mana pada tahun 2015 mencapai 143.540 jiwa atau 10,09%, dan tahun 2016 mencapai 144.200 jiwa atau 10,1%.

Berikut adalah Gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan presentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2013-2017, dapat dilihat pada Tabel 2.10 di bawah ini.

**Tabel 2.10**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tegal Tahun 2013- 2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk Miskin	149.800	140.308	143.540	144.200	141,800
2.	Jumlah Penduduk	1.415.009	1.420.132	1.424.890	1.429.386	1.433.515
3.	Persentase Penduduk miskin terhadap jumlah penduduk	10,58	9,88	10,07	10,09	9,90

Sumber : Bappeda Tegal Tahun, 2018

## 6. Angka Indeks Pembangunan Manusia

Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik. IPM Kabupaten Tegal selalu meningkat seiring waktu. Jika dilihat secara lebih detail, semua indikator penyusun IPM juga mengalami peningkatan.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

- a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- b. Pengetahuan (*knowledge*)
- c. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Keunggulan IPM metode baru adalah menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

IPM Kabupaten Tegal Tahun 2017 meningkat 0,6 dibanding Tahun sebelumnya, yang didukung oleh peningkatan semua komponennya. IPM Kabupaten Tegal menurut metode baru sebagaimana dijelaskan diatas pada tahun 2013 – 2017 secara rinci adalah sebagai berikut :

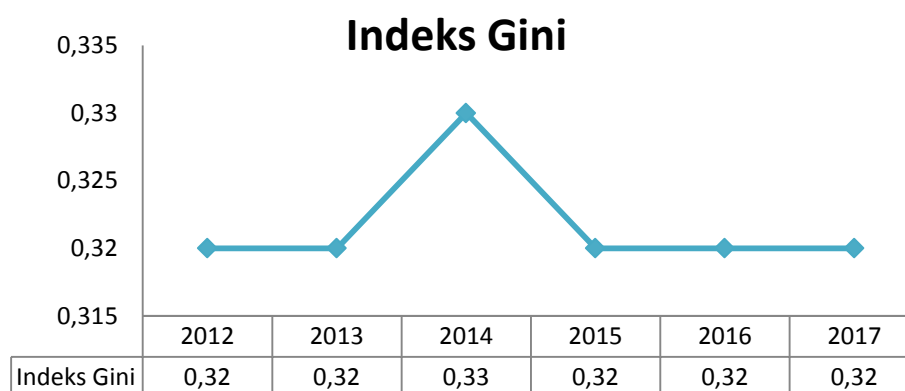
**Tabel 2.11**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tegal Metode Baru Tahun 2013-2017**

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	IPM	63,50	64,10	65,04	65,84	66,44
1	- Angka Harapan Hidup (tahun)	70,73	70,80	70,90	71,02	71,14
2	- Harapan Lama Sekolah (EYS)	11,63	11,99	12	12,01	12,06
3	- Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	5,85	5,93	6,30	6,54	6,55
4	-Pengeluaran (RibuRupiah/orang/tahun)	8.001	8.050	8.367	8.709	9.136

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2018

## 7. Indeks Gini

Indeks merupakan suatu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Tegal 2012-2017 meningkat yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Data terakhir yang tersedia adalah Indeks Gini Kabupaten Tegal tahun 2012 - 2017 sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.2 di bawah ini.

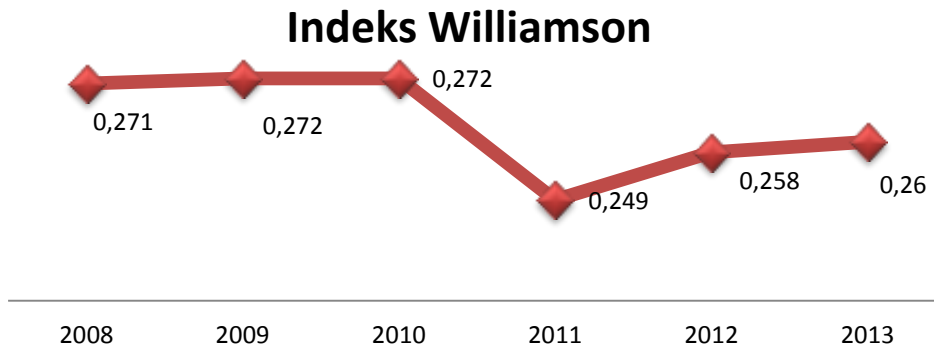


Gambar 2.2. Indeks Gini Kabupaten Tegal Tahun 2012-2017

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

## 8. Indeks Williamson

Indeks Williamson adalah indeks untuk mengukur ketimpangan daerah. Indeks ini adalah koefisien variasi terbobot dari proporsi populasi di tiap kecamatan dibandingkan dengan total populasi kabupaten. Indeks yang semakin kecil menunjukkan bahwa ketimpangan semakin berkurang, sedangkan semakin besar nilai indeks menunjukkan bahwa ketimpangan semakin bertambah. Pada lima tahun terakhir Indeks Williamson Kabupaten Tegal cukup fluktuatif, dimana Tahun 2008 pada angka 0,271, Tahun 2009 dan Tahun 2010 sebesar 0,272, kemudian Tahun 2011 menurun pada angka 0,249, Tahun 2012 naik pada angka 0,258 dan tahun 2013 kembali naik pada angka 0,26 sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.3 di bawah ini.



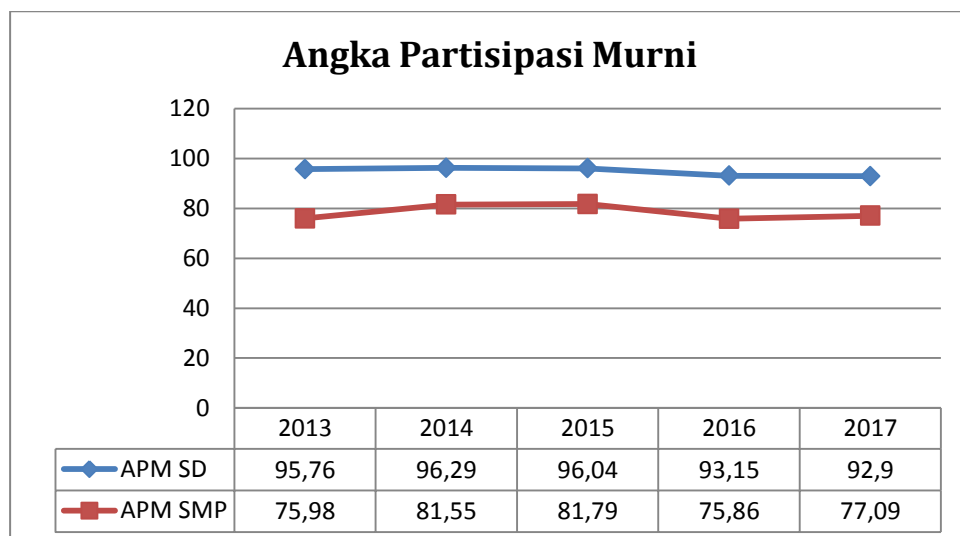
Gambar 2.3. Indeks Williamson Kabupaten Tegal Tahun 2008-2013  
 Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

Dari data indeks Williamson tersebut, Kabupaten Tegal masih bisa dikategorikan dalam tingkat ketimpangan rendah. Meskipun demikian, tren yang terjadi adalah angka Indeks Williamson cenderung naik; yang mengimplikasikan bahwa ketimpangan wilayah cenderung meningkat. Hal ini perlu diwaspadai, bahwa ketimpangan wilayah yang masuk dalam katagori rendah seharusnya tidak boleh melenakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pembangunan, sehingga arah pembangunan harus berorientasi pada pemerataan dan tidak hanya pada pertumbuhan saja.

#### 9. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

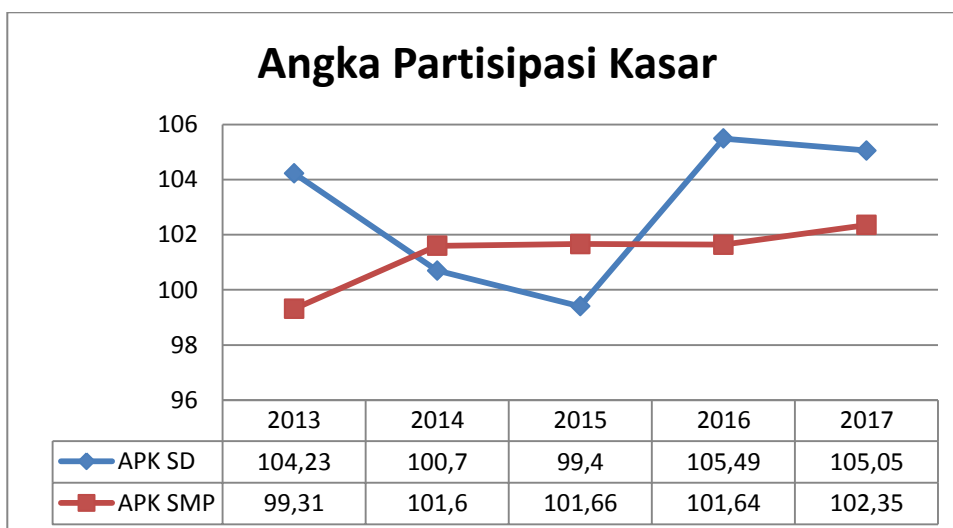
APM (Angka Partisipasi Murni) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam prosentase. Indikator APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Di tahun 2017 APM SD/MI mencapai 92,9 %. Artinya bahwa anak sekolah setingkat SD/MI di kabupaten Tegal yang sesuai dengan usia sekolah dari jenjang yang ada sebesar 92,9%, selebihnya 7,1% merupakan siswa SD yang tidak atau belum berusia 7-12 tahun.

APM SMP/MTs Tahun 2017 sebesar 77,09% yang artinya masih ada anak usia lebih atau kurang 13-15 tahun duduk di jenjang sekolah SMP/MTs dengan persentase sebesar 22,91% dari jumlah keseluruhan siswa yang ada. Menurut BPS, APM dianggap sebagai indikator yang lebih baik daripada APK karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.



Gambar Gambar 2.4 : Angka Partisipasi Murni Tahun 2013-2017  
 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018

APK (Angka Partisipasi Kasar) digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada suatu wilayah. Semakin tinggi nilai APK semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah. APK SD/MI Kabupaten Tegal yaitu 104,23 (2013), 100,7 (2014), 99,4 (2015), 105,49 (2016), 105,05 (2017). APK SMP/MTS 99,31 (2013), 101,6 (2014), 101,66 (2015), 101,64 (2016), 102,35 (2017). Secara umum dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami kecenderungan peningkatan, namun tahun 2015 mengalami penurunan dikarenakan adanya perpindahan peserta didik khususnya yang berasal dari luar Kabupaten Tegal. APK Kabupaten Tegal tahun 2013-2017 adalah sebagaimana dalam Gambar 2.5 dibawah ini.



Gambar 2.5 : Angka Partisipasi Kasar Tahun 2013-2017

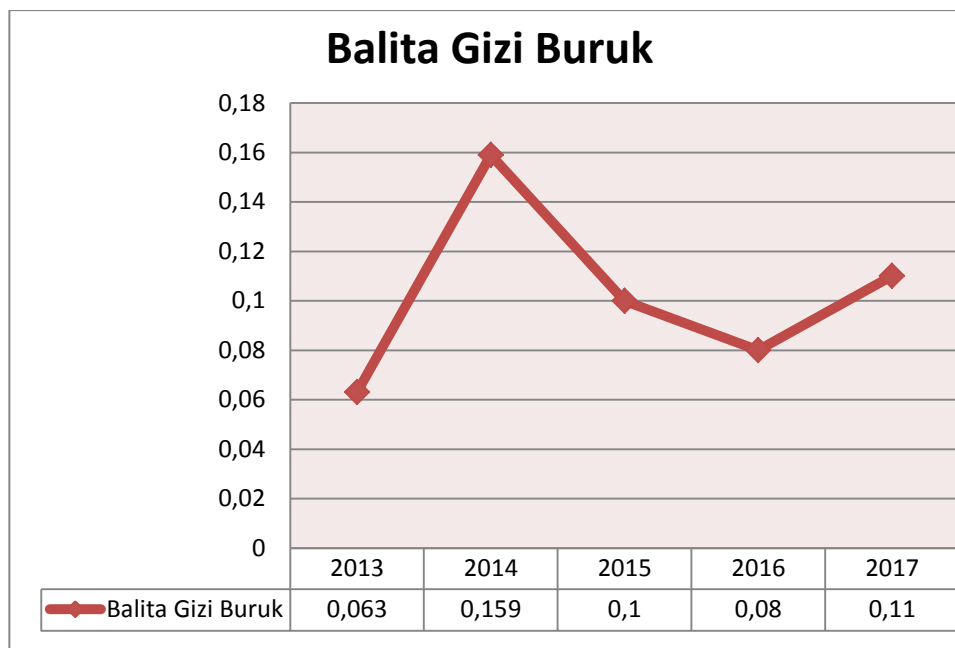
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018

## 10. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita yang mengalami gizi buruk sejak Tahun 2013 hingga tahun 2014 tidak ada peningkatan yaitu 0,15% tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 0,10%. Tahun 2016 kasus balita gizi buruk mengalami peningkatan menjadi 0,16% selanjutnya pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 0,11%.

Kasus balita gizi buruk terjadi karena beberapa faktor diantaranya: ketersediaan makanan ditingkat rumah tangga, pola asuh orangtua terkait pengetahuan gizi yang masih rendah, hygiene sanitasi lingkungan yang buruk, adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan balita (kelainan bawaan) serta ditemukannya penyakit penyerta pada balita gizi buruk seperti ISPA, bocor jantung, gagal ginjal dan lain-lain. Persentase Balita Gizi Buruk adalah sebagaimana dalam Gambar 2.6 dibawah ini.





Gambar 2.6: Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2013-2017  
 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2018

### 11. Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi

Jumlah kematian ibu adalah banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas. Jumlah kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara setelah bayi lahir sampai berusia satu tahun. Angka kematian ibu dan kematian bayi Tahun 2013 - 2017 sebagaimana Tabel 2.12 di bawah ini.

**Tabel 2.12.**  
**Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	146,6	173	120,8	100,3	52,7
2.	Jumlah Kematian Bayi	8,9	9,6	9,6	9,7	7,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2018

Angka kematian ibu di Kabupaten Tegal menunjukkan tren menurun dalam 5 tahun terakhir. Angka kematian ibu pada Tahun 2013 mengalami sedikit kenaikan sebesar 146,6. Selanjutnya pada tahun 2014 meningkat menjadi 173 dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar 120,8 dan pada tahun 2016 kembali menurun menjadi 100,3 dan Tahun 2017 menjadi 52,7, artinya setiap 100.000 kelahiran hidup terdapat 52,7 kematian ibu. Penurunan angka kematian ibu disebabkan oleh keberhasilan program-program pembangunan di bidang kesehatan, utamanya pelayanan kepada ibu hamil dan persalinan ibu.

Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Tegal dari tahun 2013 sampai dengan 2016 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Terlihat pada Tahun 2013 sebesar 8,9 dan menjadi 9,6 pada Tahun 2014. dan Pada tahun 2015 angkanya sama dengan angka 2014, yaitu sebesar 9,6. Pada Tahun 2016 angka kematian bayi meningkat menjadi 9,7 dan tetapi pada Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 7,8, artinya artinya setiap 1000 kelahiran

hidup terdapat 7,8 kematian bayi. Tentu hal ini menjadi keprihatinan dan perlu upaya keras untuk menurunkan kembali persentase kematian bayi di Kabupaten Tegal.

Upaya yang sudah dilakukan menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran sebagai sarana untuk mendekatkan ibu hamil risiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan, Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi, Pelatihan PONED, Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti *call center* penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan KB Pasca Persalinan.

## 12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Selama tahun 2017 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 86,76 naik 0,27 poin dibanding IPG tahun 2015. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM. Sebagaimana Tabel 2.13 di bawah ini.

**Tabel 2.13**

### **Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

<b>Daerah</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kab. Tegal	85,78	86,76	87,03	86,76	86,76

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Tahun 2017

## 13. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, Kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Tegal yang diukur melalui IDG memperlihatkan penurunan 25,91 poin dari 77,06 ditahun 2015 menjadi 51,16 ditahun 2017. IDG di Kabupaten Tegal tahun 2013 yaitu 51,91 dan tahun 2014 meningkat menjadi 68,02. Perkembangan IDG Kabupaten Tegal tahun 2013-2017 dapat dilihat dalam Tabel 2.14 di bawah ini.

**Tabel 2.14**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2013-2017**

Daerah	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Tegal	51,91	68,02	77,06	51,15	51,15

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Tahun 2017

## 12. Fokus Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tegal ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Tegal sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Tegal seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar.

Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan Generasi muda dilaksanakan melalui kegiatan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), penyelenggaraan *aubade*, penyelenggaraan upacara bendera, penyelenggaraan pemuda produktif, kegiatan pemuda pelopor. Pembinaan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan pekan olahraga SD, penyelenggaraan pekan olahraga SMP, penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah (Popda), kegiatan lomba gerak jalan, bimbingan teknis personal, lomba senam dan kegiatan senam masal, tes kesegaran jasmani bagi SMP dan SMA. Perkembangan Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal didukung oleh grup kesenian yang berjumlah 311 grup, 1 gedung kesenian, 1 museum dan pusat kebudayaan, 158 cagar budaya bergerak, 27 cagar budaya tidak bergerak, 33 organisasi pemuda dan 56 klub olahraga. Sebagaimana Tabel 2.15 di bawah ini.

**Tabel 2.15**  
**Perkembangan Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No	Capaian Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Grup Kesenian	311	311	311	311	311
2	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1
3	Jumlah Museum dan Pusat Kebudayaan	9	9	10	10	10
4	Jumlah Benda Cagar Budaya :					
	a. Bergerak	158	158	158	158	158
	b. Tidak Bergerak	27	27	27	27	27
5	Jumlah Organisasi Pemuda	16	16	16	31	31
6	Jumlah Organisasi / Klub Olahraga	56	56	56	23	23

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018

## 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu: fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

### 2.1.4.1 Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

#### 1. Pendidikan

##### a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Namun, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Capaian APS di Kabupaten Tegal per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2013-2017. Sebagaimana Tabel 2.16 berikut ini.

**Tabel 2.16.**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 tahun	184.944	155.090	151.882	162.024	143,816
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	168.432	155.557	154.827	157.653	155,101
1.3.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	109,80	99,70	105,90	102,77	92,72
2	SMP/MTS					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 tahun	73.490	66.171	53.734	69.422	22,696
2.2.	Jumlah penduduk Kelompok usia 13-15 tahun	77.948	73.199	71.614	59.193	71,572
2.3.	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	94,28	90,42	99,28	117,28	31,71
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah murid usia 16-18 tahun	19.099	39.674	31.454	69.422	37,490
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	34.916	62.284	59.509	59.193	71,011
3.3	Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK	54,70	63,75	70,77	117,28	52,79

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018

## b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Peningkatan rasio ketersediaan sekolah untuk semua jenjang dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu meningkatnya jumlah sekolah atau tingginya angka putus sekolah pada jenjang sebelumnya. Capaian kondisi ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2012-2017 sebagaimana pada Tabel 2.17 di bawah ini.

**Tabel 2.17.**  
**Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah sekolah	903	986	889	885	882
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	161.653	155.557	154.827	157.653	155.101
1.3.	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	1 : 179,02	1 : 157,76	1 : 174	1:178,13	1:175,85
2.	SMP/MTS					
2.1.	Jumlah sekolah	186	174	174	177	185
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	65.208	73.199	71.614	59.193	71.572
2.3.	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	1:350,58	1 : 420,68	1 : 411	1 : 334,42	1 : 386,88
3.	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah sekolah	39	103	103	102	106
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	34.916	62.284	59.509	59,761	71,011
3.3	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	1 : 895,28	1 : 604,69	1 : 577,75	1 : 585,89	1 : 669,92

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018

## c. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2013-2017 adalah sebagaimana Tabel 2.18 berikut ini.

**Tabel 2.18.**  
**Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1.	Jumlah Guru	7.609	8.848	9.679	8.782	6,377
1.2.	Jumlah Murid	184.942	170.914	164.381	162.024	143,816
1.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1 : 24,31	1 : 19,73	1 : 17	1 : 18,44	1 : 22,55
<b>2</b>	<b>SMP/MTs.</b>					
2.1.	Jumlah Guru	3.269	4.103	3.922	2.367	2.317
2.2.	Jumlah Murid	80.136	72.210	69.641	69.422	22,696
2.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1 : 24,53	1 : 17,59	1 : 17,75	1 : 29,32	1 : 9,80
<b>3</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>					
3.1	Jumlah Guru	1.510	2.444	2.658	1.764	2.440
3.2	Jumlah Murid	45.968	42.265	44.669	49.012	37,490
3.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1 : 30,44	1 : 17,29	1 : 16,81	1 : 27,78	1 : 15,36

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018

**d. Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata**

Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata adalah jumlah guru per kelas per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar perkelas. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru perkelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2013-2017. Sebagaimana Tabel 2.19 di bawah ini.

**Tabel 2.19.**  
**Rasio Guru per Kelas Rata-rata terhadap Jumlah Murid**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013 -2017**

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1.	Jumlah Guru	7.609	8.848	9.679	8.782	6,377
1.2.	Jumlah Kelas	5.821	5.817	4.777	4.777	5,136
1.3.	Rasioguru/Kelas	1 : 1,31	1 : 1,52	1 : 2,02	1 : 33,91	1 : 1.24
1.4.	Jumlah Murid	184.942	170.194	164.381	162.024	143,816
1.5	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 24,31	1 : 26,94	1 : 34,41	1 : 33,91	1 : 28.00

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1.6	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1:1,31:24,31	1:1,52:29,31	1 : 2,02 : 16,98	1:8,38:33,51	1:1.24:28.00
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1	Jumlah Guru	3.269	4.103	3.922	2.367	2.317
2.2	Jumlah Kelas	2.753	2.753	2.752	1.422	907
2.3	Rasio Guru/Kelas	1 : 1,19	1 : 1,49	1 : 1,42	1 : 1,66	1 : 2.55
2.4	Jumlah Murid	80.136	72.210	69.641	69.422	22,696
2.5	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 29,11	1 : 26,22	1 : 25,29	1 : 48	1 : 25.02
2.6	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1:1,19:29,11	1:1,49:26,22	1 : 1,42 : 25,29	1:1,66:48	1:2.55:25.02
<b>3</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>					
3.1	Jumlah Guru	1.510	2.444	2.658	1,764	2,317
3.2	Jumlah Kelas	214	319	1130	1.125	1,171
3.3	Rasio Guru/Kelas	1 : 7,06	1 : 7,66	1 : 2,35	1 : 5,56	1: 1.98
3.4	Jumlah Murid	45.968	42.265	44.699	49.012	37,490
3.5	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 214,8	1 : 129,7	1 : 39,55	1 : 43,56	1 : 32.02
2.5	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1:7,06:214,8	1:7,66:132,49	1 : 2,35 : 39,55	1:5,56:43,56	1:1.98:32.02

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018

#### e. Persentase Kondisi Ruang Kelas Baik

Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tegal. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ruang kelas baik di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2013-2017. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.20.

**Tabel 2.20.**  
**Kondisi Ruang Kelas Baik Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1.	Jumlah ruang kelas kondisi baik	5.108	5.235	4.299	4.349	4.707
1.2.	Jumlah seluruh ruang kelas	5.722	5.817	4.777	4.777	5,136
1.3.	Persentase	89,27	89,99	89,99	91,04	91,65
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
2.1.	Jumlah ruang kelas kondisi baik	2.252	2.257	1.131	1.181	791
2.2.	Jumlah seluruh ruang kelas	2.753	2.753	1.372	1.372	907
2.3.	Persentase	81,80	81,98	82,42	86,08	87,21
<b>3.</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>					
3.1	Jumlah ruang kelas kondisi baik	947	950	952	1.006	1.051
3.2	Jumlah seluruh ruang kelas	1.120	1.122	1.130	1.125	1.171
3.3	Persentase	84,55	84,67	84,25	89,42	89,75

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018

#### f. Persentase Siswa Jenjang Pendidikan Usia Dini/TK

Pendidikan anak usia dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Saat ini berbagai bidang ilmu pendidikan berkembang sangat pesat. Keadaan itu membuka wawasan baru dalam memahami dan mengubah cara mendidik anak. Gambaran kondisi capaian PAUD di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2013-2017. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.21 di bawah ini.

**Tabel 2.21.**  
**Persentase Siswa Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.1.	Jumlah Siswa PAUD	47.765	19.400	24.567	40.446	59.160
1.2.	Jumlah Penduduk Usia 0-6 Tahun	185.111	187.887	191.175	172.381	142.233
1.3.	Persentase	25,80	10,33	12,85	23,46	41,59

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018

#### g. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Data yang ada menunjukkan bahwa angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten Tegal cukup rendah, tidak mencapai 1%. Angka putus sekolah pada tingkat SMP/MTs pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,88 dari tahun 2012. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2011 ke 2012, yaitu pada tingkat SD/MI sebesar 0,91% dan tingkat SMP/MTs sebesar 1,09%, namun, angka putus sekolah pada tingkat SMA/MA/SMK mengalami peningkatan yang cukup signifikan pula pada tahun 2010 ke 2012, yaitu sebesar 1,22%. Peningkatan angka putus sekolah ini dapat disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan pada tingkat SMA/MA/SMK sehingga sejumlah siswadi Kabupaten Tegal yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau mengalami putus sekolah. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.22 di bawah ini.



**Tabel 2.22.**  
**Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>SD / MI</b>					
1.1.	Jumlah Siswa Putus Sekolah	370	218	197	197	52
1.2.	Jumlah seluruh Siswa	184.942	156.729	164.381	162.024	162.935
1.3.	Angka Putus Sekolah (Persentase)	0,20	0,13	0,12	0,12	0,032
<b>2</b>	<b>SMP / MTs</b>					
2.1.	Jumlah Siswa Putus Sekolah	489	413	41	48	23
2.2.	Jumlah seluruh Siswa	80.136	68.978	69.641	69.442	73.251
2.3.	Angka Putus Sekolah (Persentase)	1,61	0,60	0,06	0,07	0,031
<b>3.</b>	<b>SMA / MA</b>					
3.1	Jumlah Siswa Putus Sekolah	230	129	109	109	9
3.2	Jumlah seluruh Siswa	45.968	41.386	44.699	49.012	52.761
3.3	Angka Putus Sekolah (Persentase)	0,50	0,03	0,20	0,22	0,017

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018

#### **h. Angka Kelulusan Siswa**

Meningkatnya jumlah angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun ajaran, menjadi harapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun jika terjadi penurunan, hal tersebut perlu dicermati secara bijak dengan melihat korelasi dan sinergitas di antara siswa, guru serta orangtua. Jumlah kelulusan siswa di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan pada tahun 2013, baik SD/MI, SMP/MTs. Maupun SMA/MA/SMK, seluruhnya mengalami peningkatan kelulusan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Tegal sedikit demi sedikit mulai membaik. Peningkatan tersebut tentunya didukung dengan ketersediaan ruangkelas terhadap rombongan belajar, ketersediaan tenaga pendidik/guru terhadap jumlah murid/siswa, serta ketersediaan tenaga pendidik/guru. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi angka kelulusan siswa di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2013-2017 sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.23.

**Tabel 2.23.**  
**Jumlah Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	23.716	26.793	26.605	26.425	25.860
1.2.	Jumlah seluruh Siswa Kelas VI	23.718	26.798	26.605	26.429	25.860
1.3.	Angka Kelulusan Siswa (Persentase)	99,99 %	99,98%	100%	99,98%	100%
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	20.650	21.342	23.780	23.054	22.319

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
2.2.	Jumlah seluruh Siswa Kelas III	20.696	21.347	23.790	23.058	22,326
2.3.	Angka Kelulusan Siswa (Persentase)	99,78 %	99,97%	99,95%	99,88%	99,97%
3.	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	9.353	12.615	13.360	14.875	14.743
3.2	Jumlah seluruh Siswa Kelas III	9.534	12.620	13.361	14.878	14.750
3.3	Angka Kelulusan Siswa (Persentase)	99,95 %	99,96%	99,99%	99,98%	99,95%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018

#### h. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Kualitas pendidik salah satunya ditunjukkan melalui indikator kualifikasi S1/D4 pendidik. Selama kurun waktu tahun 2013-2017 persentase pendidik yang memiliki kualifikasi S1/D4 di berbagai jenjang pendidikan mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.24 di bawah ini.

**Tabel 2.24.**  
**Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

Jenjang Pendidikan		Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SMA/MA/SMK	89,82	91,20	91,71	90,00	95,04
2	SMP/MTS	89,33	90,10	88,93	89,43	94,39
3	SD	69,20	70,13	93,40	71,22	93,99
4	PAUD	33,56	35,20	38,25	36,00	53,10

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018

## 2. Kesehatan

### a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi: peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (dayapikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapatempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah Posyandu di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 1.518 buah dan jumlah Balita sebanyak 118.521 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 1:78. Hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu di Kabupaten Tegal melayani 78 balita. Berikut secara lengkap disajikan data

mengenai kondisi rasio Posyandudi Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2013-2017 sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.25.

**Tabel 2.25.**  
**Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Tegal Tahun 2013 -2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Posyandu	1.517	1.518	1.518	1.518	1.518
2.	Jumlah Balita	120.121	110.223	114.695	119.084	118.521
3.	Rasio	1 : 79,18	1 : 72,61	1 : 75,5	1 : 78,4	1 : 78

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2018

#### **b. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Per Satuan Penduduk**

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten pada tahun 2017 mencapai 1 : 416. Ini artinya bahwa 1 Puskesmas/Poliklinik/Pustu harus melayani jumlah penduduk sebanyak 416 jiwa. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan mencapai 2:1. Ini artinya bahwa dalam satu kecamatan terdapat 2 unit Puskesmas. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2013-2017 sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.26 berikut ini.

**Tabel 2.26.**  
**Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu  
Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Puskesmas	29	29	29	29	29
2	Jumlah Puskesmas Keliling	30	30	30	30	30
3	Jumlah Poliklinik/PKD/Polindes	231	210	210	209	209
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	64	64	62	62	62
	Jumlah 1s/d 4	354	333	331	330	330
5	Jumlah Penduduk	1.415.009	1.420.132	1.424.890	1.429.386	1.433.515
6	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1 : 48.793	1:48.750	1:49.134	1:49.289	1:49.432
7	Rasio Poliklinik persatuan Penduduk	1 : 6.125	1:6.148	1:6.188	1:6.839	1:6.859
8	Rasio Puskesmas Pembantu persatuan penduduk	1 : 22.109	1:22.190	1:22.264	1:23.055	1:23.121
9	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	1 : 399	1:401	1:382	1:416	1:416
10	Jumlah Kecamatan	18	18	18	18	18
11	Jumlah Desa/Kelurahan	287	287	287	287	287
12	Rasio Puskesmas per Kecamatan	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2018

### c. Pelayanan Rumah Sakit

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 7 unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak 2 unit, rumah sakit swasta sebanyak 4 unit dan rumah sakit ada sebanyak 1 unit. Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Tegal tahun 2017 mencapai 1 : 204.198. Hal ini berarti bahwa untuk 1 rumah sakit di Kabupaten Tegal melayani 204.789 penduduk. Pada Tahun 2015, rasio tempat tidur yang tersedia 7 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta serta 10 Puskesmas Rawat di Kabupaten Tegal dapat dilihat dari total jumlah tempat tidur yang ada yaitu sebanyak 884 tempat tidur dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tegal yang sebanyak 1.415.009 jiwa, jika berpedoman pada standar WHO dimana 1 tempat tidur untuk melayani 1000 penduduk, maka standar rasionya adalah 1400 tempat tidur atau masih ada kekurangan jumlah tempat tidur sebanyak 516 tempat tidur. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2013-2017, dapat dilihat pada Tabel 2.27 berikut ini.

**Tabel 2.27.**  
**Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013 -2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	2	2	2	2	2
2.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	4	4	4	4	4
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1
4.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	7	7	7	7	7
5.	Jumlah Penduduk	1.415.009	1.420.132	1.424.890	1.429.386	1.433.515
6.	Rasio	1 : 202.144	1 : 202.786	1 : 203.555	1 : 204.198	1 : 204.789

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2018

### d. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter umum di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 185 orang, adapun jumlah penduduk sebanyak 1.433.515 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui rasio ketersediaan dokter terhadap 1.000 jumlah penduduk mencapai 0,775. Hal ini berarti bahwa dari 1.000 jiwa penduduk dapat dilayani oleh dokter sebanyak 0,77.

Rasio dokter terhadap jumlah penduduk Kabupaten Tegal tahun 2017 adalah 1:7,75. Ini artinya 1 dokter melayani 7.750 jiwa penduduk. Jumlah ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun tahun 2015 rasio sebesar 1:10,12.. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2013-2017, dapat dilihat pada Tabel 2.28 di bawah ini.

**Tabel 2.28.**  
**Jumlah Dokter Kabupaten Tegal Tahun 2013 -2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Dokter	115	153	153	141	185
2.	Jumlah Penduduk	1.415.009	1.420.132	1.424.890	1.429.386	1.433.515
3.	Rasio dokter per 1.000 penduduk	1 : 12,30	1 : 9,28	1 : 9,31	1 : 10,12	1 : 7,75
4.	Rasio dokter Terhadap penduduk	1:15.684,57	1 : 9.281,91	1 : 9.281,91	1 : 9.564	1 : 7.749

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2018

**e. Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan**

Komplikasi dan kematian ibu maternal sertabayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu danbayi. Jumlah ibu bersalin pada tahun 2017 mencapai 27.674 orang. Dari jumlah tersebut yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan sebanyak 26.647 orang atau sekitar 96,29%. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2016, 2013 dan 2014, namun lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2015. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai persalinan di Kabupaten Tegal yang ditolong oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu tahun2013-2017 sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.29 berikut ini.

**Tabel 2.29.**  
**Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	28.430	26.797	27.669	26.508	26.647
2.	Jumlah Total Ibu Bersalin	31.266	28.591	28.534	28.572	27.674
3.	Persentase	90,96	93,73	96,97	92,78	96,29

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2018

**f. Jumlah Balita Gizi Baik**

Peranan ibu sangat penting dalam mendukung upaya mengatasi masalah gizi, terutama pada asupan gizi keluarga, mulai dari penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, sampai menu makanan. Ibu yang memiliki status gizi baik akan melahirkan anak yang bergizi baik. Anak yang bergizi baik menjadi aset dan investasi bangsa masa depan.

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah gizi buruk di Kabupaten Tegal diantaranya adalah, pemebrian makanan tambahan (PMT) pemulihan selama 90 hari, melakukan konseling dan kunjungan rumah terhadap kasus gizi buruk, pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada balita dan pemberian obat cacing pada balita dan anak sekolah.sedangkan upaya pencegahan dimulai dari pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri/Ratri dan ibu hamil, pemberian vitamin A pada ibu nifas, meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai dengan umur 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang adekuat pada baduta.

Jumlah balita gizi buruk pada tahun 2015 sebanyak 110 balita naik menjadi 118 balita pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 jumlah balita gizi buruk mengalami penurunan menjadi 133 balita. Berikut adalah gambaran secara lengkap kondisi balita gizi baik di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2013-2017 sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.30 di bawah ini.

**Tabel 2.30.**  
**Persentase Balita Gizi Baik Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Balita Gizi Baik	155.991	108.900	113.548	116.327	117.010
2.	Jumlah Balita Gizi Buruk	1.441	175	110	188	133
3.	Jumlah Balita seluruhnya	157.432	110.223	114.695	119.084	118.521
4.	Persentase:					
	- Gizi Baik	99,08	98,80	99	98	99
	- Gizi Buruk	0,92	0,16	0,10	0,08	0,11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2018

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modalsosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusiadan sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini sering kita alami dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan drainase tidak memadai.

Ini juga telah kita alami dengan terjadinya *bottleneck* diberbagai jaringan transportasi yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tataguna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik(buatan) tidak lagi mampu menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 adalah 43,04%, pada tahun 2017 turun menjadi 52,75%. Demikian halnya dengan proporsi jalan kondisi rusak berat pada tahun 2017 yaitu menjadi 20,55%. Pada tahun 2016 terdapat penyerahan atau terima status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan Kabupaten yaitu pada ruas jalan Letjen Sutoyo, Letjend Suparpto, MT Haryono dan Jalan KS Tubun. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai panjang jaringan jalan di Kabupaten Tegal berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2013-2017. Sebagaimana Tabel 2.31 di bawah ini.

**Tabel 2.31.**  
**Panjang dan Proporsi Jalan di Kabupaten Tegal Berdasarkan Kondisi Tahun 2013- 2017**

No	Uraian	Panjang Jalan (km)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kondisi Baik	329,04	367,84	302,68	374,11	377,94
2.	Kondisi Sedang	222,68	104,06	120,56	117,37	170,34
3.	Kondisi Rusak Sedang	157,19	163,20	177,37	150,93	139,51
4.	Kondisi Rusak Berat	54,55	212,17	246,66	204,86	159,48

No	Uraian	Panjang Jalan (km)				
		2013	2014	2015	2016	2017
5.	Jalan secara keseluruhan	764,45	847,27	847,27	847,27	847,27
	Poporsi Kondisi Baik (%)	43,04	43,41	35,72	44,15	44,61
	Poporsi Kondisi Sedang (%)	29,12	12,28	14,23	13,85	20,10
	Poporsi Kondisi Rusak Sedang (%)	20,56	19,26	20,93	17,81	16,47
	Poporsi Kondisi Rusak Berat (%)	7,14	25,04	29,11	24,18	18,82

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tegal Tahun 2018

Panjang jalan nasional di Kabupaten Tegal sepanjang 68,29 km dan jalan Provinsi di Kabupaten Tegal sepanjang 54,63 km serta jalan desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 km. Kriteria kenaikan status jalan desa menjadi jalan kabupaten:

- 1). Jalan desa yaitu jalan pemukiman atau jalan lingkungan tersebut sudah menjadi jalan alternatif untuk menuju pusat kegiatan lokal dengan ibukota kabupaten.
- 2). Jalan desa yaitu jalan pemukiman atau jalan lingkungan tersebut sudah menjadi jalan penghubung antar ibukota kecamatan.
- 3). Jalan desa yaitu jalan pemukiman atau jalan lingkungan tersebut sudah menjadi jalan untuk menuju pusat kegiatan lokal.
- 4). Lebar jalan desa yang diusulkan tidak kurang dari 7,5 m.
- 5). Kecepatan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam.

#### b. Rasio Jaringan Irigasi

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan kedalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Panjang jaringan irigasi nonteknis Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sepanjang 835,822 km, dan panjang jaringan irigasi teknis 1.114,298km yang terdiri dari panjang saluran primer 36.613 m, panjang saluran sekunder 285.150m dan panjang saluran tersier 822.535m. Bangunan terdiri dari bangunan utama (bangunan bendung) sebanyak 443 buah dan bangunan air(bangunan sadap, bagi sadap dan pelengkap) sebanyak 1.015 buah. Berikut adalah secara lengkap mengenai gambaran jaringan irigasi di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2013-2017 sebagaimana Tabel 2.32 di bawah ini.

**Tabel 2.32.**  
**Panjang Saluran Irigasi di Kabupaten Tegal**

No.	Uraian	Panjang saluran irigasi (m)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Irigasi Non Teknis	835.822	835.822	835.822	835.822	835.822
2.	Irigasi Teknis Primer	36.613	36.613	36.613	36.613	36.613
3.	Irigasi Teknis Sekunder	285.150	285.150	285.150	285.150	285.150
4.	Irigasi Teknis Tersier	822.535	822.535	822.535	822.535	822.535

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2018

### c. Penanganan Permasalahan Banjir

Faktor-faktor yang mempengaruhi bencana banjir adalah kondisi bentuk lahan fisiografis, topografi, curah hujan, bentuk morfometri DAS dan kondisi drainase kawasan kerawanan bencana banjir di Kabupaten Tegal dengan tingkat kerawanan tinggi seluas 20.794,86 ha (21,19%) terinci atas Kecamatan Adiwerna (1.405,93 ha), Balapulang (637, 80 ha), Bojong (625,22 ha), Bumijawa desa Sokasari (5,13 ha), Dukuhhuri (1.674, 93 ha), Dukuhwaru (370,53 ha), Jatinegara desa Kedungwungu (92,94 ha), Kramat (4.015,17 ha), Lebaksiu (668, 88 ha), Margasari (1.069,89 ha), Pangkah (234,54 ha), Slawi (110,13 ha), Suradadi (3.326, 91 ha), Talang (1.589, 07 ha), Tarub (1.469, 16 ha) dan Warureja (3.498,65 ha).

### d. Sanitasi

Data panjang saluran air limbah perumahan sebagai tolok ukur penilaian sanitasi tidak tersedia di Kabupaten Tegal. Karena itu, pendekatan yang diambil adalah jumlah rumah yang memiliki jamban. Jamban merupakan salah satu fasilitas yang menunjang kesehatan masyarakat dan karena itu dianggap dapat mewakili kinerja sanitasi dikarenakan *masterplan* sanitasi Kabupaten Tegal yang antara lain memuat data drainase sedang dalam proses penyusunan. Data jumlah rumah berjamban di Kabupaten Tegal seperti tergambar pada Tabel 2.33 berikut ini.

**Tabel 2.33.**  
**Jumlah Rumah Berjamban Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah rumah	309.437	319.220	322.345	325.470	328.595
2.	Jumlah tidak berjamban (unit)	113.627	122.501	124.717	94.813	61.549
3.	Jumlah jamban bersama (unit)	250	250	250	250	250
4.	Jumlah jamban sendiri (unit)	195.810	196.719	197.628	230.657	267.046
3.	Persentase rumah tidak berjamban	36,72	38,38	38,69	29,13	18,73

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2018

### e. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal, kawasan perkotaan di Kabupaten Tegal ditetapkan seluas 8.676 Ha yang tersebar di semua wilayah kecamatan, selain itu luas RTH yang telah ditetapkan dalam RTW adalah 2.6xx Ha.

Sedangkan berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Resolusi Tinggi liputan tahun 2017 dari luas wilayah perkotaan tersebut diatas saat ini yang terbangun adalah 4.689,4 Ha., sedangkan sisanya yang ada masih merupakan RTH yaitu 3.974 Ha. Atau dapat dikatakan luas RTH di wilayah Perkotaan Kab. Tegal sekitar 45,8 %.

### f. Persentase Bangunan ber-IMB

Setiap orang / badan usaha di Kabupaten Tegal yang akan mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku wajib memiliki izin membuat bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Tegal. Pada tahun 2016 jumlah bangunan di Kabupaten Tegal yang telah



ber-IMB sebanyak 1.342 unit. Jumlah bangunan di Kabupaten Tegal yang telah memiliki IMB masih sangat terendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.34 berikut.

**Tabel 2.34.**  
**Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2011 -2016**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Bangunan ber IMB	5.793	8.118	9.519	10.545	12.368	13.710
2.	Jumlah Bangunan	300.717	341.740	314.299	319.220	322.345	325.470
3.	Persentase bangunan ber IMB (%)	1,92	2,37	3,02	3,30	3,83	4,21

Sumber : Dinas Kimtaru Kabupaten Tegal Tahun 2017

#### 4. Perumahan Rakyat

##### a. Luasan Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Tegal terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman. Lokasi kawasan permukiman terdiri dari dua yaitu :

##### 1). Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan mencakup permukiman yang berada pada kawasan perkotaan. Kebijakan pemanfaatan ruangnya didasarkan pada tujuan untuk mengembangkan sarana prasarana penunjang perkotaan serta menata ruang kota melalui penyusunan dan peninjauan kembali (evaluasi, revisi) rencana tata ruang kota. Kawasan permukiman perkotaan tersebut seluas 8.819 (delapan ribu delapan ratus sembilan belas) hektar yang tersebar di setiap ibukota kecamatan. Berdasarkan data terakhir tahun 2017 luasan permukiman perkotaan yang ada tersebut, terdapat permukiman kumuh perkotaan di Kecamatan Adiwerna yaitu di Harjosari Kidul seluas 14,52 ha, Harjosari Lor seluas 9,02 ha dan kecamatan Suradadi di Jatimulya dukuh Sigerung seluas 5,89 ha sehingga luas total permukiman kumuh adalah 29,43 ha.

##### 2). Permukiman Pedesaan

Kebijakan pemanfaatan ruang permukiman pedesaan didasarkan pada tujuan untuk mengembangkan kawasan permukiman yang terkait dengan kegiatan budidaya pertanian yang meliputi pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang terdapat pada PPL. Sedangkan, permukiman pedesaan diluar PPL mencakup perkampungan yang ada dan arahan bagi perluasannya. Luas permukiman perdesaan kurang lebih 19.047 (sembilan belas ribu empat puluh tujuh) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Sebagaimana Tabel 2.35 di bawah ini.

**Tabel 2.35.**  
**Persentase Luas Permukiman Perkotaan dan Perdesaan**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2017**

No.	Uraian	Luasan
1.	Luas area permukiman (ha) :	27.866,00 ha
	a. Permukiman Perkotaan	8.819,00 ha
	Permukiman kumuh perkotaan	28,5 ha
	b. Permukiman Perdesaan	19.047,00 ha
2.	Luas area permukiman tertata (ha)	11.890,00 ha
3.	Persentase Luas Permukiman yang Tertata	42,67 %

Sumber: Dinas Kimtaru Kabupaten Tegal Tahun 2018.

## b. Rasio Rumah Layak Huni

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut. Data terakhir tahun 2017, rumah tidak layak huni sebanyak 9,11% dibanding rumah layak huni 90,89%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.36 berikut ini. Untuk data sampai dengan tahun 2015 masih dalam proses perhitungan.

**Tabel 2.36.**  
**Jumlah Rumah Layak Huni Kabupaten Tegal Tahun 2014-2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah rumah	319.220	322.345	325.470	328.595
2.	Jumlah rumah layak huni unit	286.328	291.051	294.657	298.649
3.	Persentase rumah layak huni	89,7	90,29	90,53	90,89
4.	Persentase rumah tidak layak huni	10,3	9,71	9,47	9,11

Sumber : Dispermasdes Kabupaten Tegal Tahun 2017

## c. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kabupaten Tegal dilakukan oleh PDAM, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan swadaya masyarakat. PDAM melayani penyediaan air bersih perkotaan sedangkan DPU melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih perdesaan. Untuk melayani penyediaan air bersih perkotaan tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam, dan sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi. Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui pemasangan pompa, pembangunan sumur dalam, sumur dangkal serta pembangunan terminal air. Sumber air yang digunakan berasal dari mata air. Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan selanjutnya diserahkan pada desa masing-masing yang dikoordinir oleh LKMD atau BPABD.

Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum belum menjangkau seluruh kota/desa/kelurahan/kecamatan di Kabupaten Tegal. Oleh karenanya Pemerintah mengharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Cakupan pelayanan air bersih perpipaan dan nonperpipaan di Kabupaten Tegal tahun 2017 mencapai 67,27% terhadap total jumlah rumah tangga Kabupaten Tegal (328.595 Rumah Tangga) dengan jumlah desa yang telah mendapat pelayanan air bersih sebanyak 207 desa dari 287desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tegal. Berikut adalah kondisi rumah tangga yang telah mendapatkan penyediaan air bersih dalam kurun waktu 2013-2017 sebagaimana Tabel 2.37 di bawah ini

**Tabel 2.37.**  
**Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah rumah	309.437	319.220	322.345	325.470	328.595
- Terlayani	274.275	272.292	206.183	216.886	221.048
- Blm Terlayani	102.657	104.040	119.787	109.084	107.547
Persentase terlayani :					
- Dari Perpipaan	28,85%	28,48%	16,22%	17,84%	38,44%
- Dari Non Perpipaan	71,15%	71,52%	47,04%	48,70%	28,83%
Total Persentase Terlayani	72,77%	72,35%	63,25%	66,54%	67,27%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun, 2018

## 5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

### a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Polisi pamong praja merupakan aparaturnya pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2017 jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Tegal sebanyak 118 orang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2016. Rasio ketersediaan jumlah pamong praja tahun 2017 sebesar 1 : 0,82. Ini artinya dari 10.000 jiwa jumlah penduduk di Kabupaten Tegal baru tersedia polisi pamong praja sebanyak 82 orang. Data tentang rasio jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.38 di bawah ini.

**Tabel 2.38.**  
**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Pol PP	92	92	98	109	118
2.	Jumlah Penduduk	1.415.009	1.420.132	1.424.890	1.429.386	1.433.515
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	1 : 0,65	1 : 0,65	1:0,69	1:0,76	1:0,82

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2018

### b. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas dapat menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk memelihara ketentraman/ ketertiban masyarakat sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio jumlah Linmas di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 mencapai 50,89. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kabupaten Tegal pada tahun 2017 tersedia jumlah Linmas sebanyak 7.295 orang. Rasio ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan jumlah penduduk yang meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.39 di bawah ini.

**Tabel 2.39.**  
**Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Linmas	8.409	8.403	8.450	8.450	7.295
2.	Jumlah Penduduk	1.415.009	1.420.132	1.424.890	1.429.386	1.433.515
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	1 : 59,42	1 : 59,17	1:59,30	1:59,12	1:50,89

Sumber : Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Tegal Tahun 2018

### c. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio pos siskamling per desa/kelurahan dapat menggambarkan ketersediaan pos siskamling pada setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling, akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Jumlah pos siskamling di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 1.118 buah, adapun jumlah desa dan kelurahan sebanyak 287 desa/keluarga. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio jumlah pos siskamling di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebesar 1:3. Ini artinya ketersediaan jumlah pos siskamling yang ada pada setiap desa/kelurahan sebanyak 2 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.40 di bawah ini.

**Tabel 2.40.**  
**Rasio Pos Siskamling Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Pos Siskamling	580	580	580	580	1.118
2.	Jumlah Desa dan kelurahan	287	287	287	287	287
3.	Rasio Pos Siskamling perdesa/kelurahan	1 : 2	1 : 2	1:2	1:2	1:3

Sumber : Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Tegal Tahun 2018

## 6. Sosial

### a. Masalah Kesejahteraan Sosial

Pembangunan bidang sosial senantiasa berhadapan dengan berbagai kendala dan tantangan yang semakin luas dan kompleks. Sangat disadari sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini maka semakin berpengaruh terhadap kondisi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di masyarakat. Penanganan PMKS di Kabupaten Tegal berjalan cukup baik ditandai dengan semakin menurunnya jumlah PMKS. Namun demikian dengan adanya kecenderungan tersebut, beberapa tantangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal relatif masih sangat besar. Adapun jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Tegal semakin turun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, tetapi jumlah yang tertangani masih relatif rendah hanya kisaran 25% dari jumlah PMKS yang ada.

### b. Kebencanaan

Bencana yang terjadi di Kabupaten Tegal pada kurun waktu tahun 2011-2016 antara lain banjir, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran. Pada Tahun 2015 jumlah korban bencana terbanyak di dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan sesudahnya yaitu sebanyak 2.939 Kepala Keluarga. Penanganan atas korban bencana setiap tahun sebanyak 100%. Adapun data tentang penanganan masalah kesejahteraan sosial dan kebencanaan sebagaimana Tabel 2.41 berikut ini.

**Tabel 2.41.**  
**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan yang Ditangani Kabupaten Tegal Tahun 2011-2016**

No	Tahun	Jumlah PMKS	Yang ditangani	%	Jumlah Korban Bencana (KK)	Yang ditangani (KK)	%
1	2011	103.526	19.670	19	18	18	100
2	2012	102.501	25.625	25	26	26	100
3	2013	101.486	23.342	23	54	54	100

No	Tahun	Jumlah PMKS	Yang ditangani	%	Jumlah Korban Bencana (KK)	Yang ditangani (KK)	%
4	2014	792.785	20.060	2.53	470	470	100
5	2015	769.769	41.172	5.34	2.939	2.939	100
6	2016	739.930	739.930	100	243	243	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2017

#### 2.1.4.2 Fokus Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

##### 1. Tenaga Kerja

##### a. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja baru di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap PMA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja baru suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut. Pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja baru yang terserap pada PMA/PMDN berjumlah sebanyak 4.555 orang. Penyerapan tenaga kerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.42 berikut ini.

**Tabel 2.42.**  
**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Baru**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah tenaga kerja yang terserap pada perusahaan PMA/PMDN	1.670	1.731	750	715	4.555
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN yang menyerap Tenaga Kerja Baru	8	9	2	2	2
3	Rasio daya serap Tenaga kerja	209 : 1	192 : 1	375 : 1	357 : 1	2.277 : 1

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal tahun 2018

##### b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu : tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerjaan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja atau mencari kerja. Tahun 2017 TPAK di Kabupaten Tegal mencapai 81%, angka ini naik bila dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 63,17%. Kondisi penduduk usia produktif (15-64tahun) menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2013-2017 adalah sebagaimana Tabel 2.43 di bawah ini.

**Tabel 2.43.**  
**Penduduk Usia Produktif (15-64Tahun) di Kabupaten Tegal**  
**Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2013 -2017**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Penduduk usia 15+	978.968	1.105.008	1.119.139	1.424.891	1.047.421
2	Angkatan Kerja	615.630	900.214	891.014	900.214	15.551
3	Bukan Angkatan Kerja	363.338	207.704	228.125	-	-
4	Bekerja	572.937	846.200	837.206	712.528	4.555
5	Pengangguran	42.693	53.943	53.808	187.686	11.522
6	TPAK (Tingkat partisipasi angkatan kerja)	62,89%	81,46%	79,61%	63,17%	81%
7	TKK (Tingkat Kesempatan Kerja)	93,07%	92,22%	93,96%	53,73%	97,10%
8	TPT ( tingkat pengangguran terbuka)	4,36%	6,37%	6,03%	54,7%	5,47%
9	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	13.107	10.226	9.432	11.788	6.007
10	Penempatan AKL	5.301	1.531	4.910	729	120
11	Penempatan AKAD	11.068	3262	2800	91	231
12	Penempatan AKAN	6.850	3325	371	500	653
13	Jumlah Pencaker/Pembuat AKI	13.107	10.226		11.788	16.077

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal tahun 2018

### c. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja dapat menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja) untuk para pencari kerja. Kesempatan kerja terbesar berada pada lapangan usaha perdagangan, restoran dan hotel, disusul dengan lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah penduduk yang memperoleh kesempatan kerja di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2013-2014 menurut lapangan usaha. Sebagaimana Tabel 2.44 di bawah ini.

**Tabel 2.44.**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal yang Bekerja**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014**

No.	Lapangan Usaha	2013	2014
1	Pertanian	137.420	137.069
2	Industri pengolahan	103.224	105.390
3	Bangunan	60.124	64.935
4	Perdagangan, Restoran dan Hotel	157.441	178.866
5	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	36.641	36.135

No.	Lapangan Usaha	2013	2014
6	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan	4.013	5.579
7	Jasa Kemasyarakatan	71.532	66.342
8	Pertambangan dan Penggalian	2.084	1.580
9	Listrik, Gas dan Air	458	1.183
	Jumlah	572.937	597.079

Sumber : BPS Kabupaten Tegal tahun 2017

**Tabel 2.45.**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Tegal yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2016**

No.	Lapangan Usaha	2015	2016
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	129.275	113.447
2	Industri pengolahan	108.990	114.031
3	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	163.391	169.050
4	Jasa Kemasyarakatan	59.902	64.169
5	Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan)	104.990	110.187
	Jumlah	566.548	570.884

Sumber : BPS Kabupaten Tegal tahun 2017

**Tabel 2.46.**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Tegal yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017**

Uraian	Total	
	Jiwa	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	121.080	18,77
Pertambangan dan Penggalian	4.428	0,69
Industri	139.419	21,61
Listrik, Gas dan Air Minum	681	0,11
Konstruksi	52.319	8,11
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	188.514	29,22
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	33.634	5,21
Lemabaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	13.140	2,04
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	91.947	14,25
<b>JUMLAH</b>	<b>645.162</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tegal tahun 2017

## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta

Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan

pada lembaga pemerintah maupun swasta. Jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Tegal yang bekerja di dalam negeri pada tahun 2017 sebanyak 6.144. Angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebanyak 5.804, tahun 2015 sebanyak 5.481, tahun 2014 sebanyak 5.386 dan tahun 2013 sebanyak 5.896. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Tegal yang bekerja di dalam negeri dan diluar negeri selama kurun waktu 2013-2017. Sebagaimana Tabel 2.47 di bawah ini.

**Tabel 2.47.**  
**Jumlah Pekerja Perempuan Kabupaten Tegal**  
**yang Bekerja di Dalam Negeri dan Luar Negeri Tahun 2013-2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pekerja perempuan di dalam negeri	5.896	5.386	5.481	5.804	6.144
2.	Jumlah pekerja perempuan di Luar negeri	742	758	783	879	516
3.	Jumlah total pekerja perempuan	6.638	6.144	6.264	6.683	6.630
4.	Persentase pekerja perempuan di Dalam negeri	88,82	87,66	87,5	86,85	92,67
5.	Persentase pekerja perempuan di Luar negeri	11,18	12,34	12,5	13,15	7,78
6.	Jumlah Pekerja Perempuan sebagai PNS	5.739	5.697	5.721	5.388	5.926
7.	Jumlah Pekerja Perempuan sebagai Anggota DPRD	5	10	10	10	10
8.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	10	20	20	20	20

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal tahun 2018

#### **b. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran didalam kehidupan rumah tangga. Jumlah kejadian KDRT di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 7 rumah tangga dari 444.490 rumah tangga. Angka ini menurun bila dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 12 KDRT dari 430.290 rumah tangga. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa rasio KDRT mencapai 0,0027 pada tahun 2016 dan 0,0157 pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.48 di bawah ini.

**Tabel 2.48.**  
**Rasio KDRT di Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah KDRT	13	10	51	12	7
2.	Jumlah Rumah Tangga	390.749	400.269	431.974	430.290	444.490
3.	Rasio KDRT	0,003	0,002	0,012	0,0027	0,0157

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal tahun 2018



### c. Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, standar pelayanan minimal mencakup jenis pelayanan Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta cakupan pelayanan lainnya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.49 berikut ini.

**Tabel 2.49.**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2013-2017**

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Tahun (%)				
			2013	2014	2015	2016	2017
I	Penanganan pengaduan/ Laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	100	100	210	280	110
II	Pelayanan kesehatan Bagi perempuan dan anak Korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	100	99	210	280	110
III	Rehabilitasi sosial bagi Perempuan dan anak Korban kekerasan	1. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	50	55	100	100	100
		2. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	50,4	75	200	280	110
IV	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	1. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	100	100	80	40	41

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Tahun (%)				
			2013	2014	2015	2016	2017
		2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	55	70	110	100	100
V	Pemulangan dan Reintegrasi sosial bagi Perempuan dan anak Korban kekerasan	1. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	50	50	0	100	100
		2. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	100	100	0	100	100

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal tahun 2018

### 3. Pangan

#### a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 221.928 ton, dengan jumlah konsumsi Pangan yang di konsumsi oleh 1.444.074 jiwa penduduk sebanyak 134.588 ton (164,89%). Jumlah ketersediaan pangan utama dan jumlah penduduk tahun 2017 meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi pangan utama bila dibandingkan tahun 2012. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel 2.50 di bawah ini.

**Tabel 2.50.**  
**Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama(ton)	133.695	183.158	214.863	221.533	221.928
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.415.009	1.420.132	1.424.890	1.429.386	1.433.515
3.	Jumlah Komsumsi Pangan Utama (ton)	176.765	133.574	133.156	133.155	134.588
4.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (ton) terhadap Jumlah Komsumsi Pangan Utama	75,63	137,12	161,36	166,37	164,89

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2018

#### b. Distribusi dan Akses Pangan

Indikator dari jenis pelayanan Distribusi dan Akses Pangan adalah Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah, serta indikator stabilitas harga dan pasokan pangan. Target komoditas yang wajib dipantau untuk diketahui informasi pasokan, harga dan akses adalah gabah/beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir dan cabe merah. Persentase capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah pada Tahun 2016 sebesar 77,68% dan Tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 104,22%. Adapun stabilitas harga dan pasokan pangan tercapai 98,67% pada Tahun 2012 namun turun menjadi 91,64% di Tahun 2013.

### c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Indikator dari jenis pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan. Pada Tahun 2016 skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Tegal sebesar 72,1% dan Tahun 2017 meningkat menjadi 78,6%.

### d. Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator dari Penanganan Kerawanan Pangan pada Tahun 2016 sebanyak 15 Desa, sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 9. Dukungan untuk pencapaian jenis pelayanan ini antara lain dengan pembuatan peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat Kabupaten Tegal.

Adapun Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan, sampai dengan tahun 2017 secara rinci sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.51 di bawah ini.

**Tabel 2.51.**  
**Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Distribusi dan Akses Pangan					
	- Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	24,58	48,28	49,95	77,68	104,22
	- Stabilitas harga dan pasokan pangan	73,73	87,07	85,14	98,67	91,64
2.	Penganekaragaman dan Keamanan					
	- Skor pola pangan harapan	88,3	83,8	83,6	72,1	78,6
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	80	73,58	-	-
3.	Penanganan kerawanan pangan					
	- Penanganan daerah rawan pangan	7	16	9	15	9

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2018

### e. Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan; dan sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah Kabupaten/Kota telah tersedia, diantaranya yaitu: UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; dan sebagainya. Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal tahun 2013 - 2017 tercermin dengan capaian indikator ketersediaan energi per kapitan dari tahun 2013 - 2016 selalu meningkat, namun mengalami penurunan pada tahun 2017. Sedangkan ketersediaan protein per kapita dan Penguatan Cadangan Pangan dari tahun 2013 - 2017 perkembangannya masih fluktuatif. Hal ini tercermin dari tabel Tabel 2.52 di bawah ini.

**Tabel 2.52.**  
**Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan					
	- <i>Ketersediaan Energi per kapita</i>	2172,8	2.335,8	2.402,8	2.638,4	2.419,5
	- <i>Ketersediaan Protein per Kapita</i>	69,7	73,8	60,1	64,6	59,1
2.	Penguatan Cadangan Pangan	222,44	204,39	209,13	240,04	223,19

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2018

#### 4. Pertanian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanahan antara lain dilihat dari jumlah permohonan sertifikat dan jumlah penyelesaian sertifikat di Kabupaten Tegal. Permohonan dan penyelesaian sertifikat secara umum memiliki tren yang meningkat, baik permohonan dan penyelesaian sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak tanggungan, maupun hak pakai. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Berikut adalah data jumlah permohonan dan penyelesaian sertifikasi di Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2015, sebagaimana Tabel 2.53 di bawah ini.

**Tabel 2.53.**  
**Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Sertifikat Di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2012- 2016**

No	Jenis Sertifikat	2012		2013		2014		2015		2016	
		Bidang	Luas (ha)	Bidang	Luas (ha)	Bidang	Luas (ha)	Bidang	Luas (ha)	Bidang	Luas (ha)
1.	Permohonan										
	a. Hak Milik	19.173	9.319,3	20.613	224.363	10.443	4.500.270	16.811	4.350.248	11.789	5.523.804
	b. Hak Guna Bangunan	1.134	1.255,9	1.176	582,9	704	269.601	610	400.151	639	156.998
	c. Hak Pakai	48	104,6	80	190,9	51	131.892	100	134.913	94	486.619
	d. Hak Tanggungan	4.711	N/A	4.706	N/A	4.714	N/A	4.096	N/A	4.704	N/A
	e. Roya	2.824	N/A	2.433	N/A	2.616	N/A	2.855	N/A	3.354	N/A
2.	Penyelesaian										
	a. Hak Milik	19.462	16.353,8	17.801	7.733,4	10.535	457	8.765	3.619.604	11.903	5.623.017
	b. Hak Guna Bangunan	834	737,4	1.368	428,8	819	29,85	590	184.164	665	290.865
	c. Hak Pakai	30	98,4	76	171,1	51	13,85	68	65.080	83	168.553
	d. Hak Tanggungan	4.823	N/A	7.145	N/A	4.557	N/A	4.324	N/A	4.772	N/A
	e. Roya	2.429	N/A	2.588	N/A	2.489	N/A	2.981	N/A	3.505	N/A

Sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal Tahun 2017

#### 5. Lingkungan Hidup

##### a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup antara lain disebabkan karena pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Berbagai peraturan dan perundangan di bidang lingkungan hidup mensyaratkan ketentuan teknis dan administrasi yang harus ditaati oleh seluruh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Dalam pengendalian pencemaran air, ketentuan teknis yang harus dipenuhi antara lain: dimilikinya sarana pengolah air limbah yang berfungsi baik sehingga air limbah memenuhi baku mutu sebelum dibuang, dibuangnya air limbah melalui saluran khusus, dipasangnya alat ukur debit

air limbah, dan diujinya kualitas air limbah setiap bulan; sementara ketentuan administrasi yang harus dipenuhi antara lain: dimilikinya izin pembuangan air limbah, dilakukannya pelaporan hasil pengujian kualitas air limbah dan pencatatan harian debit air limbah. Dalam pengendalian pencemaran udara, ketentuan teknis yang harus dipenuhi antara lain: dimilikinya sarana pengendalian pencemaran udara dan kelengkapannya yang berfungsi baik sehingga emisi cerobong memenuhi baku mutu sebelum dibuang, serta diujinya kualitas udara emisi dan ambien setiap 6 (enam) bulan, sementara ketentuan administrasi antara lain dilakukannya pelaporan hasil pengujian. Dalam pengendalian pengelolaan limbah B3, ketentuan teknis antara lain: dimilikinya tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang berizin dan dilakukannya pengelolaan limbah B3, sementara ketentuan administrasi antara lain dimilikinya izin TPS limbah B3 dan dilakukannya pelaporan pengelolaan limbah B3.

Untuk dapat mengendalikan lingkungan hidup diperlukan informasi lingkungan hidup diantaranya adalah pengukuran IKLH. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara dan Indeks Tutupan Hutan atau Lahan, dimana indikator tersebut mewakili *green issues* (isu hijau) dan *brown issues* (isu coklat). Dengan rumusan IKLH Kabupaten : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten = (IKA x 30 %) + (IKU x 30 %) + (ITL x 40 %), dengan keterangan IKA : Indeks Kualitas Air ; IKU : Indeks Kualitas Udara ; ITL : Indeks Tutupan Lahan. Nilai IKLH Kabupaten Tegal berdasarkan Eksekutif Summary IKPLHD Tahun 2017 menunjukkan nilai 63,783 dan lebih tinggi dengan IKLH nasional yakni sebesar 62,96.

Pengawasan lingkungan Hidup bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Perijinan yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga Kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam Izin Lingkungan/Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL). Kabupaten Tegal pada tahun 2018 telah dilakukan pengawasan sebanyak 5 kali terhadap perusahaan berdokumen LH. Secara lebih lengkap pengawasan dari Tahun 2015 – Tahun 2018 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.54.**  
**Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2015-2017**

No.	Keterangan	2015	2016	2017
1.	Jumlah Pengawasan terhadap perusahaan berdokumen LH	30	40	37
2.	Persentase UKL - UPL yang dipantau	13,4	60	156

Sumber : DLH Kabupaten Tegal Tahun 2018

### **b. Kawasan Lindung**

Kawasan Lindung merupakan kawasan dengan fungsi utama adalah melindungi pelestarian fungsi daya alam, sumber daya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Kawasan ini harus dilindungi dari kegiatan produksi dan kegiatan manusia, dilindungi yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya. Secara umum tujuan dan penentuan arahan kebijakan dalam pemanfaatan kawasan lindung adalah mengurangi resiko kerusakan lingkungan hidup dan kehidupan sebagai akibat dari kegiatan pembangunan. Pengelolaan kawasan lindung meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Kegiatan perencanaan mencakup penetapan batas-batas kawasan yang berfungsi lindung dengan menggunakan kriteria tertentu. Kawasan lindung yang dikelola pemanfaatan ruangnya terdiri dari :

### 1) Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung dikelola oleh negara sangat penting dalam menjaga kualitas air sungai, ketersediaan air sungai, serta pelestarian berbagai flora dan fauna sepanjang daerah aliran sungai termasuk peningkatan produktivitas lahan, terletak di Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Margasari seluas 2.961,41ha.

### 2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air. Kawasan resapan air adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuiver*) yang berguna sebagai penyedia sumber air. Lokasi di Kabupaten Tegal :

- a) Kecamatan Balapulang dengan luas kurang lebih 549 (lima ratus empat puluh sembilan) hektar;
- b) Kecamatan Jatinegara dengan luas kurang lebih 1.766 (seribu tujuh ratus enam puluh enam) hektar;
- c) Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 319 (tiga ratus sembilan belas) hektar;
- d) Kecamatan Lebaksiu dengan luas kurang lebih 806 (delapan ratus enam) hektar;
- e) Kecamatan Pangkah dengan luas kurang lebih 517 (lima ratus tujuh belas) hektar.

### 3) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Di seluruh kecamatan di Kabupaten Tegal kawasan ini luasnya kurang lebih 33.593 (tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar tersebar.

### 4) Kawasan Suaka Alam

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suaka alam untuk melestarikan lingkungan dan melindungi keanekaragaman biota serta ekosistem. Gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pola umumnya. Sebagaimana Tabel 2.55 di bawah ini.

**Tabel 2.55.**  
**Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Tegal Tahun 2015**

No	Kawasan Suaka Alam	Luas	Lokasi
1	Cagar Alam	2 ha	a. Cagar alam Guci, Bumijawa
		6,6 ha	b. Cagar alam sub vak 18c, 19b, Jatinegara
2	Kawasan Suaka alam laut	10,6 ha	Kawasan konservasi perairan Karang Jeruk kecamatan Kramat

No	Kawasan Suaka Alam	Luas	Lokasi
3	Pantai berhutan bakau		Pantai berhutan bakau berlokasi di kecamatan Warureja
4	Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Situs purbakala di desa Semedo kecamatan Kedungbanteng</li> <li>b. Makam Sunan Amangkurat di desa Pesarean kecamatan Adiwerna;</li> <li>c. Makam Ki Gede Sebayu di desa Danawarih kecamatan Balapulang;</li> <li>d. Randu Alas di desa Slawi Kulon kecamatan Slawi;</li> <li>e. Makam Purbaya di desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru.</li> </ul>

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2017

### c. Pencemaran

Pencemaran di Kabupaten Tegal meliputi pencemaran air dan pencemaran udara. Pencemaran merupakan konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas berbagai sektor baik pada industri, perdagangan, pertanian dan lainnya semuanya akan menghasilkan limbah, termasuk sampah dan limbah tinja (domestik). Kondisi Pencemaran Kabupaten Tegal dapat dilihat dari hasil perhitungan Indikator Kualitas Air (IKA) dimana pada Tahun 2017 sebesar 40,00 dan hasil perhitungan Indek Kualitas Udara (IKU) 83,44. Dalam upaya meningkatkan kualitas udara Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dan para pelaku usaha industri. Diantaranya keikutsertaan penilaian *PROPER*, Industri Hijau, Kalpataru, Adiwiyata, Program Desa/Kelurahan Bersih Sehat Lestari (Berseri), Perindangan dan Hutan Kota, Program kampung Iklim, *Car Free Day*, Penghijauan dan reboisasi.

Dalam penanganan sampah secara *3 R*, telah dibentuk Bank Sampah di komunitas masyarakat sebanyak 120 di tahun 2018 ini. Untuk lebih jelasnya perkembangan Bank Sampah pada Tahun 2015 - 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.56.**  
**Bank Sampah Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2015 - 2018**

Keterangan	2015	2016	2017	2018
Bank Sampah	81	86	86	120

Sumber : DLH Kabupaten Tegal tahun 2018.

### d. Plasma *Nutfah* dan Terumbu Karang

Plasma *nutfah* dilindungi dan terancam punah di Kabupaten Tegal adalah plasma *nutfah* sebanyak 13 jenis hewan, sedangkan plasma *nutfah endemik* pada 2016 adalah sebanyak 7 jenis. Luas terumbu karang sampai dengan 2017 adalah 10,635 ha, dengan kondisi terumbu karang baik 8,99% dan kondisi terumbu karang rusak 91% sebagaimana Tabel 2.57 berikut ini.

**Tabel 2.57.**  
**Jumlah Plasma Nutfah dan Terumbu Karang di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	a. Plasma nutfah dilindungi					
	1). Hewan	12	12	12	13	1
	2). Tumbuhan	0	0	0	0	0
	b. Plasma nutfah Terancam Punah					
	1). Hewan	12	12	12	13	
	2). Tumbuhan	0	0	0	0	
	c. Plasma nutfah endemik					
	1). Hewan	6	6	6	7	
	2). Tumbuhan	0	0	0	1	
2	Terumbu Karang					
	a. Luas Terumbu Karang (ha)	10,635	10,635	10,635	10,636	10,635
	b. Kondisi Terumbu Karang (%)					
	1). Baik	11,20	9,69	9,69	9,69	8,99
	2). Sedang	0	0	0	0,009	0
	3). Rusak	88,80	90,31	90,31	90,25	91,00

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal , 2018.

#### **e. Persentase Penanganan Sampah**

Salah satu masalah yang dihadapi di Kabupaten Tegal adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbunan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Pada tahun 2017 Kabupaten Tegal hanya mempunyai 1 (satu) buah TPSA yaitu TPSA Penujah, yang terletak di Desa Penujah Kecamatan Kedungbanteng. Jumlah total timbunan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak 498m<sup>3</sup> perhari. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebanyak 458m<sup>3</sup> per hari. Dari jumlah tersebut, yang tertangani/terangkut ke TPSA hanya sebesar 347m<sup>3</sup>. Dengan demikian masih tersisa sampah sebesar 149m<sup>3</sup> (30%) yang belum terangkut/terbuang ke TPSA. Berikut adalah kondisi persampahan di Kabupaten Tegal secara lengkap dalam kurun waktu 2013-2017 sebagaimana Tabel 2.58 di bawah ini.

**Tabel 2.58.**  
**Persentase Volume Sampah Yang Terangkut Per Hari**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017 (m<sup>3</sup>)**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah volume sampah yang terangkut (m <sup>3</sup> )	709,70	194,38	251,42	289,89	347
2.	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m <sup>3</sup> )	965,58	989,80	960,09	458	496
3.	Persentase sampah terangkut	73,50	19,64	26,19	63,29	70

Sumber: DLH Kabupaten Tegal Tahun 2018



#### f. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Per Satuan Penduduk

Sebelum sampah diangkut / dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 113 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut sebesar 222,75 ton. Berikut adalah gambaran rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, sebagaimana Tabel 2.59 di bawah ini.

**Tabel 2.59**  
**Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara terhadap Jumlah Penduduk**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah TPSS (unit)	39	50	45	72	113
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	76,88	98,56	88,71	141,92	222,75
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.415.009	1.420.132	1.424.890	1.429.386	1.433.515
4.	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	0,054	0,069	0,062	0,099	0,155

Sumber: DLH Kabupaten Tegal Tahun 2018

#### 6. Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari capaian standar pelayanan minimal Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Indikator Standar Pelayanan Minimal ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*). Cakupan penerbitan *e-KTP* ditargetkan 100% pada tahun 2016.

Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2016 dari 1.429.386 jiwa penduduk yang memiliki KTP, baru sebanyak 901.778 penduduk. Indikator SPM lainnya adalah cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang telah ditetapkan target capaiannya sebesar 100% pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 978.108 penduduk.

Sementara itu, jumlah penerbitan KK di Kabupaten Tegal sejumlah 404.866 pada tahun 2017. Cakupan penerbitan kutipan nikah di Kabupaten Tegal sampai dengan 2017 yaitu 309.617. Dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah bila dilihat selama kurun waktu 5 tahun (tahun 2013-2017), jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah rata-rata mengalami peningkatan.

Peningkatan ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran kependudukan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kepemilikan administrasi kependudukan selama kurun waktu tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel 2.60 di bawah ini.

**Tabel 2.60.**  
**Jumlah Kepemilikan KTP, KK, Akta Lahir, Akta Nikah**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kepemilikan KTP	1.299.859	675.417	703.668	901.778	978.108
2.	Kartu Keluarga (KK)	87.467	269.818	333.130	336.250	404.866
3.	Akte Kelahiran	331.449	312.930	359.575	419.485	471.200
4.	Akte Nikah	902.055	301.069	297.002	312.182	309.617

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2017

## 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### a. Kelompok Binaan LPM

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM. Jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Tegal tahun 2016 sebanyak 508 kelompok, adapun jumlah LPM sebanyak 508 LPM, dengan demikian rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah sebanyak 1 kelompok per LPM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.61 di bawah ini.

**Tabel 2.61.**  
**Kelompok Binaan LPM Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah LPM	563	508	508	508	508
2.	Jumlah Kelompok Binaan LPM	563	508	508	508	508
3.	Rata-rata kelompok Binaan LPM per LPM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber : DISPERMADES Kabupaten Tegal Tahun 2017

### b. Rata-rata Jumlah Kelompok binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Jumlah PKK di Kabupaten Tegal tahun 2016 sebanyak 6.886 anggota, dengan Jumlah kelompok binaan PKK sebanyak 33 kelompok. Kelompok binaan PKK ini terdiri dari: Posyandu, *BKB UP2K-PKK*, Pos *PAUD*, Posbunda Lansia dan Kebun Percontohan PKK. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah 0,005 kelompok per anggota PKK. Ini artinya bahwa setiap 100 PKK aktif di Kabupaten Tegal mempunyai 5 kelompok binaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.62 di bawah ini.

**Tabel 2.62**  
**Kelompok Binaan PKK Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	a. Jumlah PKK	6.886	6.886	6.886	6.886	6.886
	b. Jumlah PKK Aktif	6.853	6.853	6.853	6.853	6.853
	c. Persentase PKK Aktif	99,52	99,52	99,52	99,52	99,52
2.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	33	33	33	33	33
3.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005

Sumber : DISPERMADES Kabupaten Tegal Tahun 2017

### c. Jumlah LSM yang Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Besarnya jumlah LSM aktif dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah. Jumlah LSM di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 79 LSM. Jumlah LSM ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2013-2017). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.63 di bawah ini.

**Tabel 2.63.**  
**Jumlah LSM Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah LSM terdaftar	72	73	75	75	79

Sumber : Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Tegal Tahun 2017

## 8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

### a. Capaian Standar Pelayanan Minimal Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Jenis layanan dari standar pelayanan minimal Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (*KIE KB dan KS*), Penyediaan Obat dan Alat *Kontrasepsi*, dan Penyediaan Informasi Data *Mikro*. Capaian indikator SPM Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada Tabel 2.64 di bawah ini.

**Tabel 2.64.**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun	1,54	1,55%	1,54%	1,38%	1,16%
2.	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	73,3%	72,30%	71,4%	71,85%	70,15%
3.	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	14,27%	14,50%	14,54%	13,37%	13,97%
4.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	78,9%	80,30%	81,91%	83,03%	83,03%
5.	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	84,2%	82,80%	81,66%	80,79%	80,02%
6.	Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB)	0,33	3,02	0,35	0,32	0,30
7.	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana	1	1	1	1	1
8.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal tahun 2018

## b. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) anak. Berkaitan dengan hal di atas, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata anak dalam keluarga di Kabupaten Tegal adalah 1,32 pada tahun 2017 atau setiap keluarga rata-rata memiliki anak sebanyak 1-2 anak. Angka ini tidak jauh berbeda pada tahun-tahun sebelumnya (2013-2016), yaitu setiap keluarga memiliki anak sebanyak 1-2 anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.65 di bawah ini.

**Tabel 2.65**  
**Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah anak	551.217	575.490	512.567	520.372	320.955
2.	Jumlah keluarga	381.006	431.974	431.974	430.290	444.490
3.	Rata-rata jumlah anak perKeluarga	1,45	1,33	1,33	1,21	1,32

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal tahun 2018

## c. Rasio Akseptor KB

Tingkat *fertilitas* pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan dengan TFR sebesar 2,35. Hal ini terlihat bahwa Kabupaten Tegal mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak perkeluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kabupaten Tegal saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 205.357 peserta dari 292.858 pasangan usia subur. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2016, 2015, 2014 dan 2013. Adapun rasio *akseptor* KB terhadap jumlah pasangan usia subur selama kurun waktu tahun 2013-2017 masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.66 di bawah ini.

**Tabel 2.66**  
**Rasio Akseptor KB Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah PUS	296.415	298.741	300.194	293.088	292.858
2.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	225.499	216.029	210.239	210.584	205.357
3.	Jumlah Tidak Ber-KB	70.916	82.712	89.255	82.504	87.501
4.	Rasio Akseptor KB	76,08	72,31	70,27	71,85	68,93

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal tahun 2018

## 9. Perhubungan

### a. Jumlah Izin Trayek

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Tegal wajib memiliki izin trayek. Jumlah angkutan umum terus meningkat, dimana pada tahun 2017 jumlah angkutan umum sebanyak 972 unit. Kepemilikan izin trayek dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengemudi angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 146 izin dan 140 izin di tahun 2016. Data tentang jumlah angkutan umum dan jumlah izin trayek sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.67 di bawah ini.

**Tabel 2.67**  
**Rasio Izin Trayek Kabupaten Tegal Tahun 2013 -2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Angkutan Umum	2.901	2.901	980	981	972
2.	Jumlah Izin Trayek	126	135	138	140	146

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2018

#### **b. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum**

Seluruh angkutan umum di Kabupaten baik yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Jumlah angkutan umum yang telah melakukan uji kir pada tahun 2017 sebanyak 766 unit kendaraan dari 867 unit kendaraan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan ujikir di Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2017 sebagaimana Tabel 2.68 di bawah ini.

**Tabel 2.68**  
**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Angkutan Umum	2.901	2.901	940	977	867
2	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	1.465	1.590	788	774	766
3	Jumlah Angkutan yang tidak memiliki KIR	189	155	152	203	101

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2018

#### **10. Komunikasi dan Informatika**

Sarana/prasarana (*teknologi*) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Tegal terdiri dari : akses *internet*, *sistem* informasi, *hotspot*, media informasi dan radio komunikasi. Pada tahun 2017 sejumlah 48 SKPD telah memiliki akses internet. Pada tahun 2017 jumlah SIM yang ada di Kabupaten Tegal meningkat dari tahun 2016 semula 16 buah menjadi 64 SIM pada tahun 2017. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah sarana/prasarana komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2013-2017. Sebagaimana Tabel 2.69 dibawah ini.

**Tabel 2.69**  
**Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana (Teknologi) Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No	Surat Kabar	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah SKPD yang memiliki akses internet	54	54	54	54	48
2	Jumlah sistem informasi yang ada	15	15	16	26	64
3.	Jumlah titik <i>hotspot</i> yang difasilitasi pemda	9	9	9	1	1
4.	Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi	3	3	3	3	3
5.	Jumlah radio komunikasi yang aktif	26	26	26	26	9

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Tahun 2018

## 11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

### a. Persentase Koperasi Aktif dan Sehat

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2017 sebanyak 292 koperasi diharapkan masih dipertahankan, bahkan kalau perlu banyak pengembangan melalui inovasi mengikuti jaman. Sementara itu persentase koperasi sehat terus meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.70 di bawah.

**Tabel 2.70.**  
**Persentase Koperasi Aktif dan Sehat**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah koperasi aktif	277	285	298	312	292
2.	Jumlah koperasi sehat	214	141	216	145	164
3.	Jumlah koperasi tidak aktif	295	330	331	331	152
Jumlah		546	561	572	629	444
Persentase koperasi Aktif		41,76	43,50	48,43	47,38	66,76
Persentase koperasi sehat		32,78	35,47	37,41	34,34	36,26

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal Tahun 2018

### b. Jumlah UKM NonBPR/LKM UKM

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Pada tahun 2017, jumlah UKM di Kabupaten Tegal mencapai 142.412 meningkat dibanding tahun 2016 yang berjumlah 33.530 UKM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.71 di bawah ini.

**Tabel 2.71.**  
**Jumlah UKM Non BPR/LKM**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah seluruh UKM	30.004	29.995	33.520	33.530	142.412
2	UKM formal	486	512	3.941	4.193	5.060
3	UKM non Formal	29.518	29.483	29.579	29.337	137.352

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal Tahun 2018

### c. Jumlah BPR/LKM

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan lembaga keuangan mikro (LKM) merupakan lembaga non perbankan baik koperasi maupun non koperasi yang bergerak di simpan pinjam atau didalamnya adalah unit simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan mikro kecil. BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan

LKM, maka akan semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perkonomiannya. Jumlah BPR dan LKM di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.72 berikut ini.

**Tabel 2.72.**  
**Jumlah BPR/LKM Non Koperasi**  
**di Kabupaten Tegal Tahun 2013- 2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah BPR	13	13	11	11	12
2	Jumlah LKM Non Koperasi	557	572	618	207	6

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal Tahun 2018

## 12. Penanaman Modal

### a. Jumlah *Investor* Berskala Nasional(PMDN/PMA)

Upaya pemerintah Kabupaten Tegal dalam mencari modal dalam negeri dan modal asing agar mau menanamkan modalnya di Kabupaten Tegal sampai tahun 2015 mencapai 4.658 *investor*, yaitu terdiri dari 4.656 *investor* dalam negeri dan 2 *investor* asing. Jika melihat data pada Tabel di bawah, maka ada peningkatan data jumlah *investor* PMDN pada Tahun 2014 di bandingkan Tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya, disebabkan data Tahun 2014 penanaman modal langsung masyarakat yang ijinnya dikeluarkan BP2T terhitung sebagai jumlah *investor* PMDN, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya jumlah *investor* PMDN yang ijinnya dikeluarkan oleh BKPM Pusat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.73 di bawah ini.

**Tabel 2.73**  
**Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No.	Uraian	Jumlah Investor				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	PMDN	3.046	4.656	4.806	3.055	3.060
2.	PMA	1	2	2	2	3
3.	Total	3.047	4.658	4.806	3.057	3.063

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, Tahun 2018

### b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah realisasi proyek PMDN yang berinvestasi di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 796 proyek, dengan jumlah investasi sebesar Rp.566.881.900.000, dan proyek PMA tahun 2017 sebanyak 4 proyek dengan jumlah investasi sebesar Rp.1.243.150.300.000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.74 berikut ini.

**Tabel 2.74.**  
**Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

Tahun	PMDN		PMA	
	Jml Proyek	Nilai Investasi	Jml Proyek	Nilai Investasi
2013	3.046	774.269.500.000	1	40.000.000.000
2014	4.658	642.443.030.153	2	70.000.000.000
2015	4.806	724.380.209.176	2	226.216.300
2016	3.055	765.769.500.000	2	43.000.000.000
2017	3.060	785.775.500.000	3	46.000.000.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, Tahun 2018

### 13. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda. Selanjutnya, banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Pada tahun 2016-2017 jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Tegal sebanyak 31 buah, sedangkan jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Tegal pada tahun 2016-2017 sebanyak 23 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.75 di bawah ini.

**Tabel 2.75.**  
**Jumlah Organisasi Pemuda dan Jumlah Organisasi Olahraga**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	16	20	20	31	31
2.	Jumlah Organisasi/Klub Olahraga	56	56	56	23	23

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2018

### 14. Statistik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan statistik salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Statistik. Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (dokumen statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Salah satu dokumen statistik sebagaimana dimaksud di atas adalah PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel 2.76 berikut ini.

**Tabel 2.76.**  
**Ketersediaan Dokumen Statistik Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No.	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1.	PDRB	√		√		√		√		√	
2.	IPM	√		√		√		√		√	
3.	Suseda		√		√		√		√		√
4.	KDA	√		√		√		√		√	
5.	Indeks Gini Ratio	√		√		√		√		√	
6.	Input Output	√		√		√		√			√
7.	NTP	√		√		√		√		√	
8.	IHK	√		√		√		√		√	

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal tahun 2018



## 15. Kebudayaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja “jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan”. Jumlah grup kesenian di Kabupaten Tegal dari tahun 2013-2017 sebanyak 311 buah, gedung kesenian 1 buah dan jumlah museum dan pusat kebudayaan 9 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.77 di bawah ini.

**Tabel 2.77.**  
**Urusan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No.	Uraian	Kebudayaan				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Group Kesenian	311	311	311	311	311
2.	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Museum dan Pusat Kebudayaan	9	9	10	10	10

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018

## 16. Perpustakaan

Selama kurun waktu 2013-2017, Kabupaten Tegal memiliki 1 perpustakaan daerah milik Pemda dan perpustakaan yang dikelola oleh sekolah mengalami stagnan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dengan jumlah sebanyak 539 unit. Perpustakaan Desa/Kelurahan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 34 menjadi 55 unit pada tahun 2017, begitu juga dengan jumlah perpustakaan tempat ibadah yang mengalami kenaikan dari 7 unit pada tahun 2016 menjadi 16 unit pada tahun 2017. Secara total jumlah perpustakaan mengalami peningkatan, di tahun 2013 sebanyak 580 unit menjadi 611 unit pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.78 di bawah ini.

**Tabel 2.78.**  
**Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Tegal Tahun 2013- 2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Perpustakaan Daerah(milik Pemda)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan Sekolah	539	539	539	539	539
3.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan	34	34	34	34	55
4.	Jumlah Perpustakaan Tempat Ibadah	6	6	6	7	16
3.	Total Perpustakaan (1+2+3+4)	580	580	580	581	616

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, Tahun 2018

## 17. Kearsipan

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/ kejadian/ kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan secara baku. Berdasarkan data dari SKPD pengelola arsip, jumlah SKPD yang memiliki ruang arsip baik pada tahun 2017 sebanyak 48 SKPD, jumlah sarana kearsipan SKPD yang berfungsi baik sebanyak 48 SKPD dan jumlah SKPD yang melakukan digitalisasi sebanyak 18 SKPD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.79 berikut ini.

**Tabel 2.79.**  
**Pengelolaan Arsip secara Baku Kabupaten Tegal Tahun 2015- 2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	54	54	54	54	48
2.	Jumlah SKPD dan Bagian	64	64	64	64	58
3.	Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	84,37	84,37	84,37	100	100

Sumber : Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal Tahun 2018

### 2.1.4.3 Fokus Layanan Pilihan

#### 1. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan laut di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 tercatat sebanyak 1.441.201 kg. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2013-2016). Sedangkan jumlah produksi perikanan di perairan budidaya pada tahun 2017 sebanyak 1.933.115 kg, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Adapun jumlah konsumsi ikan pada tahun 2017 mencapai 20,43 kg/perkapita/tahun. Berikut secara lengkap disajikan data tentang jumlah produksi dan konsumsi ikan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel 2.80 di bawah ini.

**Tabel 2.80.**  
**Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Tegal Pada Tahun 2013-2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perikanan laut					
	- Produksi (kg)	1.003.155	866.234	796.631	1.315.879	1.441.201
	- Nilai (Rp 000)	6.803.889	6.875.228	7.447.623	9.436.612	10.603.486
2.	Perairan Umum					
	- Produksi (kg)	155.010	143.675	189.390	247.810	209.018
	-Nilai (Rp 000)	1.314.155	1.263.695	1.786.754	2.920.102	3.686.047
3.	Perikanan Budidaya					
	- Produksi (kg)	1.349.821	1.255.106	2.059.158	1.874.041	1.933.115
	-Nilai (Rp 000)	21.571.635	21.432.905	36.926.775	40.937.539	75.021.353
	Konsumsi Ikan (kg/kapita/thn)	7,57	16,14	19,46	20,43	20,43

Sumber : Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tegal Tahun 2018

#### 2. Pariwisata

Jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Tegal sejak tahun 2013-2017 sebanyak 37 obyek. Jumlah kunjungan ke-37 obyek wisata tersebut sebanyak 1.053.957 orang pada tahun 2017. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2013-2016). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.81 di bawah ini.

**Tabel 2.81.**  
**Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah obyek wisata(obyek)	37	37	37	37	37
2.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	416.243	597.705	771.697	905.829	1.053.957
	a. Wisatawan Manca Negara	162	123	308	1.721	1.470
	b. Wisatawan Nusantara	416.081	597.582	771.389	904.108	1.052.487
3.	Rata-rata kunjungan per obyek wisata(orang)	11.245	199.235	257.232	301.943	351.319

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2018

### 3. Pertanian

#### a. Kelembagaan SDM Penyuluh Pertanian

Berdasarkan peraturan perundangan baru yang berlaku maka pada tahun 2017 penyuluh pertanian menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penyuluh PNS di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah, dimana pada Tahun 2011 sebanyak 93 orang penyuluh, maka di Tahun 2015 menjadi 88 orang penyuluh. Demikian pula Penyuluh Kehutanan dari PNS, dimana pada Tahun 2011 sebanyak 20 orang penyuluh menjadi 15 orang penyuluh pada Tahun 2015. Adapun penyuluh pertanian relatif tetap. Secara lengkap komposisi jumlah penyuluh sebagaimana Tabel 2.78 berikut ini.

**Tabel 2.82.**  
**Jumlah SDM Penyuluh Kabupaten Tegal Tahun 2011 - 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penyuluh PNS :							
	a. Pertanian	93	89	88	88	88	88	108
	b. Perikanan	6	6	6	6	6	-	-
	c. Kehutanan	20	15	13	15	15	-	-
2.	Penyuluh THL - TBPP	83	82	81	81	81	77	49
3.	Penyuluh Swadaya :							
	a. Pertanian	44	44	44	44	132	-	-
	b. Perikanan	12	11	15	15	11	-	-
	c. Kehutanan	30	30	30	30	30	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>288</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>279</b>	<b>363</b>		

Sumber : DISTANKP, Tahun 2018

#### b. Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan

Produktivitas tanaman pangan seperti padi, palawija sayuran dan buah-buahan relatif stagnan bahkan beberapa cenderung berfluktuatif seperti tanaman padi dari tahun 2010-2014 pergerakannya tidak stabil. Ditahun 2012 produktivitas mencapai 5,94 ton/ha dan mengalami penurunan di tahun 2013 sebanyak 5,76 ton/ha. Sedangkan untuk produktivitas tanaman hias melati pada tahun 2013 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2011-2012. Pada tahun 2014 produktivitas tanaman hias mencapai 25,16 ton/ha sedangkan pada tahun 2011, 2012 masing-masing mencapai 3,50 ton/ha, 3,07 ton/ha. Secara lengkap data mengenai produktivitas padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan perkebunan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2013-2017, dapat dilihat pada Tabel 2.83 berikut ini.

**Tabel 2.83.**  
**Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan Rakyat Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	<b>Padi</b>					
	Luas Tanam (ha)	59.691	64.713	64.819	76.761	64.297
	Luas Panen (ha)	61.575	60.618	62.628	65.499	65.660
	Produksi (ton)	354.538	325.928	382.161	394.023	373.525
	Produktivitas (ton/ha)	5,76	5,38	6,10	6,02	5,69
2.	<b>Jagung</b>					
	Luas Tanam (ha)	16.038	17.650	0/S	12.799	10.028
	Luas Panen (ha)	15.384	15.423	16.141	15.699	7.982
	Produksi (ton)	114.344	100.731	121.994	118.288	45.069
	Produktivitas (ton/ha)	7,43	6,53	7,55	7,53	5,65

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
3.	<b>Kedelai</b>					
	Luas Tanam (ha)	43	35	92	68	151
	Luas Panen (ha)	43	31	90	60	104
	Produksi (ton)	59	49	166	108	154
	Produktivitas (ton/ha)	1,35	1,58	1,86	1,81	1,48
4.	<b>Ketela Pohon</b>					
	Luas Tanam (ha)	572	480	387	292	286
	Luas Panen (ha)	564	501	501	287	259
	Produksi (ton)	9.975	9.131	9.122	6.710	5.928
	Produktivitas (ton/ha)	17,68	18,24	18,22	23,35	22,89
5.	<b>Ketela Rambat</b>					
	Luas Tanam (ha)	177	177	83	50	38
	Luas Panen (ha)	168	168	95	55	35
	Produksi (ton)	1.744	1.744	933	637	346
	Produktivitas (ton/ha)	10,40	10,40	10,51	11,56	9,89
6.	<b>Kacang Tanah</b>					
	Luas Tanam (ha)	290	191	199	126	66
	Luas Panen (ha)	290	187	197	135	75
	Produksi (ton)	564	354	494	363	90
	Produktivitas (ton/ha)	1,94	1,89	2,51	2,69	1,20
7.	<b>Kacang Hijau</b>					
	Luas Tanam (ha)	33	159	55	11	9
	Luas Panen (ha)	8	142	58	14	0
	Produksi (ton)	7	167	60	16	0
	Produktivitas (ton/ha)	0,96	1,17	1,04	1,20	0
	<b>Sayuran dan Buah Semusim</b>					
1.	<b>Bawang Merah</b>					
	Luas Tanam (ha)	2.548	2.272	1.783	1.926	2.414
	Luas Panen (ha)	2.060	2.518	2.091	1.884	2.323
	Produksi (ton)	243.412	284.775	212.204	19.828	248.276
	Produktivitas (ton/ha)	11,82	11,31	10,15	10,52	106,86
2.	<b>Cabe</b>					
	Luas Tanam (ha)	539	484	303	327	360
	Luas Panen (ha)	536	543	353	328	397
	Produksi (ton)	4.628	3.994	3.130	3.581	38.705
	Produktivitas (ton/ha)	8,63	7,35	8,87	10,92	97,49
3.	<b>Kentang</b>					
	Luas Tanam (ha)	485	406	418	459	409
	Luas Panen (ha)	418	481	348	548	406
	Produksi (ton)	4.256	4.723	3.761	11.866	87.160
	Produktivitas (ton/ha)	10,18	9,83	10,81	21,65	214,68
4.	<b>Kubis</b>					
	Luas Tanam (ha)	1.214	1.280	1.179	1.162	1.090
	Luas Panen (ha)	1.190	1.280	1.276	1.202	1.108
	Produksi (ton)	17.545	17.445	21.313	22.619	197.015
	Produktivitas (ton/ha)	14,74	13,63	16,70	18,82	177,81
5.	<b>Semangka</b>					
	Luas Tanam (ha)	130	111	109	123	72
	Luas Panen (ha)	127	114	109	123	72
	Produksi (ton)	2.134	1.405	1.389	1.689	7.185
	Produktivitas (ton/ha)	16,80	12,32	12,74	13,73	99,79
	<b>Tanaman Hias</b>					
1.	<b>Melati</b>					
	Luas Tanam (ha)	2	13	1	-	10.000

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Luas Panen (ha)	371	338	337	341	3.419,250
	Produksi (ton)	9.542	8.505	5.807	4.796	5.263,728
	Produktivitas (ton/ha)	25,70	25,17	17,23	14,07	1,54
	<b>Perkebunan Rakyat</b>					
1.	<b>Kelapa Dalam</b>					
	Luas Tanam (ha)	4.575	4.286	4.186	3.665	3.370,66
	Luas Panen (ha)	2.399	2.383	2.283	2.123	2.027,40
	Produksi (ton)	1.774	2.257	2.155	1.887	1.807,94
	Produktivitas (ton/ha)	0,74	0,95	0,94	0,89	891,75
2.	<b>Cengkeh</b>					
	Luas Tanam (ha)	1.065	1.220	1.282	1.325	1.323,48
	Luas Panen (ha)	690	662	768	765	764,17
	Produksi (ton)	103	122	85	140	140,31
	Produktivitas (ton/ha)	0,15	0,18	0,11	0,18	183,61
3.	<b>Teh</b>					
	Luas Tanam (ha)	158	171	163	163	164,73
	Luas Panen (ha)	121	122	121	129	128,43
	Produksi (ton)	36	24	35	35	35,06
	Produktivitas (ton/ha)	0,30	0,20	0,29	0,27	273,02
4.	<b>Tebu</b>					
	Luas Tanam (ha)	5.130	5.458	3.548	3.265	2.687,30
	Luas Panen (ha)	5.130	5.458	3.548	3.265	2.669,18
	Produksi (ton)	19.713	18.997	15.872	14.299	30.912,06
	Produktivitas (ton/ha)	3,84	3,48	4,47	4,38	11,58

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2018

### c. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Sektor pertanian Kabupaten Tegal memiliki peluang besar untuk dapat lebih berkembang dari kondisi eksisting saat ini, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal. Pada tahun 2017 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku mencapai 12,50% dan berdasar harga konstan mencapai 11,88% seperti dapat dilihat pada Tabel 2.82. Selain merupakan kontributor ketiga terbesar dalam perekonomian wilayah, angka di atas menunjukkan bahwa inflasi di sektor pertanian relatif lebih rendah dari pada inflasi pada sektor lainnya. Sayangnya, kontribusi sektor pertanian menunjukkan tren yang semakin menurun. Hal ini perlu mendapat perhatian karena banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor ini. Sebagaimana Tabel 2.80 di bawah ini.

**Tabel 2.84.**  
**Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2013-2017**

No	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian:					
	- ADH Berlaku	3.468.079,63	3.565.019,14	3.879.322,43	4.114.690,91	3.755.551,54
	- ADH Konstan	2.878.663,32	2.755.341,24	2.832.654,60	2.935.344,86	2.657.779,26
2.	Jumlah PDRB:					
	- ADH Berlaku	20.767.110,98	23.108.651,43	25.590.642,44	27.727.792,98	30.044.412,28
	- ADH Konstan	18.050.291,97	18.958.841,04	19.992.675,45	21.265.717,23	21.265.717,23
3.	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB					

No	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2013	2014	2015	2016	2017*
	- ADH Berlaku	16,70	15,43	15,16	14,84	12,50
	- ADH Konstan	15,95	14,53	14,17	13,80	11,88

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

\*Angka Sementara berdasar penghitungan Bappeda dan Litbang

#### d. Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu

Pada tahun 2017 jumlah produksi daging mencapai 9.784.502 kg, adapun jumlah konsumsi daging mencapai 4.69 kg/kapita/tahun. Jumlah produksi tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016, di mana produksi daging mencapai 9.675.621 kg dan konsumsi daging 4.69 kg/kapita/tahun, peningkatan jumlah konsumsi tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Tegal. Konsumsi telur di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 mencapai 4,80 kg/kapita/tahun, dengan jumlah produksi sebanyak 10.249.993 kg. Jumlah konsumsi susu di kabupaten Tegal tahun 2017 mencapai 0.43 kg/kapita/tahun. konsumsi daging, telur dan susu di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.85 di bawah ini.

**Tabel 2.85.**  
**Jumlah Produksi dan Konsumsi daging, telur dan susu**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2013- 2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Daging :					
	Produksi (kg)	4.277.163	6.256.165	6.809.218	9.675.621	9.784.502
	Konsumsi (kg/kapita/th)	4,04	4,73	4,61	4,69	4,69
2.	Telur					
	Produksi (kg)	10.426.944	10.573.686	10.861.860	10.203.264	10.249.993
	Konsumsi (kg/kapita/th)	3,12	4,15	4,71	4,80	4,80
3.	Susu					
	Produksi (kg)	623.002	533.563	633.323	713.192	713.428
	Konsumsi (kg/kapita/th)	0,47	0,38	0,42	0,43	0,43

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal Tahun 2018

#### e. Persentase Hutan dan Lahan Kritis dalam hutan yang Direhabilitasi

Luas kawasan hutan di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 mencapai 23.881ha. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 seluas 20.788 ha, mengalami peningkatan. Sedangkan luas lahan kritis tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015 yaitu 2.033 sebagaimana dapat dilihat Tabel 2.86 di bawah ini.

**Tabel 2.86.**  
**Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dalam hutan**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Luas Hutan (Ha)	21.074	21.074	20.788	20.788	23.881
2.	Luas Lahan Kritis dalam hutan (Ha)	2.328	1.222	1.541	1.541	2.033
	Presentase Lahan Kritis dalam hutan	11,04	5,80	7,42	7,42	8,51

Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Tegal, 2017

#### f. Indeks Tutupan Lahan

Berdasarkan data Executive Summary IKPLHD Kabupaten Tegal bahwa Indeks Tutupan Lahan di Kabupaten Tegal Tahun 2017 sebesar 66,88 dibandingkan Indeks Tutupan Lahan (ITL) Tahun 2016 yang sebesar 64,54. Berdasarkan Hasil Pengukuran Kerusakan Lahan di kecamatan Margasari yang dikaji pada Tahun 2017 maka keseluruhan hasil lokasi sampling dinyatakan pada status Rusak Ringan. Pemerintah kabupaten Tegal dalam rangka meningkatkan Indeks Tutupan Lahan (ITL) telah menetapkan target capaian ITL untuk peningkatan tutupan lahan dilakukan melalui reboisasi. Untuk menekan laju lahan kritis, DLH Kabupaten Tegal bersama beberapa OPD dan elemen masyarakat Kabupaten Tegal telah merehabilitasi luasan lahan kritis dikawasan hutan.

#### g. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Sektor kehutanan merupakan bagian dari sektor pertanian. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Tegal pada tahun 2014 berdasar harga berlaku adalah sebesar 0,56%, dan berdasar harga konstan adalah 0,58% seperti dapat dilihat pada Tabel 2.83. Sektor kehutanan relatif memberikan kontribusi yang relatif kecil pada perekonomian wilayah, dan bukan merupakan sektor basis di Kabupaten Tegal. Fokus pengembangan sektor kehutanan ini idealnya adalah menetapkan bagian kawasan hutan sebagai kawasan lindung, sedangkan kawasan hutan di luar kawasan lindung dapat dimanfaatkan dengan mengacu pada keseimbangan ekosistem sebagai pertimbangan utamanya, demi mencapai keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tegal. Sebagaimana Tabel 2.87 di bawah ini.

**Tabel 2.87.**  
**Kontribusi Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kontribusi Sektor Kehutanan:					
	- ADH Berlaku	114.464,32	133.060,82	146.051,94	159.150,70	172.526,8383
	- ADH Konstan	105.176,83	102.814,91	101.650,07	101.060,61	102.965,21
2.	Jumlah PDRB:					
	- ADH Berlaku	18.761.760,13	20.767.110,98	23.108.651,43	25.590.642,44	27.727.792,98
	- ADH Konstan	16.912.249,74	18.050.291,97	18.958.841,04	19.992.675,45	21.265.717,23
3.	Persentase Kontribusi Sektor Kehutanan thd PDRB					
	- ADH Berlaku	0,62	0,62	0,61	0,61	0,58
	- ADH Konstan	0,62	0,57	0,54	0,51	0,48

Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2017

### 4. Energi dan Sumberdaya Mineral

#### a. Energi

Beberapa potensi energi di Kabupaten Tegal yang dapat dimanfaatkan antara lain energi panas bumi (*geothermal*), energi Mikrohidro, energi Biogas, energi matahari (surya) dan energi bahan bakar nabati (limbah organik)

## b. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

Pada tahun 2017 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku mencapai 4,55% dan berdasarkan harga konstan adalah sebesar 23,87%, seperti dapat dilihat pada Tabel 2.85. Secara umum, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini perlu mendapat perhatian karena pengembangan sektor ini cenderung akan merusak lingkungan hidup. Selain itu, proses yang hanya ekstraktif akan memberikan nilai tambah yang relatif kecil pada perekonomian. Kabupaten Tegal seharusnya tidak memprioritaskan pengembangan sektor pertambangan dan penggalian untuk menggenjot ekonomi wilayah. Sebagaimana Tabel 2.88 berikut ini.

**Tabel 2.88.**  
**Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2013- 2017**

No.	Uraian	dalam Jutaan Rupiah				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian :					
	- ADH Berlaku	794.613,80	965.944,03	1.138.617,76	1.253.014,46	1.367.020,76
	- ADH Konstan	733.207,60	778.437,77	794.797,71	848.474,09	848.474,09
2.	Jumlah PDRB :					
	- ADH Berlaku	20.767.110,98	23.108.651,43	25.590.642,44	27.727.792,98	30.044.412,28
	- ADH Konstan	18.050.291,97	18.958.841,04	19.992.675,45	21.265.717,23	21.265.717,23
3.	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian thd PDRB					
	- ADH Berlaku	3,83	4,18	4,45	4,52	4,55
	- ADH Konstan	4,06	4,11	3,98	3,99	3,87

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

\*Angka Sementara berdasar penghitungan Bappeda dan Litbang

## c. Kegeologian

Kondisi wilayah Kabupaten Tegal yang terdiri dari pegunungan, dataran tinggi maupun dataran rendah. Untuk dataran rendah Kabupaten Tegal sepanjang Pantura Pulau Jawa, sedangkan dataran tinggi berada di bagian Selatan Kabupaten Tegal yang didominasi oleh pegunungan yang menghubungkan dengan wilayah lain disekitarnya. Potensi bencana yang timbul akibat morfologi wilayah antara lain banjir didaerah pantura dan tanah longsor terutama untuk kawasan dataran tinggi. Beberapa wilayah di Kabupaten Tegal yang rawan bencana geologi terdapat di wilayah Kabupaten Tegal bagian Selatan yaitu rawan terhadap bencana alam gunung api akibat aktivitas Gunung Slamet yang ada di wilayah kecamatan Bojong dan Bumijawa. Namun demikian, penanganan kejadian bencana telah dilakukan dengan upaya mitigasi dan sosialisasi kepada warga yang terkena dampak untuk menghindari kerugian jiwa maupun material. Penanganan bencana alam telah dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun instansi di Kabupaten Tegal.

## d. Sumberdaya Air Tanah

Sumber daya air tanah di Kabupaten Tegal sebagian besar berasal dari sumber mata air yang sebagian besar berasal dari sumber air di wilayah Kabupaten Tegal bagian Selatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tegal 2012-2032, Luas keseluruhan mata air yang ada di Kabupaten Tegal mencapai 315 ha yang tersebar di 35 sumber mata air.



## 5. Perdagangan

### a. Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 mencapai Rp173.836.380.139,43. Nilai ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2013-2017 sebagaimana Tabel 2.89 di bawah.

**Tabel 2.89.**  
**Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Tegal Tahun 2013- 2017**

No.	Uraian	(Dalam Ribuan)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Nilai Ekspor	111.280.610	147.007.019	153.188.157.270	209.619.490.505	228.638.224.198
2.	Nilai Impor	21.239.567	20.782.118	64.630.930.460	16.312.612.489	54.801.884.058
3.	Nilai Ekspor Bersih (Nilai Ekspor - Nilai Impor)	90.041.043	126.224.901	88.557.226.810	193.306.878.015	173.836.380.139

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal Tahun 2018

### b. Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB

Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua. Pada tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan mencapai 15,73% dan atas dasar harga konstan adalah sebesar 29,13%. Perbedaan kontribusi ini menunjukkan bahwa sektor ini relatif mengalami inflasi yang cukup tinggi. Sebagai sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian dan dengan tren yang stabil meningkat, maka sektor perdagangan selainya menjadi sektor utama yang dikembangkan. Ditopang dengan lokasi Kabupaten Tegal yang strategis, perkembangan kota kecamatan yang cukup pesat, dan kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan yang signifikan, maka pada dasarnya sektor perdagangan dapat berkembang tanpa adanya campur tangan pemerintah secara masif. Tugas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengembangan sektor ini adalah menerapkan regulasi yang menjamin keadilan dalam berusaha, serta menyediakan infrastruktur pendukung sektor perdagangan yang dapat diakses oleh semua orang. Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.90 berikut ini.

**Tabel 2.90.**  
**Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No.	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) :					
	- ADH Berlaku	1.557.777,7	1.757.421,4	1.935.916,0	2.101.862,5	4.725.986,0
	- ADH Konstan	1.418.500,5	1.482.494,9	1.564.698,2	1.648.467,4	3.872.572,3
2.	Jumlah PDRB :					
	- ADH Berlaku	20.767.110,9 8	23.108.651,4 3	25.590.642,4 4	27.727.792,9 8	30.044.412,2 8
	- ADH Konstan	18.050.291,97	18.958.841,04	19.992.675,45	21.265.717,23	21.265.717,23

No.	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2013	2014	2015	2016	2017*
3.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) thd PDRB					
	- ADH berlaku	16,49	15,96	15,63	15,42	15,73
	- ADH Konstan	17,55	17,57	17,35	17,16	17,31

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2017

\*Angka Sementara berdasar penghitungan Bappeda dan Litbang

## 7. Perindustrian

### a. Pertumbuhan Industri

Kecenderungan membaiknya perekonomian nasional dan regional merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Sektor industri di Kabupaten Tegal mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Tegal, terutama industri olahan. Total jumlah industri di Kabupaten Tegal meningkat, yaitu dari 29.636 industri pada Tahun 2016 menjadi 29.697 industri pada Tahun 2017. Ada peningkatan yang terjadi pada industri kecil, di mana pada tahun 2016 berjumlah sebanyak 29.563 industri, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 29.624 industri.

Namun demikian ada kenaikan jumlah industri menengah, dimana pada Tahun 2015 sebanyak 48 industri, maka pada Tahun 2016 dan 2017 naik menjadi 60 industri. Apabila dilihat dari Tabel pertumbuhan industri, mengalami kenaikan setiap tahunnya pada industri kecil dari tahun 2012 sampai tahun 2017 dengan kenaikan yang signifikan yaitu sebanyak 603 industri kecil. Pada industri menengah mengalami fluktuasi jumlah industri dengan pertumbuhan sebanyak 12 industri, sedangkan industri besar naik sebanyak 13 industri. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.91 di bawah ini.

**Tabel 2.91.**  
**Total Pertumbuhan Industri Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Industri Besar	9	8	10	13	13
2	Industri Menengah	127	48	48	60	60
3	Industri Kecil	29.110	29.194	29.566	29.563	29.624
Jumlah total industri		29.168	29.246	29.624	29.636	29.697

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2018

### b. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

Sektor industri di Kabupaten Tegal didominasi oleh industri makanan, tekstil dan mesin. Industri makanan terutama didorong oleh adanya pabrik teh yang berskala nasional, serta industri kecil dan menengah yang memproduksi makanan ringan serta tempe dan tahu. Industri tekstil didorong dengan adanya usaha konfeksi yang relatif maju dan sudah dapat menembus pasar daerah lain.

Sementara, industri mesin merupakan industri yang sudah ada sejak lama; sesuai dengan julukan Kabupaten Tegal sebagai Jepang-nya Indonesia. Industri mesin ini didukung dengan adanya UPT LIK Takaru di Kecamatan Kramat yang merupakan sumber difusi inovasi bagi pengembangan usaha produksi mesin. Sektor perindustrian di Kabupaten Tegal berkontribusi paling besar terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Tegal. Pada tahun 2016 persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku mencapai 33,43% dan berdasarkan harga konstan mencapai 31,99%. Sebagaimana Tabel 2.92 dibawah ini.

**Tabel 2.92.**  
**Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap**  
**PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2013- 2017**

No	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan :					
	- ADH Berlaku	6.556.993,43	7.561.988,77	8.496.555,92	9.269.703,44	10.431.419,94
	- ADH Konstan	5.475.267,74	5.920.278,60	6.314.825,65	6.802.682,83	6.802.682,83
2.	<b>Jumlah PDRB :</b>					
	- ADH Berlaku	20.767.110,98	23.108.651,43	25.590.642,44	27.727.792,98	30.044.412,28
	- ADH Konstan	18.050.291,97	18.958.841,04	19.992.675,45	21.265.717,23	21.265.717,23
3.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan thd PDRB					
	- ADH Berlaku	31,57	32,72	33,20	33,43	34,72
	- ADH Konstan	30,33	31,23	31,59	31,99	32,69

Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2017

\*Angka Sementara berdasar penghitungan Bappeda dan Litbang

## 8. Transmigrasi

Transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Dengan kata lain, transmigrasi bertujuan untuk meratakan penyebaran jumlah penduduk/tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya. Transmigrasi dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa dan transmigrasi bedol desa. Transmigrasi swakarsa merupakan salah satu transmigrasi yang dikembangkan di Kabupaten Tegal. Adapun jumlah transmigran yang diberangkatkan selama Tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel 2.93 di bawah ini :

**Tabel 2.93.**  
**Jumlah Transmigran Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Transmigran Umum	42	13	23	29	59
2	Transmigran Swakarsa	0	0	0	0	0
3	Transmigran bedol Desa	0	0	0	0	0
4	Animo Transmigran	31	58	15	10	63 (4)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2017

Pada tahun 2011 dan 2012 terdapat 4 (empat) Kabupaten di Kalimantan Barat yang dijajaki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai darah tujuan transmigrasi, yaitu: Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Kurubaya.

### 2.1.4.3 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 1. Perencanaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja ketersediaan dokumen perencanaan. Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Seluruh dokumen perencanaan tersebut telah tersedia pada periode tahun 2012-2017. Berikut adalah data mengenai ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2012-2017 sebagaimana Tabel 2.94 di bawah ini.

**Tabel 2.94.**  
**Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2017**

No.	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1.	Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	√		√		√		√		√		√	
2.	Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	√		√		√		√		√		√	
3.	Dokumen Renstra SKPD yang telah disahkandengan Keputusan Kepala Daerah	√		√		√		√		√		√	
4.	Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	√		√		√		√		√		√	
5.	Dokumen Renja SKPD yang telah disahkandengan Keputusan Kepala Daerah	√		√		√		√		√		√	

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2017

## 2. Keuangan

### a. Administrasi Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Tegal masih berupaya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Tegal belum terlalu baik.

### b. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset daerah, secara periodik dilakukan evaluasi manajemen pengelolaan aset sehingga keberadaan aset Kabupaten Tegal dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD secara signifikan. Upaya-upaya yang ditempuh antara lain melalui pendataan aset, melalui sertifikasi, pemasangan label dan patok batas tanah; inventarisasi dan identifikasi nilai aset serta validasi neraca aset; serta penyelesaian kasus/sengketa.

## 3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

### a. Diklat Aparatur Pemerintah Kabupaten Tegal

Penataan sistem manajemen SDM aparatur dilaksanakan melalui diklat aparatur. Pelaksanaan diklat aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2013-2017 adalah sebagaimana Tabel 2.95 di bawah ini.

**Tabel 2.95.**  
**Jumlah Peserta Diklat Aparatur Pemerintah Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2013 - 2017**

No.	Diklat	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Teknis	45	9	223	324	155
2.	Fungsional	15	9	28	50	59
3.	Kepemimpinan	40	54	24	32	51

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah 2018

#### 4. Penelitian dan Pengembangan

Guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mengedepankan proses kelitbangan dan IPTEK, pengembangan dan penerapannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

#### 5. Fungsi Lainnya

##### a. Pengawasan

Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kabupaten Tegal telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.96 di bawah ini.

**Tabel 2.96.**  
**Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum**  
**di Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1.</b>	<b>Penegakan Perda</b>					
	a. Jumlah Pelanggaran Perda	459	528	637	293	503
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	390	451	510	192	371
	c. Persentase Penyelesaian Penegakan Perda	84,97	85,41	80,06	65,53	73,76
<b>2.</b>	<b>Penegakan K3</b>					
	a. Jumlah Pelanggaran K3	338	294	204	597	1.756
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	133	254	233	180	1.688
	c. Persentase Penyelesaian Penegakan K3 (%)	59,91	75,15	79,25	88,23	96,13

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2018

#### 2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

### 2.1.5.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

#### a. Komposisi Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga dan Persentase Rumah Tangga menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan.

Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah. Semakin kecil persentase pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Pengeluaran makanan dan bukan makanan selama ini menggunakan data hasil Susenas, dan digunakan sebagai salah satu komponen dalam penghitungan indeks PPP. Sebagaimana Tabel 2.97 dibawah ini.

**Tabel 2.97.**  
**Rata-rata Pengeluaran (Rupiah/kapita/bulan)**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2016**

Jenis Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Makanan</b>	280.568	274.535	310.000	340.313	377.317
<b>Non Makanan</b>	211.828	207.863	225.860	281.668	346.922

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

Pola pengeluaran rumah tangga Kabupaten Tegal per kapita per bulan menarik untuk dianalisa. Seperti tahun sebelumnya, tahun 2013 sebagian besar rumah tangga berada pada tingkat pengeluaran per kapita per bulan  $\geq$ Rp300.000,00 yaitu sebesar 66,16% kemudian disusul golongan pengeluaran Rp200.000,00 - Rp299.999,00 yaitu sebesar 27,29%. Dari Tabel diatas dapat dilihat tidak ada rumah tangga pada dua golongan pengeluaran terkecil. Ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk yang cukup baik. Selain itu juga dapat dilihat adanya pergeseran tingkat pengeluaran dari tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa semakin meningkatnya daya beli penduduk.

Apabila dilihat dari sisi pengeluaran per kapita per bulan setiap rumah tangga di Kabupaten Tegal terjadi pergeseran pola pengeluaran. Pengeluaran makanan menunjukkan adanya penurunan sebaliknya pengeluaran untuk nonmakanan cenderung mengalami peningkatan. Struktur perekonomian dengan pola pengeluaran per kapita per bulan pada rumah tangga di Kabupaten Tegal pengeluaran untuk makanan cenderung lebih besar daripada pengeluaran untuk non makanan. Dari Tabel di bawah dapat dilihat bahwa pengeluaran perkapita per bulan Kabupaten Tegal cenderung lebih besar untuk makanan yaitu 52,10% dan sisanya 47,90% pengeluaran untuk non makanan. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Tegal masih digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Sebagaimana Tabel 2.98 di bawah ini.

**Tabel 2.98.**  
**Persentase Jenis Pengeluaran Per Kapita per Bulan**  
**di Kabupaten Tegal Tahun 2012- 2016**

Jenis Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
1. Makanan	56,98	56,91	57,85	54,71	52,10
2. Non Makanan	43,02	43,09	42,15	45,29	47,90

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

#### b. Nilai Tukar Petani (NTP)

Hasil-hasil yang telah dicapai pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Tegal, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan petaninya diketahui melalui Nilai Tular Petani (NTP). NTP merupakan hubungan antara hasil pertanian yang dijual petani dengan barang jasa lain yang dibeli petani.

Mulai bulan Januari 2016 penghitungan nilai tukar petani menggunakan diagram timbang baru, yaitu diagram timbang tahun 2012 yang merupakan hasil Survei penyempurnaan Diagram Timbang 2010. Dari tabel dibawah dapat dilihat Indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan dari 140,85 pada tahun 2016 menjadi 150,11 pada tahun 2017, artinya harga di tingkat produsen atas hasil produksi petani untuk sektor pertanian mengalami kenaikan 6,57%. Indeks harga yang dibayar petani juga mengalami kenaikan dari 137,13 pada tahun 2016 menjadi 142,95 pada tahun 2017, artinya harga eceran barang dan jasa yang dibeli petani untuk memenuhi konsumsi rumah tangga maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal mengalami kenaikan sebesar 4,24%. Secara umum Nilai Tukar Petani di Kabupaten Tegal mengalami kenaikan dari 102,72 pada tahun 2016 menjadi 105,01 pada tahun 2017 sebagaimana Tabel 2.99 di bawah

**Tabel 2.99.**  
**Nilai Indeks Variabel NTP Gabungan Tahun 2013-2017**  
**Kabupaten Tegal**

VARIABEL		2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Harga yang Diterima Petani	184,65	167,18	202,84	140,85	150,11
2	Indeks Harga yang Dibayar Petani	171,33	134,15	139,78	137,13	142,95
3	<b>Nilai Tukar Petani</b>	<b>107,78</b>	<b>124,62</b>	<b>145,11</b>	<b>102,72</b>	<b>105,01</b>

Sumber : Bapeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2017

#### c. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan). Rasio panjang jalan Kabupaten Tegal per jumlah kendaraan dapat dilihat pada Tabel 2.100 dibawah ini.

**Tabel 2.100.**  
**Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Panjang Jalan (km)	886,82	886,82	886,82	847,27	847,27
2.	Jumlah Kendaraan (unit)	134.581	134.516	135.	143.773	143.906
3.	Rasio	65,89	65,92	67	58,93	58,88

Sumber: BPS Kabupaten Tegal , 2017

#### d. Sumber Daya Manusia

Tingkat ketergantungan penduduk atau Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong maju atau sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang menunjukkan jumlah kelompok usia non produktif (0-15 tahun dan di atas 65 tahun) yang ditanggung oleh kelompok usia produktif (diatas 15-65 tahun). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi bebanyang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan

persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2012-2016 sebagaimana Tabel 2.101 di bawah ini.

**Tabel 2.101.**  
**Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Penduduk Produktif	933.282	974.966	938.298	929.207	945.509
2.	Penduduk Non Produktif	507.101	440.043	481.834	495.683	483.877
3.	Rasio Ketergantungan	54,33	45,13	51,35	53,34	51,18

Sumber BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017









## 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 DAN REALISASI RPJMD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014-2019

### 2.2.1 FOKUS URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR




#### 1. URUSAN PENDIDIKAN

Pelaksanaan Urusan Pendidikan diintervensi melalui 7 program untuk mencapai 56 indikator kinerja. Urusan Pendidikan kesemuanya dilaksanakan oleh Dikbud. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pendidikan pada tahun 2017.

**Tabel 2.102.**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Pendidikan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>						
1	APK PAUD/TK (4-6 th)	80	70.00	69.42	99.17	Dikbud	
2	APK PAUD/KB (0-4 th)	75	68.00	34.22	50.32	Dikbud	
3	APM PAUD TK	66,02	62.02	25.34	40.86	Dikbud	
4	Persentase PAUD terakreditasi	30	19.00	29.82	156.95	Dikbud	
<b>2</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>						
1	APK SD/SDLB/MI/Paket A	113	112.00	111.52	99.57	Dikbud	
2	APM SD/SDLB/MI/Paket A	99	98.93	101.01	102.10	Dikbud	
3	APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	99	97.28	115.51	118.74	Dikbud	
4	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	93,49	91.65	96.23	105.00	Dikbud	



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
5	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	0,13	0.17	0.03	17.65	Dikbud	
6	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	0,50	0.56	0.03	5.36	Dikbud	
7	Angka Kelulusan SD/SDLB/MI/Paket A	99,99	99.99	100.00	100.01	Dikbud	
8	Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs/Paket B	99,99	99.99	99.97	99.98	Dikbud	
9	Nilai rata-rata UN SD/MI/SDLB/Paket A	22,71	21.81	0.00	0.00	Dikbud	
10	Nilai rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs/Paket B	23,74	23.14	49.45	213.70	Dikbud	
11	Persentase Ruang Kelas SD/MI sesuai SPM	93,54	91.70	80.56	87.85	Dikbud	
12	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs sesuai SPM	85,13	83.45	94.39	113.11	Dikbud	
13	Persentase Perpustakaan SD/MI sesuai SPM	33,82	32.82	60.80	185.25	Dikbud	
14	Persentase Perpustakaan SMP/MTs sesuai SPM	50	48.00	84.26	175.54	Dikbud	
15	Persentase SD/MI memiliki sanitasi layak	56	46.00	67.59	146.93	Dikbud	
16	Tersedianya Lab IPA SMP/MTs	27	6.00	80.56	1342.67	Dikbud	
17	Tersedianya Peralatan Lab IPA SMP/MTs	24	5.00	74.07	1481.40	Dikbud	
18	Persentase SMP/MTs memiliki sanitasi layak	56	46.00	75.71	164.59	Dikbud	
19	Persentase SD/MI melaksanakan Kurikulum 2013	45	30.00	58.37	194.57	Dikbud	
20	Persentase SMP/MTs melaksanakan Kurikulum 2013	21,2	15.20	18.52	121.84	Dikbud	
<b>3</b>	<b>Program Pendidikan Menengah</b>						
1	APK SMA/SMALB/MA/Paket C	64,85	62.85	87.23	138.79	Dikbud	
2	APM SMA/SMALB/MA/Paket C	62,04	58.04	66.68	114.89	Dikbud	
3	Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/Paket C	0,40	0.44	0.02	4.55	Dikbud	
4	Angka Kelulusan SMA/SMALB/MA/Paket C	99,99	99.99	99.95	99.96	Dikbud	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
5	Nilai rata-rata UN SMA/SMALB/MA/Paket C	39,49	38.39	55.45	144.44	Dikbud	★
6	Persentase Ruang Kelas SMA/SMALB/MA sesuai SPM	88,28	86.55	0	N/A	N/A	N/A
7	Persentase Perpustakaan SMA/SMALB/MA sesuai SPM	32,5	31.50	0	N/A	N/A	N/A
8	Persentase SMA/SMALB/MA/Paket C memiliki sanitasi layak	22,5	15.50	0	N/A	N/A	N/A
9	Persentase SMA/SMALB/MA/Paket C melaksanakan Kurikulum 2013	30	20.00	0	N/A	N/A	N/A
<b>4</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>						
1	Angka Kelulusan Paket A	99,99	98.00	95.92	97.88	Dikbud	★
2	Angka Kelulusan Paket B	99,99	99.99	96.72	96.73	Dikbud	★
3	Angka Kelulusan Paket C	99,99	99.99	98.64	98.65	Dikbud	★
4	Persentase LKP kinerja A dan B	10	6.00	16.00	266.67	Dikbud	★
5	Persentase Buta Aksara > 15 tahun	2,50	3.50	1.29	36.86	Dikbud	↓
6	Persentase Kecamatan memiliki PKBM	100	100.00	100.00	100.00	Dikbud	★
<b>5</b>	<b>Program Pendidikan Luar Biasa</b>						
1	Angka kelulusan SDLB	99,99	99.99	100.00	100.01	Dikbud	★
2	Angka kelulusan SMPLB	99,99	99.99	100.00	100.01	Dikbud	★
3	Angka kelulusan SMALB	99,99	99.99	100.00	100.01	Dikbud	★
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>						
1	Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/DIV	35	34.96	50.79	145.28	Dikbud	★
2	Persentase Pendidik SD/SDLB/MI/Paket A berkualifikasi S1/DIV	85	79.50	94.35	118.68	Dikbud	★
3	Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs/Paket B berkualifikasi S1/DIV	100	100.00	94.72	94.72	Dikbud	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
4	Persentase Pendidik SMA/SMALB/MA/Paket C berkualifikasi S1/DIV	100	100.00	0	N/A	N/A	N/A
5	Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik	26	21.00	24.13	114.90	Dikbud	★
6	Persentase Pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik	84,5	83.50	55.99	67.05	Dikbud	➡
7	Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs bersertifikat pendidik	81,5	80.50	60.37	74.99	Dikbud	➡
8	Persentase Pendidik SMA/SMALB/MA bersertifikat pendidik	89,7	87.70	0	N/A	N/A	N/A
<b>7</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>						
1	Persentase SD/SDLB/MI yang terakreditasi	12	80.00	98.57	123.21	Dikbud	★
2	Persentase SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi	25,5	17.20	87.96	511.40	Dikbud	★
3	Persentase SMA/SMALB/MA yang terakreditasi	13,8	9.20	0	N/A	N/A	N/A
4	Persentase SD/SDLB/MI yang melaksanakan MBS dengan baik	79,5	77.50	98.57	127.19	Dikbud	★
5	Persentase SMP/SMPLB/MTs yang melaksanakan MBS dengan baik	76	74.00	87.96	118.86	Dikbud	★
6	Persentase SMA/SMALB/MA yang melaksanakan MBS dengan baik	70,5	68.50	0	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dikbud, 2017. ★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah

Dari target kinerja Program PAUD yang ada, Indikator PAUD yang terakreditasi yaitu 70% dari target 69,49%. Kriteria indikator ini Sangat Tinggi (tercapai 99,97%). Sementara indikator-indikator lain seperti APK PAUD/TK (4-6 tahun) status kinerjanya masih Sangat Tinggi (tercapai 99,97%), yaitu terealisasi 69,49% dari target 70%. Hal ini disebabkan oleh data dasar tentang penduduk usia yang tidak relevan dengan tahun berjalan; motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak di usia 0-4 Tahun masih kurang; sarana dan prasarana PAUD yang kurang memadai. Untuk mengurai hal tersebut dibutuhkan data dasar penduduk usia yang valid setiap tahunnya; pengadaan sarana dan prasarana PAUD serta dukungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung langkah Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Untuk APK SD/SDLB/MI/Paket A realisasi kinerja di tahun 2017 sebesar 111,52% dari target 112%. Kriteria indikator ini juga Sangat Tinggi (tercapai 99,57%). Sementara APK dan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B telah terealisasi masing-masing 115,51% dan 96,23% dari target masing-masing-masing 97,28% dan 91,65%. Kedua indikator ini capaian kinerjanya Sangat Tinggi (masing-masing tercapai 118,74% dan 105,00%).

Sementara itu Persentase Ruang Kelas SD/MI sesuai SPM dan Persentase Ruang Kelas SMP/MTs sesuai SPM dapat direalisasikan masing-masing dengan kriteria Tinggi dan Sangat Tinggi (masing-masing tercapai 91,70% dan 80,45%). Kondisi ini disebabkan oleh sarana dan prasarana sekolah terutama gedung sekolah sangat mempengaruhi layanan pendidikan.

APK dan APM Program Pendidikan Menengah telah di atas target capaian, namun capaian kinerja Angka Putus Sekolah dapat direalisasikan 0,02% dari target 0,44%. Status kinerja ini Sangat Rendah (tercapai 4,55%). Sementara nilai rata-rata UN telah mencapai target yang diharapkan, yaitu 49,45% dari target 23,14% atau dengan kriteria Sangat Tinggi (tercapai 213,70%). Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pendidikan Menengah adalah belum meratanya jumlah SMA/SMK di setiap kecamatan di Kabupaten Tegal; perbandingan jumlah siswa SMA:SMK yang belum berimbang sehingga belum memenuhi sebagai Kabupaten Vokasi; rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat untuk mengakses pendidikan menengah berdampak pada angka putus sekolah; belum optimalnya pengembangan link and match antara sekolah dengan dunia usaha dan industri; jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang masih kurang; kurangnya jumlah sarana dan prasarana dan alat praktek masih belum memenuhi standar minimal pendidikan menengah.

Angka kelulusan Program Pendidikan Non Formal pada jenjang Paket A, B dan C dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2017, yaitu masing-masing tercapai 99,99% untuk Paket A, 99,98% untuk Paket B dan 99,98% untuk paket C dari target masing-masing 97% untuk Paket A, 99% untuk Paket B, dan 99,99% untuk Paket C. Kriteria kinerja indikator ini Sangat Tinggi (masing-masing tercapai 103,08%, 100,99% dan 99,99%). Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal diantaranya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan Non Formal masih kurang; belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan non formal. Untuk meningkatkan kinerja Program Pendidikan Non Formal perlu dikembangkan keberadaan Pendidikan Non Formal pada setiap PKBM di Kecamatan serta penyediaan layanan sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal.

Program Pendidikan Luar Biasa pada semua jenjang yaitu SDLB, SMPLB dan SMALBB dengan tingkat kelulusan 100% di atas dari target yang ditetapkan secara relatif tidak ditemui kendala dalam pelaksanaannya. Sementara untuk Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, capaian kinerja Pendidik PAUD yang berkualifikasi S1 mendapat kriteria Sangat Tinggi (tercapai 104,35%), yaitu terealisasi 36% dari target 34,5%. Pendidik SD Berkualifikasi S1 dapat direalisasikan 89,95% dari target 79%, atau dengan kriteria Sangat Tinggi (tercapai 113,73%). Begitu juga untuk pendidik SMP dan SMA yang berkualifikasi S1 telah berpredikat Sangat Tinggi, masing-masing terealisasi 100% dari target 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur, standar minimal pendidikan daerah, maupun kode etik profesional kinerja yang mendukung pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal; belum optimalnya akses teknologi informasi dan penerapan TIK untuk pengelolaan pendidikan dan mendukung realisasi manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel; belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal; belum optimalnya pengendalian dan pengawasan internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan; ketimpangan kualifikasi sumberdaya manusia aparatur yang ada dengan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks.

Meskipun demikian, capaian kinerja program ini cukup menggembirakan. Persentase SD yang terakreditasi telah berpredikat Sangat Tinggi (tercapai 816,67%), yaitu terealisasi 49% dari target 6%. Sejumlah usaha masih perlu dilakukan, diantaranya pembuatan SOP dalam setiap kegiatan; optimalisasi akses teknologi data pendidikan; peningkatan tata kelola dunia pendidikan yang lebih baik; dan optimalisasi pengendalian dan pengawasan internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan.

## 2. URUSAN KESEHATAN

Urusan Kesehatan diampu oleh Dinkes, RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi, dan Disdag, Kop UKM. Urusan Kesehatan terdiri dari 18 program dan 77 indikator. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kesehatan pada tahun 2017.

**Tabel 2.103**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Kesehatan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>						
01	Persentase sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	100	89,66	90	100,38	Dinkes.	★
02	Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100	100,00	100	100,00	Dinkes.	★
<b>2</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>						
01	Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	98	96,00	97,25	101,30	Dinkes	★
02	Persentase Puskesmas PONED sesuai SPM	100	68,97	34,48	50,00	Dinkes	↓
03	Rasio Puskesmas: Penduduk (1:10.000)	1:48,79	1:48,79	1:49,28	100,45	Dinkes	★
04	Persentase PPK BLUD Puskesmas	100	100,00	100	100,00	Dinkes	★
05	Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	72	70,00	79,60	113,71	Dinkes	★
06	Cakupan Penduduk yang menggunakan jamban sehat	96,9	92,90	80,52	86,67	Dinkes	★
07	Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat	90	89,00	90	101,12	Dinkes	★
08	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	80	80,00	80	100,00	Dinkes	★
09	Cakupan desa yang melaksanakan STBM	48,78049	41,81	61,67	147,49	Dinkes	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
10	Cakupan desa ODF (Open Defecation Free) / SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)	7,665505	5,92	16,72	282,27	Dinkes	★
11	Cakupan pembinaan pengelolaan limbah medis fasyankes	45	35,00	35,00	100,00	Dinkes	★
12	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	75	72,00	75,86	105,36	Dinkes	★
13	Jumlah Puskesmas terakreditasi	29	20,00	24	120	Dinkes	★
14	Persentase Puskesmas terakreditasi	100	68,97	82,76	120	Dinkes	★
15	Jumlah paket Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar	29	29,00	29	100	Dinkes	★
16	Cakupan pelayanan perijinan	100	100,00	100	100	Dinkes	★
17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100	100,00	100	100	Dinkes	★
18	Cakupan pelayanan kesehatan khusus	100	100,00	100	100	Dinkes	★
19	Cakupan Call Center dan Jejaring Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100	80,00	80	80	Dinkes	Tinggi
20	Persentase Tenaga Kesehatan terlatih PPGD, BCLS dan ATLS	100	80,00	80	80	Dinkes	Tinggi
<b>3</b>	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>						
01	Jumlah inspeksi obat dan makanan	2	2,00	2,00	100	Dinkes	★
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Obat Asli Indonesia</b>						
01	Jumlah Unit Pelayanan Kesehatan tradisional di Puskesmas	1	1,00	1,00	100	Dinkes	★
02	Jumlah kelompok petani pemasok bahan baku	3	3,00	3	100	Dinkes	★
03	Rata-rata pengunjung Pusat Pengobatan Tradisional/hari	50	35,00	35	100	Dinkes	★
<b>5</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</b>						
01	Jumlah promosi WKJ	1	1,00	1,00	100	Dinkes	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
02	Jumlah regulasi tentang kesehatan (ASI, PSN dll)	10	6,00	6	100	Dinkes	★
03	Desa Siaga Strata Mandiri	5	3,00	5	166,67	Dinkes	★
04	Cakupan penjangkaran Sisw SD/MI	100	100,00	100	100	Dinkes	★
05	Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	4	4	4	100	Dinkes	★
<b>6</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>						
01	Prevalensi Balita gizi buruk	0,2	0,53	0,014	197,36	Dinkes	★
02	Prevalensi Balita gizi baik	99,8	99,47	99,80	100,33	Dinkes	★
03	Cakupan Balita gizi buruk dan gizi kurang mendapat PMT	60	50,00	100,00	200	Dinkes	★
04	Cakupan Anak usia 6-24 bln dari Gakin mendapat MP-ASI	25	20,00	88,58	442,90	Dinkes	★
05	Cakupan Ibu Hamil KEK mendapat PMT	100	95,00	100,00	105,26	Dinkes	★
<b>7</b>	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>						
01	Jumlah kajian pengembangan lingkungan sehat	1	1,00	1	N/A	Dinkes	N/A
02	Jumlah pengembangan lingkungan sehat	8	6,00	6	100	Dinkes	★
<b>8</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>						
01	Cakupan bayi yang mendapat imunisasi lengkap	100	98,00	95,67	97,62	Dinkes	★
02	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	98,00	100	102,04	Dinkes	★
03	Prevalensi AFP Rate kasus Lumpuh layuh penderita per 100.000 penduduk <15 <sup>th</sup>	2	2,00	2,28	114	Dinkes	★
04	Angka Penemuan kasus baru TB	110	103,00	177	171,84	Dinkes	★
05	Angka Keberhasilan Pengobatan pasien TB	90	90,00	95	105,56	Dinkes	★
06	Jumlah penemuan kasus baru HIV/AIDS	130	110,00	152	138,18	Dinkes	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
07	Cakupan HIV/AIDS yang mendapat pengobatan ARV	80	80,00	72	90	Dinkes	
08	Angka Penemuan kasus baru Kusta	1,6	1,56	1,45	87,18	Dinkes	
09	Angka kesakitan DBD	8	10,00	16,30	37	Dinkes	
10	Angka kematian DBD	1	2,50	1,20	-1,182,40	Dinkes	
11	Cakupan penderita pneumonia balita yang ditangani	75	65,00	97	79,38	Dinkes	
12	Cakupan penderita Diare yang ditangani	100	100,00	130	130	Dinkes	
13	Cakupan desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100,00	100,00	100	Dinkes	
<b>9</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>						
01	Jumlah Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan yang tersusun	1	1,00	1,00	100	Dinkes	
02	Jumlah sistem informasi pelayanan kesehatan	1	1,00	1,00	100	Dinkes	
<b>10</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>						
01	Jumlah penduduk miskin non kuota PBI APBN	66000	66.000	66.000	100	Dinkes	
<b>11</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya</b>						
01	Jumlah Puskesmas 24 Jam/Rawat Inap	29	21,00	25	119,05	Dinkes	
02	Persentase Puskesmas memiliki sarana dan prasarana lengkap	100	72,41	100,00	138,10	Dinkes	
03	Jumlah paket pelatihan Pokjanel Posyandu	1	1,00	1	100	Dinkes	
04	Jumlah paket Alat Kesehatan di Fasyankes Primer	1	2,00	2	100	Dinkes	
05	Jumlah ambulance di Fasyankes Primer	58	40,00	42	105	Dinkes	
<b>12</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>						



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
	01	Jumlah pelayanan rawat jalan RSUD	85000	71.000	135.953	191,48	RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi	★
	02	Jumlah pelayanan rawat inap RSUD	35000	27.000	33.329	123,44	RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi	★
<b>13</b>	<b>Program Kemitraan peningkatan kesehatan pelayanan</b>							
	01	Jumlah Faskes. Primer yang melayani JKN	29	29,00	29,00	100	Dinkes.	★
<b>14</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>							
	01	Angka Kematian Bayi	7,6	8,10	7,50	107,41	Dinkes	★
	02	Angka Kematian Balita	8,3	8,80	8,20	106,82	Dinkes	★
	03	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yg ditangani	97	93,00	100	107,53	Dinkes	★
	04	Cakupan kunjungan bayi	99	97,00	97,40	100,41	Dinkes	★
	05	Cakupan Pelayanan Anak Balita	89	87,00	95,2	109,43	Dinkes	★
<b>15</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>							
	01	Jumlah Lansia	3752	3.625	13.535	373,38	Dinkes	★
	02	Cakupan Lansia terlayani kesehatan	12,2	10,20	11	107,84	Dinkes	★
<b>16</b>	<b>Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan</b>							
	01	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	75	72,00	98	136,67	Dinkes	★
	02	Jumlah Pengendalian Kesehatan Makanan pada UKM	65	50 UKM			Dinas Kop UKM dan Pasar	
<b>17</b>	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>							
	01	Cakupan ibu hamil mendapat layanan kesehatan	100	94,00	98,41	104,69	Dinkes	★
	02	Angka Kematian Ibu	93,3	113,30	56	150,57	Dinkes	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
03	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95	93,00	98,76	106,19	Dinkes	★
04	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	97	94,00	129,73	138,01	Dinkes	★
05	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	97	96,00	96,22	100,23	Dinkes	★
06	Cakupan Ibu Hamil K4	94	92,00	92,61	100,66	Dinkes	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinkes; RSUD dr. Soeselo; RSUD Suradadi; Disdag Kop UKM, 2017

AKI, AKB, dan AKABA mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Penurunan tersebut cukup signifikan. Jumlah kematian ibu pada tahun 2017 sebanyak 14 kasus kematian, turun dibandingkan jumlah kematian pada 2016 sebanyak 27 kasus. Kasus kematian bayi dan balita pada tahun 2017 masing - masing sebanyak 38 dan 223 kasus kematian. Menurun dibandingkan tahun 2016 yaitu sebanyak 73 kasus kematian bayi dan 295 kematian balita. Penyediaan rumah tunggu kelahiran untuk mendekati ibu hamil risiko tinggi dengan fasilitas kesehatan menjadi penyebab penurunan angka - angka kematian tersebut. Pemerintah baik pusat, provinsi, maupun daerah juga meningkatkan pemantauan ibu hamil, baik berisiko maupun tidak berisiko melalui aplikasi 5 NG (Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng). Dinas Kesehatan juga menambah jumlah puskesmas PONED dan puskesmas mampu persalinan, terutama di puskesmas yang jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai dan puskesmas dengan geografis yang sulit.

Akreditasi puskesmas merupakan sarana untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebanyak 17 puskesmas sudah lulus akreditasi oleh Kementerian Kesehatan RI, dengan status kelulusan dasar dan madya. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan juga bias dilaksanakan karena status puskesmas yang berubah menjadi BLUD. Seluruh puskesmas di Kabupaten Tegal sudah berstatus BLUD. Status tersebut memungkinkan puskesmas memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Program dan kegiatan yang ada di puskesmas tidak hanya top down dari Dinas Kesehatan, tapi juga bottom up dari masyarakat.

Pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari 2 indikator, yaitu Persentase sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar dan Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang terealisasi masing-masing 90% dan 100%. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai daftar obat dan perbekalan kesehatan yang tercantum dalam e-Catalog LKPP, berdasarkan usulan puskesmas dan pengelola obat program dengan mempertimbangkan stok obat dan perbekalan kesehatan di Gudang Farmasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan indikator ini adalah rak obat, pengukur suhu ruangan, lemari narkotik/psikotropik belum tersedia; ada beberapa sarana yang rusak, diantaranya: alarm, genset dan AC; pemanfaatan sarana komputer untuk pelayanan e-logistic belum dilaksanakan; penayangan daftar obat dan perbekalan kesehatan di e-catalog LKPP masih bertahap dan tidak awal tahun 2017; ada beberapa item obat dan perbekalan kesehatan yang tidak tersedia di e-catalog LKPP; ada beberapa item obat dan perbekalan kesehatan yang tercantum di e-catalog LKPP, tetapi tidak dilayani/ditolak

penyedia (pihak pabrikan); anggaran pengadaan obat dan perbekalan kesehatan mengalami penurunan, sehingga kekurangan anggaran disediakan oleh puskesmas melalui Anggaran Kapitasi JKN Puskesmas; belum siapnya SDM puskesmas dalam melakukan proses pengadaan obat dan perbekalan kesehatan; ada obat yang kadaluarsa di Gudang Farmasi akibat menurunnya kasus penyakit di puskesmas, sehingga pemakaian obat lebih rendah dari ketersediaan obat yang direncanakan.

Untuk itu rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah pengadaan dan perbaikan sarana yang belum tersedia dan yang rusak; pemanfaatan sarana komputer untuk pelayanan e-logistic; mengajukan usulan kepada LKPP dan Kemenkes agar penayangan daftar obat dan perbekalan kesehatan di e-catalog LKPP di awal tahun, serta untuk obat dan perbekalan kesehatan yang bersifat fast moving pihak penyedia/pabrikan lebih dari satu; obat dan perbekalan kesehatan yang tercantum di e-catalog LKPP tetapi tidak dilayani/ditolak penyedia (pihak pabrikan) pengadaannya dilakukan sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahan dan petunjuk teknisnya; anggaran untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan disentralkan satu pintu; dibentuknya Tim Perencanaan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan Secara Terpadu di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dalam rangka penyusunan perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang lebih baik.

Untuk indikator Cakupan Desa ODF (Open Defecation Free)/SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Dari target 5,92% terealisasi 16,72% sehingga kriterianya Sangat Tinggi (tercapai 282,27%).

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini adalah ada sebagian masyarakat yang menolak imunisasi karena pemahaman vaksin haram; mobilitas penduduk di beberapa wilayah cukup tinggi; angka kelahiran yang turun berpengaruh pada target sasaran bayi karena penentuan target berdasarkan angka kelahiran riil; umpan balik Laporan imunisasi dari Swasta ke Puskesmas belum rutin dilaksanakan. Untuk itu rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang fatwa halal vaksin dari MUI untuk mengubah paradigma imunisasi di masyarakat; melakukan pendataan sasaran secara riil dan melakukan validasi dan akurasi data cakupan imunisasi rutin setiap bulan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita terdiri dari antara lain indikator Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita pada tahun 2017 masing-masing sebanyak 7,5 dan 8,2. Status kinerja indikator ini Sangat Tinggi (masing-masing tercapai 107,41% dan 106,82%). Untuk Cakupan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Mendapat PMT dapat direalisasikan sebesar 100% dari target sebesar 50%. Capaian kinerja ini Sangat Tinggi (tercapai 200%).

Permasalahan yang dihadapi untuk menurunkan Angka Kematian bayi dan Balita adalah tatalaksana neonatus di puskesmas belum dilaksanakan sebagaimana mestinya; RS rujukan masih belum memiliki alkes pelayanan neonatus yang memadai; masih ada nakes belum mengetahui kegawatdarutan neonatus (kualitas SDM berdampak pada kualitas pelayanan); penyebab kematian bayi masih dominan karena BBLR (berat bayi lahir rendah) berhubungan dengan asupan gizi ibu hamil; penyebab tidak langsung adalah pendidikan ibu yang masih rendah

Rencana tindak lanjut yang perlu diperhatikan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi dan Balita adalah peningkatan dan penguatan tatalaksana neonatus di puskesmas; peningkatan kualitas SDM; pengadaan alkes pelayanan kesehatan neonatus baik di RS/Puskesmas; peningkatan asupan gizi terutama pada ibu hamil dan pemberian informasi kesehatan pada ibu hamil/remaja.

Indikator kinerja program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata telah tercapai, yaitu 135.953 jumlah pelayanan rawat jalan RSUD, lebih banyak dari target sebanyak 71.000 kunjungan. Begitu juga untuk pelayanan rawat inap, dari target 27.000 terealisasi sebanyak 33.329 rawat inap.

Menetapkan dan menginterpretasikan indikator ini perlu dilakukan dengan hati-hati. Target kinerja yang ditetapkan meningkat bukan dimaknai untuk memperbanyak orang sakit melainkan menunjukkan gambaran kinerja orang sakit yang dilayani. Meningkatnya jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan di RSUD menggambarkan bahwa pasien rawat inap dan rawat jalan telah ditangani.


Program Peningkatan Pelayanan diamanatkan Klasifikasi RS dr. Soeselo menjadi kelas B Pendidikan. Untuk mencapai target kinerja tersebut terdapat 4 instrumen kegiatan, yaitu: pengumpulan informasi persiapan persyaratan penetapan RS kelas B pendidikan (100%)<sup>7</sup>, pemenuhan persyaratan penetapan RS kelas B pendidikan, bimbingan dan penyempurnaan persyaratan penetapan RS kelas B pendidikan dan visitasi penilaian RS kelas B pendidikan, sehingga rata-rata kinerjanya sebesar 70% dari target 50%. Penghitungan kinerja ditandai dengan capaian yang telah dicapai tahun 2015 yaitu proses menuju rumah Sakit B Pendidikan (setara 55%) dan tahun 2016 dilaksanakan Mou/kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sehingga setara dengan 70 %.






Sementara indikator Layanan Unggulan RSUD dr Soeselo terdiri dari 8 layanan, antara lain: klinik perjanjian (100%); klinik akupunktur dan sjamu terpadu (100%); IBS&ICU/ICCU/PICU/NICU (100%); laboratorium patologi anatomi (100%); pelayanan kardiologi terpadu (50%); pelayanan geriatri terpadu (0%); pusat rujukan kegawatdaruratan maternal neonatal terpadu (100%) sehingga rata-rata capaian kinerjanya adalah 81,75%, sementara target kinerjanya sebesar 75%.

### 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum terdiri dari 13 program dan 22 indikator. Urusan Pekerjaan Umum diampu oleh DPU. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2017.

**Tabel 2.104**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Pekerjaan Umum**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>						
1	Persentase panjang jalan kabupaten baik sesuai standar Bina Marga	68	65	52.75	81,1	DPU Bina Marga	
2	Jumlah panjang jalan dengan lebar 6 m	147,7	143,7	71.71	48.55	DPU Bina Marga	
3	Jumlah panjang jalan lebar 9 m	71,5	71,5	15.58	21.79	DPU Bina Marga	
4	Jumlah panjang jalan kolektor	194	194	0	0	DPU Bina Marga	
<b>2</b>	<b>Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>						
1	Persentase drainase jalan kabupaten berfungsi baik	45	43	57.85	128.56	DPU Cipta Karya	
2	Persentase drainase jalan desa berfungsi baik	50	48			DPU Cipta Karya	N/A

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
3	<b>Program Pembangunan turap/talud/bronjong</b>						
1	Panjang talud jalan kabupaten terbangun	20.500	13.500	41.458	307	DPU	
2	Panjang talud pengairan yang terbangun	650	350	845	241	DPU	
3	Panjang talud pengairan yang direhabilitasi	630	315	837	265	DPU	
4	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>						
1	Panjang jalan direhabilitasi	220	190	98.6	51.89	DPU Bina Marga	
2	Jumlah jembatan direhabilitasi	210	140	40	28.57	DPU Bina Marga	
5	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan talud /bronjong</b>						
1	Persentase panjang talud direhabilitasi	15	13	7.5	57.69	DPU	
6	<b>Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base Jalan dan Jembatan</b>						
1	Sistem Informasi Jalan dan Jembatan yang aktif	1	1	1	100	DPU	
7	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>						
1	jumlah inspeksi jalan dan jembatan	300	200	150	75	DPU BP	
8	<b>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</b>						
1	panjang irigasi dalam kondisi baik	7500	3750	127,93	3.41	DPU Pengairan	
9	<b>Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya</b>						
1	Persentase sungai, danau dan sumber daya air dalam kondisi baik	40	30	-	-	DPU Pengairan	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
10	Program pengendalian banjir						
1	Persentase kawasan rawan banjir	4,5	4,7	4.26	90.6	DPU	★

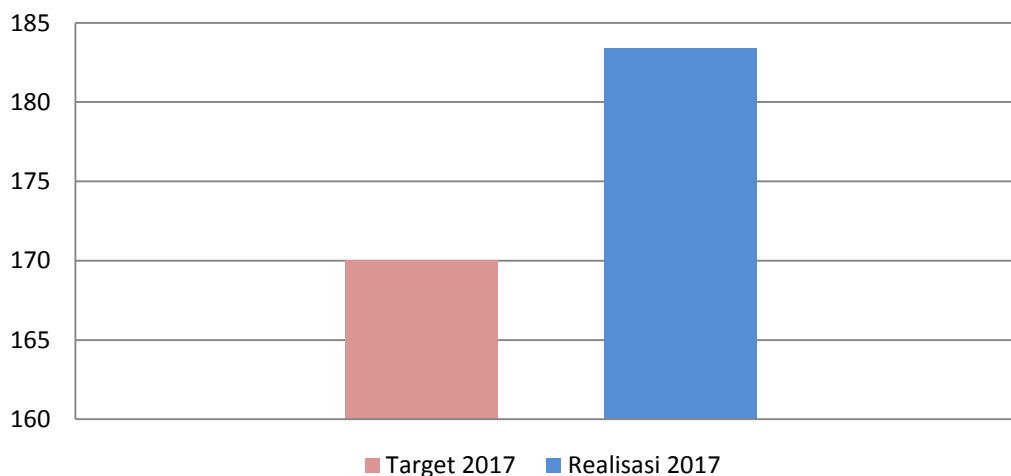
★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: DPU, 2017.

Capaian indikator kinerja persentase panjang jalan kabupaten sesuai standar Bina Marga pada Program pembangunan jalan dan jembatan ditargetkan sepanjang 65%, pada tahun 2017 dapat direalisasikan sepanjang 49,95 Km. Kriteria capaian kinerja indikator ini Tinggi (tercapai 81.1%). Terbatasnya anggaran APBD tidak tersentuh jalan Kolektor sehingga Nihil. Sementara pada Program pembangunan turap/talud/bronjong, panjang talud jalan kabupaten terbangun telah terealisasi sepanjang 41.548 m, dari target 13.500 m, dengan kriteria Rendah (tercapai 307%). Indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum masih memuat indikator-indikator yang menjadi kewenangan desa (jalan, talud) maupun provinsi (sungai, danau). Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah kabupaten tidak dapat melakukan pembangunan terhadap target yang telah ditetapkan, sehingga realisasinya cenderung minimal, terutama indikator yang memuat nomenklatur desa seperti drainase, dan talud jalan desa.

Pada Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, realisasi pada tahun 2017 mendapat kriteria Sangat Tinggi (tercapai 80.46, %). Dari target 330 Km jalan direhabilitasi sudah terealisasi 98.6 Km. Berikut disajikan Gambar 2.7 Panjang Jalan Direhabilitasi

### Panjang Jalan Direhabilitasi



Gambar 2.7. Panjang Jalan Direhabilitasi  
Sumber : DPU Tahun 2017

Penataan Ruang terdiri dari 2 program dengan 2 indikator kinerja. Urusan Penataan Ruang diampu oleh Bappeda. Berikut adalah indikator, target dan capaian kinerja Urusan Penataan Ruang pada tahun 2017.

**Tabel 2.105**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Penataan Ruang**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>						
1	Jumlah RDTR sesuai UU Penataan Ruang	18	10	18,00	180	Bappeda & Litbang	★
<b>2</b>	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>						
1	Jumlah penindakan pelanggaran tata ruang	10	3	11	366,66	Bappeda & Litbang	★

★ Sangat Tinggi    ➡ Tinggi, Sedang    ↓ Rendah, Sangat Rendah.  
Sumber: Bappeda & Litbang, 2017.

Pada Program Perencanaan Tata Ruang, indikator jumlah RDTR sesuai UU Penataan Ruang telah terealisasi dalam bentuk kajian konsultan yang dapat ditingkatkan menjadi Perda. Pada tahun 2017 akan dilaksanakan Review RTRW terlebih dahulu sehingga penyusunan dan penetapan Perda dilakukan setelah Review RTRW. Untuk indikator jumlah penindakan pelanggaran tata ruang juga 0, karena tidak adanya data pelanggaran tata ruang. Pihak yang berwenang melakukan penindakan adalah PPNS dan Satpol PP sehingga diperlukan koordinasi dengan PPNS terkait penindakan pelanggaran Tata Ruang.

#### 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat terdiri dari 5 program dan 11 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perumahan Rakyat yang diampu oleh Bapermasdes, Satpol PP dan Dinsosnakertrans pada tahun 2017.

**Tabel 2.106**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Perumahan Rakyat**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>						
1	Persentase rumah layak huni	91,34835	91,09	91,35	100,28	Dinas Perkimtaru	
2	Jumlah rumah tidak layak huni direhabilitasi	600	600,00	733	108,60	Dinas Perkimtaru	
<b>2</b>	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>						
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	82,25	78,25	84,98	107,49	Dinas Perkimtaru	
2	Jumlah paket pelatihan BP-SPAM	1	1,00	1,00	1,00	Dinas Perkimtaru	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
3	<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>						
1	Jumlah kegiatan pemukiman berbasis masyarakat	15	11,00	15,00	136,36	Dinas Perkimtaru	
2	jumlah kelompok pelestarian lingkungan perumahan	15	11,00	15,00	136,36	Dinas Perkimtaru	
4	<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>						
1	Rasio jumlah petugas Damkar : penduduk	0,000030	0,00	0,000023	91,54	Satpol PP Damkar	
2	Jumlah mobil damkar	7	6 unit	6,00	100,00	Satpol PP Damkar	
3	Persentase kasus kebakaran ditangani	100	80,00	100,00	125,00	Satpol PP Damkar	
4	Persentase Luas Permukiman yang Tertata	42,75972	42,72	42,72	100,00	Dinas Perkimtaru	
5	<b>Program pengelolaan areal pemakaman</b>						
1	Jumlah areal permakaman	282	282,00	432,00	153,19	Dinsos	

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.  
 Sumber: Disperkimtaru; Satpol PP ; Dinsos, 2017.

Mendasari data PPLS Tahun 2011 dari 7 indikator, maka target Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Tegal yang menjadi skala prioritas sejumlah 1.331 rumah/unit, sedangkan tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tegal mengalokasikan sebanyak 733 unit/rumah dengan masing-masing rumah mendapat Rp.20.000.000,- Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2017 Pemerintah Desa lebih fokus pada program DD dan ADD akhirnya pencairan dana bantuan oleh masing-masing desa pada akhir tahun dan pelaksanaan fisiknya juga akhir tahun.

Indikator Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi dari target 600 rumah, terealisasi 733 rumah dengan kriteria capaian kinerja Sangat Tinggi (tercapai 108,60%).

Capaian kinerja Program lingkungan sehat perumahan, yaitu persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih mendapat kriteria Sangat Tinggi. RPJMD menargetkan pada tahun 2017 sebesar 107,49% rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, terealisasi sebesar 84,98% dengan predikat Sangat Tinggi (tercapai 107,49%).



## 5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP, BPBD dan Kesbangpolinmas. Urusan ini terdiri dari 7 program dan 34 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2017.

**Tabel 2.107**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
1	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>						
	1 Rasio Linmas per 10.000 penduduk	0,00138	1:59,40	1:110	8.542,71	Kesbangpolinmas	★
	2 Rasio Linmas terlatih	5	2	1,00	50,00	Kesbangpolinmas	↓
2	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal</b>						
	1 Jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhan kam)	60	36	33	91,67	Kesbangpolinmas	★
3	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>						
	1 Jumlah dialog umat beragama	1	16	16	100	Kesbangpolinmas	★
	2 Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama	1	1	1	100	Kesbangpolinmas	★
4	<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>						
	1 Jumlah dialog wawasan kebangsaan	1	1	1,00	100,00	Kesbangpolinmas	★
	2 Jumlah kerjasama umat beragama	1	1	1,00	100,00	Kesbangpolinmas	★
5	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
	1 Cakupan siskamling dengan jumlah desa	75	65	60	92,31	Kesbangpolinmas	★
<b>6</b>	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>						
	1 Persentase Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas	100	75	78	104	Kesbangpolinmas	★
	2 Persentase pengguna hak pilih Pemilu Legislatif	70	62,06	-	0	Kesbangpolinmas	0
	3 Persentase pengguna hak pilih Pemilu Presiden	70	62,88	-	0	Kesbangpolinmas	0
	4 Persentase pengguna hak pilih Pemilu Gubernur	70	57,88	-	0	Kesbangpolinmas	0
	5 Persentase pengguna hak pilih Pemilu Bupati	70	57,88	-	0	Kesbangpolinmas	0
	6 Rata-rata persentase pengguna hak pilih Pilkades	90	90	73,17	81,3	Kesbangpolinmas	➡
<b>7</b>	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>						
	1 Jumlah kegiatan mitigasi bencana	1	1	1,00	100,00	BPBD	★
	2 Jumlah kegiatan tanggap darurat bencana	8	8	5,00	62,50	BPBD	↓

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Kesbangpolinmas; BPBD, 2017.

Indikator rasio Linmas per 10.000 penduduk pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat telah tercapai melebihi target. Dari target 1:59,40 per 10.000 penduduk, dapat direalisasikan sebanyak 1:110 per 10.000 penduduk, dengan status capaian Sangat Tinggi (tercapai 8.542,71%). Untuk indikator jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhankam) terealisasi 8 laporan dari target 24 laporan. Hal ini karena pelaporan dilakukan setiap triwulan, sehingga dalam satu tahun hanya terdapat 4 laporan, sehingga dalam 2 tahun terakhir periode RPJMD dapat direalisasikan sebanyak 8 laporan.

Indikator-indikator yang berhubungan dialog dan kerjasama umat beragama telah tercapai sesuai target, dari target masing-masing 1 dialog dan kerjasama dapat direalisasikan sebanyak 1 dialog atau mendapat kriteria *Sangat Tinggi* (tercapai 100%). Keberadaan lembaga-lembaga seperti FKUB, Polres, Kodim, BPPKB, Kemenag, dan Bag. Kesra Setda rutin melakukan pertemuan untuk mewujudkan budaya rukun dan toleran di masyarakat. Terkait keberadaan ormas, dihadapi kendala pendataan karena tidak semua ormas mendaftarkan

apabila terjadi pergantian kepengurusan. Sementara untuk indikator-indikator terkait hak pilih tidak ada realisasinya karena pada tahun 2016 tidak diselenggarakan Pilpres, Pileg, Pilkada.

Indikator jumlah kegiatan mitigasi bencana dan jumlah kegiatan tanggap darurat bencana pada Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam telah dilakukan dengan baik. Indikator jumlah kegiatan mitigasi bencana direncanakan sebanyak 1 mitigasi, dan dapat direalisasikan sebanyak 1 mitigasi. Sementara pada indikator jumlah kegiatan tanggap darurat bencana belum memenuhi target kinerja yang sebanyak 8 kegiatan, yaitu pada tahun 2016 realisasi untuk indikator jumlah kegiatan tanggap darurat bencana sebanyak 5 kegiatan.

Capaian kinerja outcome pada Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan indicator jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhan kam) tercapai 100% (sangat tinggi). Laporan tersebut tersusun rutin setiap bulannya dan memuat kejadian-kejadian yang dianggap penting seputar Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Capaian kinerja outcome program Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indicator utamanya. Indikator pertama yaitu jumlah dialog umat beragama tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu 16 kali dialog yang terdiri dari 12 kali dialog rutin intern anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dan 4 kali dialog antara pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dengan Masyarakat Kabupaten Tegal yang tahun 2017 dilaksanakan di 4 kecamatan yakni Kecamatan Slawi, Kecamatan Pangkah, Kecamatan Adiwerna dan Kecamatan Dukuhwaru. Dialog Kerukunan Umat Beragama membahas berbagai permasalahan seputar potensi-potensi konflik dan kejadian konflik antar umat beragama di kalangan masyarakat Kabupaten Tegal guna menemukan solusi untuk mencegah dan menanggulangi konflik yang akan dan telah terjadi. Indikator kedua yaitu Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama yang untuk saat ini hanya 1 jenis yaitu berupa brosur/ pamphlet yang berisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Capaian kinerja outcome program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indicator utamanya. Pertama jumlah dialog wawasan kebangsaan tercapai 100% yakni terselenggaranya Talkshow, Seminar dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Masyarakat sebanyak 1 kali di Kecamatan Talang. Kecamatan Talang dipilih sebagai sasaran pelaksanaan diskusi tersebut dengan argument bahwa telah ditangkapnya salah satu warga setempat sebagai pelaku aksi terror di .... Dan tahun sebelumnya juga telah dipulangkan eks-warga Gafatar yang sebagian berasal dari Desa Pekiringan Kecamatan Talang. Indikator kedua yaitu jumlah kerjasama kerukunan umat beragama tercapai 100% yaitu dengan telah dibentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah yang menagani kerjasama antar umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal

Capaian program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan indicator kinerja outcome yaitu cakupan siskamling dengan jumlah desa telah tercapai 100%. Cakupan siskamling yang dimaksud yaitu siskamling yang telah terintegrasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Di Kabupaten Tegal Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat telah terbentuk hingga ke tingkat Desa.








Capaian kinerja outcome program pendidikan politik masyarakat dengan indicator outcome pertama yaitu Persentase Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas tercapai 100% yaitu terdapat 78 buah organisasi masyarakat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal yang telah mendaftar dan telah lolos verifikasi sehingga terdaftar dalam system database ormas Kabupaten Tegal.

Indicator outcome persentase pengguna hak pilih Pemilu Legislatif, Persentase pengguna hak pilih Pemilu Presiden, Persentase pengguna hak pilih Pemilu Gubernur, dan Persentase pengguna hak pilih Pemilu Bupati tidak terisi karena pada tahun 2017 tidak ada Pemilihan Umum dimaksud. Pemilu Legislatif dan Presiden, terakhir dilaksanakan tahun 2014, Pemilu Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Tegal terakhir dilaksanakan tahun 2013. Indicator outcome Rata-rata persentase pengguna hak pilih Pilkades mencapai 81,3 % dari yang telah ditetapkan hal ini masih termasuk ke dalam kategori baik,

## 6. URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial diampu oleh Dinsosakertrans. Urusan Sosial terdiri dari 7 program dan 22 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Sosial tahun 2017.

**Tabel 2.108**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Sosial**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>						
1	Persentase korban bencana yang ditangani	100	100	100	100 %	Dinsos	
2	Persentase PMKS ditangani	30	28,00	27,90	99,64%	Dinsos	
3	Jumlah perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran yang mendapat pelayanan sosial	350	250,00	250	100%	Dinsos	
4	Persentase perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial	8,2	6,2	6,2	100%	Dinsos	
<b>2</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>						
1	Persentase PMKS direhabilitasi sosial	30	28,00	27,00	96,42	Dinsos	
<b>3</b>	<b>Program pembinaan anak terlantar</b>						
1	Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial	450	350,00	350	100%	Dinsos	
2	Persentase anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan pekerja anak direhabilitasi	16	11,00	11,00	100%	Dinsos	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
	sosial						
4	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>						
1	Jumlah penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	350	250,00	250	100%	Dinsos	★
2	Persentase penyandang cacat (difabel) direhabilitasi	7,2	5,2	5,2	100%	Dinsos	★
5	<b>Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo</b>						
1	Jumlah panti asuhan/panti jompo	24	21,00	21	100%	Dinsos	★
2	Jumlah panti asuhan/panti jompo yang dibina	24	21,00	21	100%	Dinsos	★
6	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>						
1	Jumlah lansia terlantar yang direhabilitasi	70,00	50,00	50	100%	Dinsos	★
2	Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi	12,20	10,2	10,2	100%	Dinsos	★
3	Jumlah pengidap narkoba yang direhabilitasi	50,00	40,00	39	97,5%	Dinsos	➡
4	Persentase pengidap narkoba yang direhabilitasi	14,50	12,5	12	97,5%	Dinsos	➡
5	Jumlah pengidap PMS yang direhabilitasi	170	125	157	125,60%	Dinsos	★
6	Persentase pengidap PMS yang direhabilitasi	7,20	5,7	6	105,26%	Dinsos	★
7	Jumlah pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi	50	30	30	100%	Dinsos	★
8	Persentase pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi	8,20	6,2	6,1	98,38%	Dinsos	➡
9	Jumlah eks WTS yang diberdayakan	500	350	423	120%	Dinsos	★
10	Persentase eks WTS yang diberdayakan	9,80	7,2	10,50	145,83%	Dinsos	★
7	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>						
1	Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	300	250	250	100 %	Dinsos	➡

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinsos, 2017.

Capaian kinerja Persentase korban bencana yang ditangani ditargetkan sebesar 100% telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014–2019. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dan koordinasi yang baik antara BPBD PMI dan unsur terkait serta kesiapsiagaan masyarakat itu sendiri dalam menghadapi terjadinya bencana, adanya jalur evakuasi yang jelas dan sistem peringatan dini dalam masyarakat sehingga terdapat 43 kejadian bencana dengan jumlah korban 7.026 jiwa dapat ditangani 100 %.

Capaian kinerja Persentase PMKS yang ditangani ditargetkan sebesar 27% telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019. Hal ini disebabkan karena adanya penanganan PMKS kerjasama antara pusat, daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten Tegal diantaranya pelatihan–pelatihan tata boga, keluarga rawan sosial ekonomi yang mendapat bantuan usaha ekonomi produktif, pelatihan tata rias bagi WRSE, pelatihan Bordir, pelatihan menjahit, keluarga rawan sosial ekonomi mengikuti pelatihan teknis HP dan stir mobil, serta kelompok PMKS mendapat bantuan KUBE APBN Kemensos.

Capaian kinerja Persentase PMKS 28 % hanya tercapai 27% hal ini dikarenakan jumlah PMKS yang direhabilitasi terbatas hanya pada PMKS yang dikirim ke Balai – balai besar sosial dan kebanyakan setelah dijaring untuk dikirim ternyata dari pihak keluarga berkeberatan. Capaian kinerja Persentase anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan pekerja anak yang direhabilitasi sosial 11 % terealisasi sebesar 11 %, dari jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan pekerja anak yang direhabilitasi sosial sejumlah 350 anak sedangkan jumlah ketelantaran tahun 2017 sejumlah 350 anak.

Capaian kinerja Persentase penyandang cacat (Difabel) yang direhabilitasi sosial ditargetkan sebesar social 5,2 % terealisasi sebesar 3,46 % hal ini disebabkan karena dari jumlah kecacatan 8.655 Orang, target tahun 2017 sejumlah 200 Orang yang direhabilitasi dan realisasi tahun 2017 hanya yang direhabilitasi sejumlah 162 Orang. Capaian kinerja Jumlah panti asuhan/panti jompo yang dibina ditargetkan sebanyak 21 panti telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam RPKMD Tahun 2014–2019.

Capaian kinerja Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi sebesar ditargetkan sebesar 10,2% terealisasi sebesar 10,2%. Sementara capaian kinerja Persentase Eks WTS yang diberdayakan ditargetkan sebesar 7,2 % terealisasi 8,2 % orang dari target 2017 sejumlah 350 Orang dan realisasi yang diberdayakan sebanyak 423 Orang, hal tersebut karena adanya dukungan anggaran dari APBN.

## 2.2.2 FOKUS URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

### 1. URUSAN TENAGA KERJA

Urusan Tenaga Kerja diampu oleh Disperinaker, terdiri dari 6 program dan 18 indikator. Berikut indikator, terget dan capaian kinerja Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2017.

**Tabel 2.109**  
**Evaluasi Kinerja Program RPKD Tahun 2017 Urusan Tenaga Kerja**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja						
	1   Penempatan AKAD	13.000	12500	9231	73.84	Dinsos	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
	2 Penempatan AKAN	8300	7825	4653	59,46	Dinsos	↓
	3 Penempatan AKL	300000	200000	2124	1,06	Dinsos	↓
	4 Jumlah instruktur BLK	40	33	21	70	Dinsos	→
	5 Jumlah pelatihan berbasis masyarakat	58	48	50	104,16	Dinsos	★
	6 Jumlah pelatihan berbasis kompetensi	65	55	50	90,9	Dinsos	★
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>						
	1 Tingkat Pengangguran Terbuka	3,86	4,06	3,91	96,30	Dinsos	★
	2 Tingkat partisipasi angkatan kerja	88,02	79,60	80,44	101,05	Dinsos	★
	3 Tingkat Kesempatan Kerja	96,15	94,15	95,25	100	Dinsos	★
	4 Jumlah LPKS	60	53	50	94,34	Dinsos	→
	5 Jumlah Bursa Kerja Khusus	52	50	42	84	Dinsos	★
	6 Jumlah PPTKIS	18	15	7	46,6	Dinsos	↓
	7 Jumlah Pelatihan Kerjasama LPKS	65	50	30	60	Dinsos	→
	8 Jumlah pelatihan tenaga kerja siap pakai	10	6	4	66,67	Dinsos	→
<b>3</b>	<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>						
	1 Persentase UMR: KHL	100	100	100	100	Dinsos	★
	2 Jumlah Sengketa Industrial	8	12	14	>100 %	Dinsos	★
	3 Jumlah sengketa industrial ditangani	8	12	14	>100 %	Dinsos	★
	4 Jumlah sidak/pengawasan ketenagakerjaan	300	240	180	75	Dinsos	→
	5 Jumlah pengawas tenaga kerja	5	4	5	>100%	Dinsos	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinsos, 2017.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pelatihan Kerja mempunyai fungsi ganda yaitu untuk menjembatani kesenjangan antara hasil pendidikan dan kebutuhan duniakerja serta untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pelatihan Kerja dapat dijadikan salah satu sarana untuk mengantisipasi perubahan global. Dinas melakukan Program Pengentasan kemiskinan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan kerja sehingga warga masyarakat yang mengikuti pelatihan memiliki bekal life-skill atau kecakapan hidup untuk bekerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Maksud dilaksanakan kegiatan Pelatihan adalah untuk memberikan bekal kemampuan, ketrampilan dan sikap mental kerja sehingga tenaga kerja memiliki pemahanan dan keahlian tertentu dan diharapkan kepada peserta mempunyai kemandirian.

Program peningkatan kesempatan kerja, merupakan program pemerintah yang memberikan lapangan pekerjaan pada masyarakat, membuka lapangan kerja serta memberikan informasi pasar kerja/bursa kerja dan melakukan pendataan pencari kerja di Kabupaten Tegal. Permasalahannya tenaga kerja tiap tahun kurang berkompotensi/tidak punya keahlian, Lapangan kerja/kesempatan kerja yang terbatas dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang meningkat setiap tahunnya.

Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, untuk istilah UMR menjadi UMK dengan ketetapan UU no 13 Tahun 2013, istilah sengketa di buruh menjadi perselisihan hubungan industri. Untuk pengawasan ketenagakerjaan yang sekarang kewenangannya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi sesuai UU No. 23 Tahun 2014 mulai awal Juni 2017. Terselainya kasus perselisihan hubungan industrial, tersosialisasinya berbagai peraturan ketenagakerjaan kepada perusahaan di Kabupaten Tegal yang terbagi dalam 6 paket dan jumlah peserta 360 orang. Tersedianya data perusahaan sebagai sarana pembinaan hubungan industrial dan jaminan social perusahaan, terbinanya serikat pekerja / serikat buruh di Kabupaten Tegal, terlatihnya perusahaan tentang sistem pengupahan yang berlaku di Indonesia melalui pelatihan yang terbagi dalam 6 paket dan jumlah peserta 360 orang.

Capaian kinerja Penempatan AKAD telah mencapai target yang diinginkan, yaitu dari target 12.000 orang dapat direalisasikan sebanyak 13.000 orang dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 108,33%). Hal ini dapat direalisasikan karena kerjasama yang baik antara Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di Kabupaten Tegal dengan Dinsosnakertrans. Sementara Penempatan AKAN dapat direalisasikan sebanyak 415 orang dari target sebanyak 7.500 orang. Kondisi ini disebabkan oleh penempatan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) yang terdata di Dinsosnakertrans Kabupaten Tegal hanya yang bekerja di darat yang penyalurannya melalui PPTKIS. Adapun jumlah tenaga kerja yang menjadi TKI pelaut sebenarnya mencapai jumlah ribuan akan tetapi tidak terdata dikarenakan dari pihak perusahaan tidak melaporkan hasil perekrutannya. Sedangkan penempatan AKL dari target 175.000 orang dapat dilaporkan sebanyak 69 orang. Hal ini jumlah investasi di Kabupaten Tegal terbatas dan banyak perusahaan tidak melaporkan jumlah perekrutan karyawan baru.

Capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) adalah sebesar 9,8% dari targetnya 4,16%. TPT masih tinggi dikarenakan perusahaan besar di Kabupaten Tegal masih terbatas. Untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja berturut turut sebesar 62% dan 57,19% dari target masing-masing 74,3% dan 93,95%.









Capaian kinerja Persentase UMR:KHL Tahun 2016 telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019. Berdasarkan hasil survei sesuai dengan Pergub Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Survei KHL dan Pentahapan Pencapaian KHL yaitu sebesar Rp. 1.150.000,-:Rp. 1.150.000,- Capaian kinerja Sengketa Industrial yang ditangani Tahun 2016 telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019. Berdasarkan jumlah pengaduan perselisihan Hubungan Industrial antara Perusahaan dengan Pekerja yang telah masuk dan ditangani oleh Dinsosnakertrans sebanyak 17 kasus.



## 2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 4 program dan 38 indikator kinerja. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diampu oleh DP3AP2KB dan Dispermasdes. Berikut disajikan tabel capaian, indikator dan target kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.




**Tabel 2.110**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017**  
**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017	
1	<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>							
	1	Pencapaian Kota Layak Anak	Kab Tegal KLA	Kab Tegal KLA	BELUM	0.00	DP3AP2KB	
	2	Jumlah kebijakan perlindungan anak	2	2,00	2.00	100.00	DP3AP2KB	
	3	Jumlah pengaduan KDRT ke PPT	90	70,00	55	78.57	DP3AP2KB	
	4	Persentase pengaduan KDRT ke PPT yang ditindaklanjuti	100	100,00	100.00	100.00	DP3AP2KB	
2	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>							
	1	Jumlah SKPD melaksanakan PPRG	54	54,00	54.00	100.00	DP3AP2KB	
	2	Jumlah pengambil kebijakan di Tingkat desa yg memahami kebijakan yg responsif gender	47	40,00	45.00	112.50	DP3AP2KB	
	3	Jumlah SKPD yang mendapat pelatihan Data pilah	50	50,00	48.00	96.00	DP3AP2KB	
	4	Jumlah masyarakat yang memahami kesetaraan dan keadilan gender	50	50,00	50.00	100.00	DP3AP2KB	
	5	Jumlah Tim Kab. Dan Upt kec. Yang memahami kesetaraan dan keadilan gender	50	50,00	58.00	116.00	DP3AP2KB	
	6	Cakupan tersusunnya profil perlindungan perempuan, lansia dan cacat (difabel)	100	100	100	100,00	DP3AP2KB	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100,00	100.00	100.00	DP3AP2KB	★
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih	100	100,00	100.00	100.00	DP3AP2KB	★
9	Cakupan pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang diberikan petugas sosial terlatih	75	65,00	100.00	153.85	DP3AP2KB	★
10	Cakupan pelayanan bimbingan rokhani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan	75	65,00	100.00	153.85	DP3AP2KB	★
11	Cakupan masyarakat & lembaga yang paham UU No 23 tahun 2002	25	25,00	150.00	600.00	DP3AP2KB	★
12	Cakupan anak yang memiliki kemandirian dan ketrampilan	50	50,00	70.00	140.00	DP3AP2KB	★
13	Cakupan Desa yg melaksanakan "Cinta anak"	67	50,00	67.00	>100	DP3AP2KB	★
14	Jumlah PAUD yg melaksanakan penitipan anak	25	25,00	82.00	328.00	DP3AP2KB	★
15	Jumlah Pelaksanaan KLA di Kecamatan	4	4,00	4.00	100.00	DP3AP2KB	★
16	Jumlah Forum anak yang aktif	5	4,00	7.00	175.00	DP3AP2KB	★
17	Cakupan data anak terpilah sesuai indikator KLA	100 % (31 indikator)	100,00	50.00	50.00	DP3AP2KB	↓
18	Jumlah desa binaan PKK	33	33	33	100	Dispermasdes	★
19	Jumlah masyarakat mitra P2MBG	60	60	40	66,67	Dispermasdes	➡
20	Jumlah Pengajar PAUD yang terlatih	18	18	18	100	Dispermasdes	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
3	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>						
1	IPG	65,72	63,72	86.76	136.16	DP3AP2KB	★
2	IDG	70,16	65,16	51.16	78.51	DP3AP2KB	➡
3	Persentase perempuan bekerja sebagai manajer, profesional, administrasi, teknisi	57,54	51,54	42.54	82.54	DP3AP2KB	➡
4	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	15	10,00	20.00	200.00	DP3AP2KB	★
5	Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	41,17	35,17	26.17	74.41	DP3AP2KB	➡
6	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	100,00	100.00	100.00	DP3AP2KB	★
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	100	100,00	100.00	100.00	DP3AP2KB	★
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	100,00	100.00	100.00	DP3AP2KB	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
9	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100	75,00	100.00	133.33	DP3AP2KB	★
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80	80,00	100.00	125.00	DP3AP2KB	★
11	Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokad yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100,00	100.00	100.00	DP3AP2KB	★
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	80	70,00	80.00	114,29	DP3AP2KB	★
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100,00	100.00	100.00	DP3AP2KB	★
4	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>						
1	Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang	40	40,00	41	>100	Bappeda & Litbang	★

 Sangat Tinggi 
  Tinggi, Sedang 
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: DP3AP2KB, Dispermasdes, Bappeda & Litbang, 2017.

Indikator pencapaian Kota Layak Anak pada tahun 2016 belum dapat direalisasikan. Kota Layak Anak diukur dari 31 indikator layak anak. Kabupaten Tegal telah mengirimkan status 31 indikator layak anak kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari rilis Kota Layak Anak yang disampaikan kementerian, Kabupaten Tegal tidak terdapat dalam daftar Kota Layak Anak. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Kota Layak Anak adalah komitmen semua pihak untuk mewujudkan indikator-indikator Kota

Layak Anak yang tersebar di sejumlah sektor seperti pendidikan, kesehatan, catatan sipil, perhubungan hingga bencana. Sehubungan dengan hal tersebut akan diinisiasi penyusunan Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2016 sehingga pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat lebih sinergis lagi.

Jumlah pelaksanaan KLA di kecamatan yang terealisasi sebanyak 8 kecamatan dari target 3 kecamatan, atau dengan status kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 266,67%). Kecamatan yang telah diinisiasi layak anak ditandai dengan pembentukan Gugus Tugas Layak Anak dan inisiasi Desa Layak Anak antara lain Kecamatan Adiwerna, Pangkah, Slawi dan Lebaksiu. Sementara jumlah forum anak yang aktif antara lain Forum Anak Kabupaten Tegal dan Forum Anak Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Sementara desa yang telah diinisiasi layak anak antara lain Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi, Desa Ujungrusi Kecamatan Adiwerna, Desa Bogares Lor Kecamatan Pangkah dan Desa Yomani Kecamatan Lebaksiu.

Untuk indikator kinerja jumlah pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) terealisasi 59 pengaduan dari target 60 pengaduan. Membaca indikator ini perlu cermat, bahwa tujuan indikator bukan memperbanyak atau merencanakan kasus yang lebih banyak, namun memperbanyak kasus yang dilaporkan. Saat ini KDRT seperti fenomena gunung es yang banyak tidak dilaporkan. Pelaporan KDRT menunjukkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menurunkan KDRT itu sendiri.

Secara umum, kendala dalam pelaksanaan PPT adalah belum optimalnya pemahaman Tim PPT terhadap tugas dalam menangani kekerasan perempuan dan anak; belum tercukupinya sarana mobilitas pendampingan korban; belum tersedia sarana dan prasarana yang nyaman bagi korban kekerasan; belum terdapat kelengkapan peralatan tes DNA; belum membudayanya pemahaman masyarakat tentang UU No. 23 Tahun 2004 dan PP No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO), belum terbentuk PPT Kecamatan; belum tersedia shelter (rumah aman) bagi korban kekerasan; belum terdapat fasilitas trauma center di RS dan belum optimalnya peran rohaniawan pendamping korban karena korban lebih banyak didampingi psikolog.

Untuk indikator jumlah SKPD melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) terealisasi sebanyak 30 SKPD dari target 54 SKPD. Capaian kinerja indikator ini statusnya adalah *Rendah* (tercapai 55,56%). Persentase keterlibatan perempuan dalam musrenbang dari 30% target yang direncanakan dapat tercapai 20%. Hal ini karena sebagian peserta musrenbang adalah kades/lurah dan aparatnya yang sebagian besar laki-laki. Untuk itu rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan dengan mengundang komponen masyarakat dari unsur perempuan pada Musrenbang yang akan datang.




### 3. URUSAN PANGAN

Urusan Pangan diampu oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari 1 program dan 12 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pangan pada tahun 2017.

**Tabel 2.111**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Pangan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
1	Jumlah sistem informasi pasar (buah)	1	1,00	1,00	100	Distankp	★
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal)	2000	2.000,00	2.209	110,45	Distankp	★
3	Penguatan cadangan pangan (ton)	150,4	150,20	183,25	122,00	Distankp	★
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)	71	51,00	46,90	91,96	Distankp	★
5	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	75	69,00	122,63	177,72	Distankp	★
6	Skor pola pangan harapan (%)	95,4	93,00	78,60	84,51	Distankp	➡
7	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	90	86,00	84,50	98,25	Distankp	★
8	Penanganan daerah rawan pangan (kejadian)	23	21,00	11,00	52,38	Distankp	⬇
9	Peraturan daerah /Perbup terkait ketahanan pangan (buah)	1	1,00	1,00	100	Distankp	★
10	Jumlah LDPM (lembaga)	7	6,00	7,00	>100	Distankp	★
11	Jumlah lumbung (lembaga)	39	29,00	29,00	100	Distankp	★
12	Jumlah sarana prasarana pengolahan (unit)	20	20,00	16,00	80,00	Distankp	➡

 Sangat Tinggi 
  Tinggi, Sedang 
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Distankp, 2017

Ketersediaan energi dan protein perkapita telah di atas target, yaitu 2202 kkal dibanding target hanya 2.000 kkal, sehingga mendapat status Sangat Tinggi (tercapai 110%). Hal ini dapat tercapai karena kondisi geografis Kabupaten Tegal yang memungkinkan pembudidayaan buah dan komoditi peternakan.

Indikator penguatan cadangan pangan juga telah di atas target, yaitu 183.25 poin dibanding target sebesar 150,1 poin dengan status capaian juga Sangat Tinggi (tercapai 143,82%). Hal ini dapat diwujudkan karena koordinasi yang intensif dengan banyak pihak, diantaranya Distanbunhut. Distanbunhut mengembangkan varietas padi andalan yaitu Pajale dan Sri yang hasilnya baik dan menguatkan cadangan pangan Kabupaten Tegal. Capaian kinerja yang baik juga ditunjukkan oleh indikator stabilitas harga dan pasokan pangan, dari target 66 terealisasi 97,67. Hal ini didukung oleh konsisi pasar yang stabil dan tidak terdapat gejolak harga yang signifikan.

Sementara sejumlah indikator lain masih yang hasilnya memuaskan, diantaranya skor Pola Pangan Harapan yang terealisasi 72,10% dibanding target sebesar 91,7% dengan status capaian Tinggi (tercapai 78,63%). Kondisi ini terjadi karena masih sedikit masyarakat yang melakukan diversifikasi pangan, dengan mengonsumsi makanan nonberas dan nonterigu. Namun, pada indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan telah mencapai hasil yang memuaskan yaitu dari target 84% terealisasi sebesar 85%.

#### 4. URUSAN PERTANAHAN

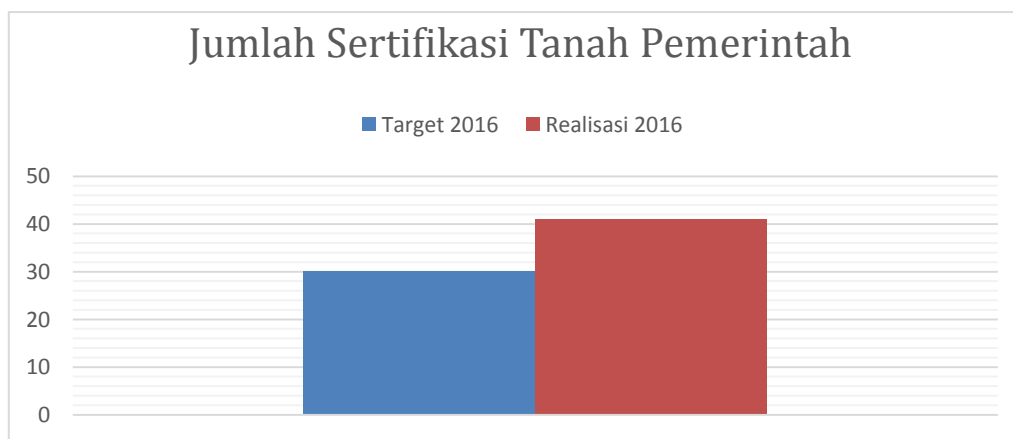
Indikator kinerja pada Urusan Pertanahan sebanyak 2 buah, dengan 2 program dan diampu oleh Disperkintaru. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pertanahan pada tahun 2017.

**Tabel 2.112**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Pertanahan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
1	<b>Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah</b>						
1	Jumlah sertifikasi tanah pemerintah	60	40,00	84,00	210	Disperkintaru	★
2	<b>Program Penataan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemilikan, dan</b>						
1	Penyediaan tanah untuk instansi pemerintah (bidang)	60	40,00	88,00	220	Disperkintaru	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.  
Sumber: Disperkintaru, 2017.

Dari 2 indikator kinerja Urusan Pertanahan, yaitu jumlah sertifikasi tanah pemerintah dan penyediaan tanah untuk instansi pemerintah (bidang) telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 ditetapkan target 40 sertifikat, dapat direalisasikan 84 sertifikat dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 210%). Berikut disajikan Gambar Jumlah Sertifikasi Tanah Pemerintah.



Gambar 2.8. Jumlah Sertifikasi Tanah Pemerintah  
Sumber : Disperkintaru Tahun 2017

Sementara target penyediaan tanah tahun 2017 adalah 40 bidang, namun baru terealisasi sebanyak 88 bidang sehingga status kinerjanya Tinggi (tercapai 220%). Sifat data bersifat kumulatif, sehingga capaian tahun 2017 juga memperhitungkan capaian tahun sebelumnya. Penyediaan tanah instansi terkait dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk melakukan penyediaan tanah. Apabila instansi dalam tahun berjalan tidak membutuhkan penyediaan tanah, maka indikator ini dilaksanakan sesuai kebutuhan instansi.

## 5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan hidup terdiri dari 8 program dan 14 indikator kinerja. Urusan Lingkungan Hidup diampu oleh DPU, DLH, DKPP, dan Distankp. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup tahun 2017.

**Tabel 2.113**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>						
1	Persentase TPA sesuai standar	34,63636	20	24	120	DLH	★
2	Persentase TPS sesuai standar	82,81	79,68	70	87,85	DLH	➡
3	Rasio Luas Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk	0,01459	0,01429	0,0132	91,73	DLH	★
4	Persentase sampah yang terangkut	72,25	71,25	77,6	108,91	DLH	★
5	Jumlah Bank Sampah	56	46	86	186,96	DLH	★
<b>2</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>						
1	Persentase UKL-UPL yang dipantau	70	60	156	260,00	DLH	★
<b>3</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>						
1	Jumlah Pengawasan terhadap perusahaan berdokumen LH	30	30	37	123,33	DLH	★
<b>4</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam</b>						
1	Persentase lahan kritis yang direhabilitasi	0,5	7,68	0,00	0,00	Distankp	⬇
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses</b>						



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
	<b>Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>						
1	Jumlah sistem informasi sumber daya alam dan LH	1	1	1	100,00	DLH	★
2	Jumlah Sarana / media penyampaian informasi lingkungan hidup	1	1	1	100,00	DLH	★
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>						
1	Persentase kawasan tercemar polutan udara	0,75	0,85	0,82	96,47	DLH	★
1	Persentase kawasan tercemar polutan air	3,75	3,95	3,81	98,96	DLH	★
<b>7</b>	<b>Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut</b>						
1	Jumlah kegiatan rehabilitasi pesisir	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	DKPP	★
<b>8</b>	<b>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>						
1	Persentase RTH dibanding luas wilayah di kawasan perkotaan	5,7	19,86	19,56	98,49	DPU	★
2	Jumlah RTP	1	1	3	300,00	DLH	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.  
 Sumber: DPU, DLH, Distankp, DKPP 2017.

Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan capaian kinerja TPA sesuai standar realisasi kinerjanya yaitu 41,70% berbanding 18,18% untuk persentase TPA sesuai standar. Dengan demikian indikator kinerja ini statusnya capaiannya Sangat Tinggi (tercapai 229,35%). Sementara untuk indikator TPS sesuai standar realisasinya 91,73% atau dengan status kinerja Sangat Tinggi. Capaian kinerja indikator persentase sampah terangkut juga baru, yaitu 77,6 % Hal ini antara lain di samping karena keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah bank sampah di masyarakat.

Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan juga terdapat indikator kinerja Jumlah Bank Sampah. Target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019 untuk tahun 2019 sebanyak 56 Bank Sampah, sedangkan target tahun 2016 sebanyak 41 bank sampah. Sampai dengan akhir tahun 2016 telah terbentuk bank sampah di Kabupaten Tegal sebanyak 86 bank sampah dan telah ditetapkan keberadaannya dengan SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Dengan demikian target untuk tahun 2017 maupun tahun 2019 telah terpenuhi. Namun demikian, proses pembinaan bank sampah harus terus dilaksanakan baik untuk menambah jumlah bank sampah di Kabupaten Tegal maupun untuk memastikan bank sampah yang telah didirikan bisa beroperasi secara maksimal.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, untuk indikator kinerja Persentase UKL-UPL yang dipantau, target yang ditetapkan untuk tahun 2017 sebesar 60 Perusahaan, sedangkan realisasinya sebesar 156 Perusahaan. Kondisi ini tentu menggembirakan bagi pelaksanaan indikator. Meski demikian masih perlu dilakukan penguatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan karena begitu banyaknya perusahaan yang harus dipantau, sementara aparat yang ada jumlahnya sangat sedikit sehingga untuk periode 1 tahun perlu dilakukan strategi agar cakupan pelayanan pemantauan UKL-UPL dapat sesuai target. Ke depan perlu peningkatan anggaran maupun personil sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Untuk Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, indikator kinerja Jumlah Pengawasan terhadap perusahaan berizin lingkungan, telah dilaksanakan pengawasan sebanyak 37 usaha/kegiatan dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 30 usaha/kegiatan yang termasuk target operasi maupun pengawasan terhadap sengketa /kasus lingkungan. Sementara pada Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, untuk indikator kinerja Jumlah sistem informasi sumber daya alam dan LH, target yang ditetapkan untuk tahun 2017 sebanyak 1 paket. Target ini telah tercukupi dengan adanya penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagai bagian dari sistem informasi sumber daya alam dan LH di Kabupaten Tegal. Indikator Kinerja Jumlah sarana/media penyampaian informasi lingkungan hidup untuk tahun 2017 telah terpenuhi melalui pameran lingkungan hidup, maupun sosialisasi.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi, untuk indikator kinerja Persentase kawasan tercemar polutan udara pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 1,1% dengan realisasi 0,82%, dengan status kinerja Tinggi (tercapai 77,77%). Target ini membutuhkan upaya keras karena kompleksitas permasalahan yang ada mengingat pencemaran ini akibat aktivitas usaha kecil yang telah digeluti masyarakat selama bertahun-tahun lamanya. Upaya yang telah dilakukan baru sebatas fasilitasi relokasi unit usaha yang menimbulkan pencemaran udara ke area yang menjauh dari permukiman warga, namun demikian ke depan perlu ditingkatkan fasilitasi alih teknologi yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat agar pencemaran udara dapat diminimalisir.

Untuk indikator Persentase Kawasan tercemar polutan air tahun 2017 ditargetkan sebesar 3,95%, dengan realisasi 3,81%. Target ini membutuhkan upaya keras dalam pencapaiannya. Hal ini disebabkan karena mayoritas terjadinya pencemaran air adalah akibat aktivitas industri kecil seperti industri tahu, tempe, dan batik. Pada tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Tegal memfasilitasi melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) maupun pembangunan biodigester baik dari ternak sapi maupun dari Pondok Pesantren. Akan tetapi semenjak tahun 2015, fasilitasi ini tidak dapat dilanjutkan akibat terganjal aturan hibah sehingga upaya penanganan pencemaran air khususnya yang diakibatkan oleh aktivitas usaha kecil tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ke depan diharapkan ada upaya swadaya masyarakat untuk bisa mengatasi pencemaran di lingkungan masing-masing sehingga tidak menimbulkan permasalahan kesehatan di lingkungan sekitar.

Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan capaian kinerja TPA sesuai standar realisasi kinerjanya yaitu 41,70% berbanding 18,18% untuk persentase TPA sesuai standar. Dengan demikian indikator kinerja ini statusnya capaiannya *Sangat Tinggi* (tercapai 229,35%). Sementara untuk indikator TPS sesuai standar realisasinya baru 35% dibanding target sebesar 79,68%, atau dengan status kinerja *Sangat Rendah* (tercapai 43,93%). Hal ini disebabkan oleh ketersediaan TPS dan sarana penunjang lainnya yang terbatas. Capaian kinerja indikator persentase sampah terangkut juga baru, yaitu 41,38% dibanding target sebesar 69,25%. Hal ini antara lain di samping karena keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah bank sampah di masyarakat.

Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan juga terdapat indikator kinerja Jumlah Bank Sampah. Target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019 untuk tahun 2019 sebanyak 56 Bank Sampah, sedangkan target tahun 2016 sebanyak 41 bank sampah. Sampai dengan akhir tahun 2016 telah terbentuk bank sampah di Kabupaten Tegal sebanyak 81 bank sampah dan telah ditetapkan keberadaannya dengan SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Dengan demikian target untuk tahun 2016 maupun tahun 2019 telah terpenuhi. Namun demikian, proses pembinaan bank sampah harus terus dilaksanakan baik untuk menambah jumlah bank sampah di Kabupaten Tegal maupun untuk memastikan bank sampah yang telah didirikan bisa beroperasi secara maksimal.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, untuk indikator kinerja Persentase UKL-UPL yang dipantau, target yang ditetapkan untuk tahun 2016 sebesar 55%, sedangkan realisasinya sebesar 60%. Kondisi ini tentu menggembirakan bagi pelaksanaan indikator. Meski demikian masih perlu dilakukan penguatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan karena begitu banyaknya perusahaan yang harus dipantau, sementara aparat yang ada jumlahnya sangat sedikit sehingga untuk periode 1 tahun perlu dilakukan strategi agar cakupan pelayanan pemantauan UKL-UPL dapat sesuai target. Ke depan perlu peningkatan anggaran maupun personil sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Untuk Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, indikator kinerja Jumlah Pengawasan terhadap perusahaan berdokumen LH, telah dilaksanakan pengawasan sebanyak 40 perusahaan lebih banyak dari target yang telah ditetapkan sebanyak 30 perusahaan. Sementara pada Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, untuk indikator kinerja Jumlah sistem informasi sumber daya alam dan LH, target yang ditetapkan untuk tahun 2016 sebanyak 1 paket. Target ini telah tercukupi dengan adanya penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagai bagian dari sistem informasi sumber daya alam dan LH di Kabupaten Tegal. Indikator Kinerja Jumlah sarana/media penyampaian informasi lingkungan hidup untuk tahun 2016 telah terpenuhi melalui pameran lingkungan hidup, maupun sosialisasi.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi, untuk indikator kinerja Persentase kawasan tercemar polutan udara pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 0,9% dengan realisasi 1,10%, dengan status kinerja *Tinggi* (tercapai 77,77%). Target ini membutuhkan upaya keras karena kompleksitas permasalahan yang ada mengingat pencemaran ini akibat aktivitas usaha kecil yang telah digeluti masyarakat selama bertahun-tahun lamanya. Upaya yang telah dilakukan baru sebatas fasilitasi relokasi unit usaha yang menimbulkan pencemaran udara ke area yang menjauh dari permukiman warga, namun demikian ke depan perlu ditingkatkan fasilitasi alih teknologi yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat agar pencemaran udara dapat diminimalisir.

Untuk indikator Persentase Kawasan tercemar polutan air tahun 2016 ditargetkan sebesar 3,95%, dengan realisasi 3,95%. Target ini membutuhkan upaya keras dalam pencapaiannya. Hal ini disebabkan karena mayoritas terjadinya pencemaran air adalah akibat aktivitas industri kecil seperti industri tahu, tempe, dan batik. Pada tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Tegal memfasilitasi melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) maupun pembangunan biodigester. Akan tetapi semenjak tahun 2015, fasilitasi ini tidak dapat dilanjutkan akibat terganjal aturan hibah sehingga upaya penanganan pencemaran air khususnya yang diakibatkan oleh aktivitas usaha kecil tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ke depan diharapkan ada upaya swadaya masyarakat untuk bisa mengatasi pencemaran di lingkungan masing-masing sehingga tidak menimbulkan permasalahan kesehatan di lingkungan sekitar.

Berdasarkan Data “Dokumen Penyusunan Strategi Pemenuhan RTH Kawasan Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015” diketahui bahwa Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau)

maupun RTP (Ruang Terbuka Publik) Di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut, Luas Kawasan Perkotaan seluas 31.205,99 Ha; total persentase RTH Publik dibanding Luas wilayah perkotaan sebesar 6,17% dan total persentase potensi RTH Publik sebesar 19,56%. Mendasari data tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa capaian/realisasi tahun 2016 Persentase RTH dibanding luas wilayah di kawasan perkotaan adalah sebesar 6,17%. Jadi merujuk pada target RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019 sebesar 5,7% maka capaian persentase RTH dibanding luas wilayah di kawasan perkotaan Kabupaten Tegal pada Tahun 2016 telah terpenuhi yaitu mencapai 6,17%. Hal ini juga berlaku bagi target capaian untuk persentase RTH dibanding luas wilayah di kawasan perkotaan pada tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 4,5% telah tercapai karena realisasi capaian total persentase RTH publik dibanding luas wilayah Perkotaan di Kabupaten Tegal tahun 2016 mencapai 6,17%.

Hal ini juga berlaku untuk RTP (Ruang Terbuka Publik), karena dari target RPJMD tahun 2019 maupun target tahun 2016 untuk jumlah RTP adalah 1. Hal ini dapat dilihat bahwa untuk kawasan perkotaan Slawi sebagai ibukota Kabupaten telah memiliki setidaknya 1 RTP yaitu Trasa. Di samping itu masih terdapat AAS dan RTH depan Rumdin Bupati Tegal sehingga totalnya sebanyak 3 RTP. Capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019 dapat dicapai karena untuk masing-masing wilayah perkotaan di Kabupaten Tegal masih memiliki RTH yang umumnya difungsikan sebagai Ruang Terbuka Publik. Sebagian besar RTH di wilayah perkotaan Kabupaten Tegal berupa lapangan. RTH di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tegal telah ditata menjadi lebih representatif, diantaranya RTH Kecamatan Dukuhwaru dan Kecamatan Margasari. Program Penataan RTH dilaksanakan sebagai instrumen untuk mencapai indikator kerja namun tidak setiap tahun dilaksanakan. Namun untuk pemeliharaan rutin (Khusus dikota Slawi) diintervensi melalui Kegiatan Pemeliharaan RTH.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja adalah tidak diakomodasinya usulan kegiatan dalam pembahasan dengan legislatif, terutama untuk pembangunan RTH pada kecamatan yang masih relatif tertinggal dibandingkan kecamatan yang lain di Kabupaten Tegal seperti Kecamatan Kedungbanteng dan Kecamatan Pagerbarang. Pembangunan atau penataan RTH di kedua kecamatan tersebut diarahkan agar memberikan *multiplier effect* bagi perkembangan perekonomian maupun pembangunan untuk dapat menumbuhkan ekonomi kreatif maupun sebagai wadah masyarakat dalam berinteraksi sosial maupun ekonomi.

Rencana tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan agar permasalahan dapat diatasi dan target kinerja dapat tercapai adalah sebagai berikut: perlu adanya dukungan data mengenai RTH maupun RTP yang valid dan *up to date* melalui Kegiatan Penyusunan Data Kondisi dan Strategi Pemenuhan RTH Kawasan Perkotaan di Kabupaten Tegal, sebagai dasar yang kuat maupun *blueprint* (cetak biru) bagi perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan RTH di Kabupaten Tegal yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan; dukungan anggaran yang cukup untuk penyediaan, penataan dan pemeliharaan RTH maupun RTP yang representatif untuk masyarakat Kabupaten Tegal; *capacity building* dan diseminasi peraturan maupun regulasi bagi personel dan *stakeholder* lainnya yang terkait dengan RTH maupun RTP di Kabupaten Tegal, khususnya di Seksi Pertamanan Bidang Tata Ruang Pertamanan dan Kebersihan DPU Kabupaten Tegal sebagai *leading* untuk RTH dan RTP di Kabupaten Tegal.

## **6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil terdiri dari 1 program dengan 4 indikator dan diampul oleh Disdukcapil. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

**Tabel 2.114**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017**  
**Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
1	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>						
1	Persentase penduduk memiliki KTP	100	100	73,42	73,42	Disudkcapil	
2	Persentase penduduk memiliki kartu keluarga	100	95	83,75	88,15	Disudkcapil	
3	Persentase penduduk memiliki akta kematian	30	15	0	0	Disudkcapil	
4	Persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	100	95	69,50	73,15	Disudkcapil	

Sangat Tinggi Tinggi, Sedang Rendah, Sangat Rendah.  
 Sumber: Disudkcapil, 2018.

Indikator persentase penduduk memiliki KTP terealisasi 73,42% dari target 100% atau sebanyak 791.992 jiwa penduduk, dengan demikian status kinerjanya Sedang. Namun begitu dari 1.078.655 jiwa penduduk yang wajib ber - KTP, ada sebanyak 978.108 jiwa penduduk (90,68 %) sudah melakukan perekaman dan sisanya 100.547 jiwa penduduk (9,32%) belum melakukan perekaman. Sedangkan indikator persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga terealisasi 83,75% dari target 95% dengan status kinerja Tinggi (tercapai 88,15%). Sedang persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran sebesar 69,50%, dari target yang ditetapkan sebesar 95%, atau dengan status kinerja Sedang (tercapai 73,15 %).

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan administrasi kependudukan antara lain akta kelahiran, akta kematian dan Kartu Keluarga sebelum tahun 2012 masih menggunakan sistem manual. Baru pada tahun 2012 menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Meskipun telah menggunakan SIK, untuk pencatatan akta kematian yang rendah karena minat masyarakat untuk mencatatkan kematian keluarganya juga rendah. Masyarakat mendaftarkan kematian keluarganya hanya ketika akan memproses waris secara resmi di pengadilan. Apabila waris diselesaikan secara kekeluargaan, masyarakat umumnya tidak membuat akta kematian bagi keluarganya yang telah meninggal. Pada tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerbitkan sebanyak 2.409 akta kematian. Tidak adanya data pembanding jumlah penduduk yang meninggal dunia menyebabkan persentase penduduk yang memiliki akta kematian tidak dapat dihitung. Untuk itu, selain sosialisasi mengenai pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perlu juga diinisiasi kemudahan-kemudahan dan insentif agar masyarakat dapat termotivasi mencatatkan administrasi kependudukannya.

## 7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA




Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diampu oleh Dispermasdes dengan 5 program dan 23 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2016.

**Tabel 2.115**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Pemberdayaan Masyarakat desa**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>						
1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi aktif	617	560,00	562,00	100,35	Dispermasdes	★
2	Jumlah paket pelatihan keterampilan TTG	1	1,00	1,00	100	Dispermasdes	★
<b>2</b>	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>						
1	Jumlah pelatihan pengelola Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	1	1,00	1,00	100,00	Dispermasdes	★
2	Jumlah gelar TTG Tingkat Nasional	1	1,00	1,00	100,00	Dispermasdes	★
3	Jumlah fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah pedesaan	1	1,00	1,00	100,00	Dispermasdes	★
4	Jumlah Kelompok Lembaga Ekonomi Masyarakat (UEDSP) yang difasilitasi	7	7,00	7,00	100,00	Dispermasdes	★
<b>3</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>						
1	Jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi	281	281,00	281,00	100,00	Dispermasdes	★
2	Jumlah UPK	13	13,00	13,00	100,00	Dispermasdes	★
3	Jumlah juara lomba desa	3	3,00	3,00	100,00	Dispermasdes	★
4	Jumlah TMMD manunggal sengkuyung Kab	2	2,00	2,00	100,00	Dispermasdes	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
	Tegal						
5	Jumlah penunjang kegiatan TMMD manunggal sengkuyung Kab. Tegal	2	2,00	2,00	100,00	Dispermasdes	★
6	Jumlah dukungan pelaksanaan TMMD Sengkuyung (2POA)	2	2,00	3,00	150,00	Dispermasdes	★
7	Jumlah penunjang kegiatan karya Bhakti TNI Kab. Tegal	4	4,00	6,00	150,00	Dispermasdes	★
8	Jumlah pelaksanaan Karya Bhakti TNI	4	4,00	6,00	150,00	Dispermasdes	★
9	Jumlah kader P3MD terlatih	54	54,00	738,00	1366,67	Dispermasdes	★
10	Jumlah desa penerima PDPM yang difasilitasi	281	281,00	281,00	100	Dispermasdes	★
11	Jumlah BKM	116	116,00	116,00	100,00	Dispermasdes	★
12	Jumlah BPD	281	281,00	281,00	100,00	Dispermasdes	★
13	Jumlah pencaangan kegiatan gerakan nasional bulan bhakti gotong royong	1	1,00	1,00	100,00	Dispermasdes	★
14	Jumlah Desa penerima alokasi Gerakan Cinta Desa	281	281,00	281,00	100,00	Dispermasdes	★
4	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>						
1	Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa	2	2,00	2,00	100,00	Dispermasdes	★
2	Jumlah tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang terfasilitasi	281	281,00	281,00	100,00	Dispermasdes	★
5	<b>Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan</b>						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
1	Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa	40	40,00	41	102,5	Dispermasdes	

 Sangat Tinggi 
  Tinggi, Sedang 
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dispermasdes, 2017

Pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terdapat sejumlah target kinerja, diantaranya Jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif dari target sebanyak 562 lembaga dapat direalisasikan sebanyak 562 lembaga, atau dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 105,44%).

Sementara indikator jumlah fasilitasi kemitraan swasta dan UMKM pedesaan ditargetkan 1 kali pada tahun 2017 terealisasi 1 kali dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 100%), yaitu pelaksanaan Pameran Hari Jadi Kabupaten Tegal. Kendala dalam fasilitasi kemitraan swasta dan UMKM pada Pameran hari Jadi Kabupaten Tegal adalah transaksi yang terjadi tidak bersifat langsung (harus pesan terlebih dahulu) sehingga tidak dapat dikawal dampak dari fasilitasi yang dilakukan. Untuk indikator jumlah lembaga ekonomi masyarakat (UED-SP) yang difasilitasi, dari target 7 telah terealisasi secara sempurna yaitu 7 pada tahun 2016 dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 100%).

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa menetapkan target 1 kali pencaangan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) dan terealisasi 1 kali pada tahun 2017. Sementara indikator paket pelatihan keterampilan TTG terealisasi 1 dari target kinerja 1 kali. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna (TTG) pada tahun 2017 yang diikuti oleh 120 peserta dengan capaian sangat tinggi, permasalahan yang dihadapi relatif tidak berarti karena kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh Bapermades. Untuk kegiatan Karya Bhakti TNI dilaksanakan di empat Perdesaan antara lain Desa Kebandingan Kecamatan Kedungbanteng, Desa Kabukan Kecamatan Tarub, Desa Timbangreja Kecamatan Lebaksiu dan Desa Gunungagung Kecamatan Bumijawa sedangkan Karya Bhakti Perkotaan di Desa Dukuhsalam dan Kelurahan Slawi Weta Kecamatan Slawi.

Indikator jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi sebanyak 281 desa, sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja target ini antara lain sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada kecamatan dan desa. Sementara itu indikator jumlah desa penerima PDPM yang difasilitasi telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 281 pada tahun 2017.












Pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa dilaksanakan sebanyak 2 kali dari target sebanyak 2 kali. Pelatihan dilakukan pada dengan menghadirkan perangkat desa. Sementara indikator kinerja penghasilan tetap kades dan perangkat desa yang terfasilitasi telah terlaksana sesuai target, yaitu kades dan perangkat desa di 281 desa yang dianggarkan melalui ADD.

## 8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 9 program dan 17 indikator kinerja dan diampu oleh DP3AP2KB dan Dinsos. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



**Tabel 2.116**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017**  
**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>						
	1 Peserta KB aktif	287.800	261.043	206.398	79,07	DP3AP2KB	
	2 Persentase DO	10,13	13,21	14,34	108,55	DP3AP2KB	
	3 Persentase Unmeet Need	13,77	13,97	13,67	97,85	DP3AP2KB	
<b>2</b>	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>						
	1 Jumlah sosialisasi KRR	300,00	300,00	200,00	66,67	DP3AP2KB	
<b>3</b>	<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>						
	1 jumlah tempat pelayanan kontrasepsi	65	61,00	62,00	101,64	DP3AP2KB	
<b>4</b>	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>						
	1 Rasio Akseptor KB	97,1	88,07	70,80	80,39	DP3AP2KB	
	2 Cakupan anggota UPPKS ber-KB	87	85,70	83,03	96,88	DP3AP2KB	
	3 Cakupan data mikro keluarga di desa setiap tahun	100	100,00	100,00	100,00	DP3AP2KB	
<b>5</b>	<b>Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat</b>						
	1 Cakupan Pos Pelayanan KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD aktif	80	70,00	78,00	111,43	DP3AP2KB	
	2 Rasio Kader KB (PPKBD dan sub PPKBD) Aktif	1	1,00	1,00	100,00	DP3AP2KB	
<b>6</b>	<b>Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</b>						
	1 Jumlah Pusat Konseling KRR	1	1	48	4.800,00	DP3AP2KB	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
7	<b>Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS</b>						
1	Jumlah pengidap Narkoba	372	351	25,00	192,87	Dinsos	
2	Jumlah pengidap PMS	476	452	N/A	N/A	Dinsos	N/A
3	Jumlah Pengidap HIV/AIDS	189	172	102,00	140,69	Dinsos	
8	<b>Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</b>						
1	Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak	1	1	1,00	100,00	DP3AP2KB	★
9	<b>Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</b>						
1	Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak	1	1	1,00	100,00	DP3AP2KB	★
10	<b>Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU</b>						
1	Jumlah BKB-Posyandu-PADU terintegrasi	92	62,00	60,00	96,77	DP3AP2KB	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: DP3AP2KB; Dinsos, 2017.

Jumlah peserta KB aktif terealisasi sebanyak 206.398 sementara targetnya sebanyak 261.043, atau dengan status capaian kinerja Tinggi (79,07%). Selain itu jumlah tempat pelayanan kontrasepsi tersedia relatif banyak, 62 tempat dari target sebanyak 61 tempat. Tempat pelayanan kontrasepsi tersebar di puskesmas, rumah bersalin, rumah sakit dan klinik bidan praktik.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program KB antara lain ketersediaan Penyuluh KB (PKB) yang terbatas. Dari jumlah yang terbatas itu hampir setiap tahun terdapat PKB yang pensiun dan tidak segera mendapat tambahan PKB baru. Keberadaan PKB dibantu dengan keberadaan Pos Pelayanan KB Desa (PPKBD) dan Kader PPKBD di desa. Indikator cakupan PPKBD dan Sub PPKBD aktif telah teralisasi sebesar 78%, dari target sebesar 70%. Begitu juga rasio kader KB pada PPKBD dan Sub PPKBD telah terpenuhi, yaitu 1 kader untuk 1 PPKBD dan Sub PPKBD.

Untuk indikator jumlah BKB-Posyandu-PAUD terintegrasi terealisasi 60 BKB, dari target tahun 2017 sebanyak 62 BKB dengan status capaian sangat tinggi (tercapai 96,77%). Saat ini

di setiap kecamatan telah terdapat minimal 1 BKB yang telah terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD. Permasalahan yang dihadapi adalah hubungan kelembagaan di desa yang seringkali kurang harmonis. Beberapa desa cenderung mengalokasikan anggaran untuk PAUD atau Posyandu saja, masih kurang memperhatikan anggaran untuk BKB.

## 9. URUSAN PERHUBUNGAN

Urusan perhubungan diampu oleh Dishub dan terdiri dari 4 program dengan 3 indikator. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perhubungan pada tahun 2017.

**Tabel 2.117**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Perhubungan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>						
1	Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78	76,00	75,33	99,12	Dishub	★
<b>2</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>						
1	Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78	76,00	75,33	99,12	Dishub	★
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>						
1	Persentase AKDP berijin	100	90,00	86	95,56	Dishub	★
2	Persentase kendaraan umum yang diuji KIR	67	61,00	76	124,59	Dishub	★
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.</b>						
1	Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78	76,00	75,33	99,12	Dishub	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dishub, 2018.

Dari laporan yang disampaikan Dishub, target kinerja pada semua indikator masing-masing telah mencapai hampir 100% (diatas 90%). Indikator persentase sarana perhubungan berfungsi baik dari target kinerja sebesar 76% terealisasi 75,33% dengan status kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 99,12%). Dengan demikian menurut Dishub, masih terdapat sarana perhubungan yang ada dalam kondisi relatif baik. Begitu juga persentase AKDP berizin dan persentase kendaraan umum yang diuji KIR, dari target kinerja masing-masing 90% dan 61% telah terealisasi masing-masing sebesar 86% dan 76% masing-masing berpredikat *Sangat Tinggi* (masing-masing tercapai 95,56% dan 124,59%). Menurut data Dishub, hanya sedikit AKDP yang belum memiliki izin dan terdapat beberapa kendaraan umum yang ada belum diuji KIR. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat dipastikan tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan target kinerja urusan Perhubungan di Dishub.

## 10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program dalam Urusan Komunikasi dan Informasi terdapat sebanyak 3 program dengan 5 indikator. Urusan Komunikasi dan Informasi diampu oleh Diskominfo. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika.

**Tabel 2.118**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Komunikasi dan Informatika**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2016
1	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>						
1	Jumlah layanan pemerintah secara elektronik	3	3,00	42,00	1.400,00	Diskominfo	★
2	Jumlah sistem informasi/ <i>website</i> instansi	54	52,00	64,00	123,08	Diskominfo	★
2	<b>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>						
1	Jumlah pelatihan bidang TIK	1	1,00	1,00	100	Diskominfo	★
3	<b>Program kerjasama informasi dan media massa</b>						
1	Jumlah kerjasama dengan media massa	6	6,00	6,00	100	Diskominfo	★
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi</b>						
1	Jumlah data base aktif	28	28,00	64,00	228,57	Diskominfo	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Diskominfo, 2018.

Jumlah layanan pemerintah secara elektronik terealisasi 42 layanan dari target sebanyak 3 layanan, dengan demikian status kinerjanya *Sangat Tinggi*. Layanan tersebut antara lain SPSE (Sistem Pelayanan Secara Elektronik), Sistem Keuangan Daerah, e-SIMPEG (Sistem Kepegawaian), e-SSH (Standar Satuan Harga), yang dapat diakses oleh masyarakat. Sementara jumlah SIM dan web yang ada pada tahun 2017 telah teralisasi dibanding target yang telah ditetapkan, yaitu 64 dibanding 52 SIM dan web, dengan status kinerja juga *Sangat Tinggi* (tercapai 123,08%). SIM yang terdapat di Kabupaten Tegal antara lain SIMDA, SIMPEG (SIM Pegawai), SIMPUS (SIM Puskesmas), SIMPERPUSARDA (SIM Perpustakaan Daerah), SIMWAS (SIM Pengawasan/Inspektorat), SIM Gaji (DPPKAD), SismiOP (Obyek Pajak), SIRUP (SIM Rencana Umum Pengadaan), LPSE, E-PROCUREMENT (Aplikasi LPSE/pengadaan barang/jasa/SPSE), SIM Angkutan, JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum-Bag. Hukum Setda), SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan-Disdukcapil), SIM Rumkit (SIM Rumah Sakit), SIMPATDA (SIM Pendapatan Daerah-BPKAD), SIM BMD (SIM Barang Milik Daerah-DPPKAD), e-SIMPEG (BKD), e-HUDIS (Hukuman Disiplin-BKD), e-KGB

(Kenaikan Gaji Berkala-BKD), e-PUPNS (e-Pendataan Ulang PNS-BKD) SIPPD (Bappeda), SISMONTPEPRA (Sistem Monitoring Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran-Bappeda), SIMAS (Sistem Informasi Masyarakat Miskin-Bappeda) 18 SIAK di Kecamatan.




Sementara web yang dikelola Diskominfo antara lain tegalkab.go.id, simdamentel.tegalkab.go.id, Webmail, Facebook, Youtube, Twiteer, Forum Diskusi, dan web keuangan daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan TIK di Kabupaten Tegal adalah ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas SDM yang masih rendah serta budaya TIK yang belum terbangun dengan baik. Ke depan, diharapkan pembangunan TIK dapat lebih berkembang di Kabupaten Tegal, untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan transparan kepada publik.

## 11. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari 5 indikator dan 2 program. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diampu oleh DisdagkopUKM. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

**Tabel 2.119**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
1	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>						
	1	Jumlah pelatihan kewirausahaan	4	4,00	3	75	Disdagkop UKM 
	2	Jumlah Wirausahawan Baru	35	25,00	59	472	Disdagkop UKM 
2	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>						
	1	Jumlah UMKM mengakses kredit perbankan	1.830 UMKM	1.820,00	24.754	1.360	Disdagkop UKM 
3	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>						
	1	Jumlah koperasi aktif	425	325,00	292,00	90	Disdagkop UKM 
	2	Jumlah BPR dan LKM aktif	25	585	12	NA	Disdagkop UKM NA

 Sangat Tinggi  Tinggi, Sedang  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disdagkop UKM, 2018.

Jumlah pelatihan kewirausahaan telah mencapai target yang diharapkan yaitu dari target semula 4 kali terealisasi 4 kali juga. Sementara itu, jumlah wirausahawan baru yang direncanakan sebanyak 35 UKM terealisasi sebanyak 20 UKM, dengan predikat kinerja Tinggi (tercapai 75%). Pada Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM, jumlah UMKM mengakses kredit perbankan kesulitan menyajikan data lengkap karena Dinkop UKM

Pasar sudah sangat intensif melakukan pendataan ke bank-bank yang ada di Kabupaten Tegal dengan terfasilitasinya UMKM mengakses kredit perbankan sebanyak 24.754. Untuk itu ke depan Dinkop UKM Pasar akan lebih proaktif melakukan pendataan pada bank-bank yang ada, tidak hanya menunggu laporan dari bank yang memang selama ini tidak pernah dilaporkan oleh bank.

Indikator jumlah koperasi aktif pada Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dari target 325 koperasi dapat direalisasikan sebanyak 292 koperasi yang aktif ditandai dengan aktivitas dan pelaksanaan RAT masing-masing koperasi. Status indikator kinerja ini Tinggi (tercapai 90%). Meskipun demikian untuk itu perlu dilakukan pembinaan lebih intensif oleh Dinkop, UKM, Pasar untuk mendorong kinerja koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Tegal. Koperasi-koperasi yang tidak aktif ini karena tidak memiliki daya saing dengan koperasi-koperasi yang sudah ada. Pembinaan oleh Dinkop, UKM, Pasar perlu diarahkan untuk meningkatkan daya saing koperasi-koperasi yang tidak aktif ini.

## 12. URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal terdiri dari 4 program dengan 9 indikator. DPMPTSP adalah OPD yang mengampu Urusan Penanaman Modal. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Penanaman Modal.

**Tabel 2.120**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Penanaman Modal**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>						
1	Jumlah investor PMA	4	3,00	4,00	133,33	DPM PTSP	★
2	Jumlah investor PMDN	3070	3.060,00	2.872	93,86	DPM PTSP	★
3	Jumlah nilai investasi PMA	48 miliar	45 Miliar	1.243 Miliar	2,762.56	DPM PTSP	★
4	Jumlah nilai investasi PMDN	825.500.000 ribu	785 Miliar	566 Miliar	72,14	DPM PTSP	★
5	Jumlah tenaga kerja baru yang terserap investasi PMA/PMDN	5000	4.670,00	18,507.00	396.30	DPM PTSP	★
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>						
1	Jumlah izin usaha dikeluarkan	6200	6.000,00	5.720,00	95,33	DPM PTSP	★
<b>3</b>	<b>Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah</b>						
1	Jumlah aparatur yang kompeten	27	25,00	35,00	140,00	DPM PTSP	★
2	Jumlah sistem informasi investasi	1	1,00	1,00	100,00	DPM PTSP	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
4	Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan						
1	Survei Indeks kepuasan pelanggan layanan perijinan	1	1,00	1,00	100,00	DPM PTSP	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ➡ Rendah, Sangat Rendah.  
 Sumber: DPM PTSP, 2018.

Capaian Kinerja Tahun 2017 pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi berupa Jumlah Izin Usaha yang diterbitkan diprediksi tercapai. Target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017 yaitu 6.000 Izin Usaha sedangkan pencapaian Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tegal telah mencapai 5.720 Izin Usaha dengan status capaian Tinggi (tercapai 95,33%). Jumlah Investor PMA dapat direalisasikan sebanyak 4 PMA dari target 3 PMA, sehingga kriteria indikator ini Sangat Tinggi (tercapai 133%).

Capaian Kinerja Tahun 2017 pada Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan berupa Survei Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Perizinan telah tercapai. Target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017 yaitu 1 Kali Kegiatan Per Tahun. Dinas PM dan PTSP Kab. Tegal telah melaksanakan Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai instrumen untuk mencapai indikator masing-masing kinerja adalah penyelenggaraan pameran investasi; penyebaran informasi pelayanan perizinan dan non perizinan termasuk tata cara pengaduan; penelitian kepuasan masyarakat serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Capaian kinerja outcome program urusan ini antara lain Jumlah Investor PMA dapat direalisasikan sebanyak 4 PMA dari target 3 PMA, sehingga kriteria indikator ini Sangat Tinggi (tercapai 133%). Nilai investasi PMA yang diperoleh juga di atas target, yaitu sebesar Rp. 1.243 miliar dari target sebanyak Rp. 45 miliar dan memperoleh predikat Sangat Tinggi (tercapai 2,762%).

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai indikator masing-masing kinerja adalah terbatasnya jumlah SDM Teknis dan IT serta kurang intensnya koordinasi dengan OPD terkait, khususnya dalam proses perizinan dan banyakkau persyaratan yang harus dipenuhi untuk terbitnya sebuah izin.

Rencana Tindak Lanjut yang dapat dilakukan antara lain dengan memenuhi SDM yang berkualitas di bidang teknis dan memiliki keahlian di bidang IT dan diharapkan kepada OPD terkait yang terlibat dalam Tim Teknis agar dapat memberikan dukungan secara intens khususnya kepada pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai anggota Tim Teknis untuk bertanggungjawab penuh memberikan rekomendasi proses perizinan.

### 13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan Kepemudaan dan Olahraga diampu oleh Disparpora. Urusan Pemuda dan Olahraga terdiri dari 4 program dan 10 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Kepemudaan dan Olahraga.

**Tabel 2.121**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Pemuda dan Olahraga**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>						
1	Jumlah pelatihan pemuda	9	8,00	11,00	137,50	Disparpora	★
2	Jumlah pemuda yang dilatih	450	390,00	492,00	126,15	Disparpora	★
3	Jumlah pemuda pelopor	252	216,00	279,00	129,17	Disparpora	★
4	Jumlah organisasi pemuda dibina	33	27,00	31,00	114,81	Disparpora	★
<b>2</b>	<b>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</b>						
1	Jumlah pelatihan kewirausahaan	1	1,00	1,00	100	Disparpora	★
<b>3</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>						
1	Jumlah kompetisi olahraga amatir	28	22,00	23,00	104,54	Disparpora	★
2	Jumlah kompetisi olahraga profesional	18	12,00	12,00	100	Disparpora	★
3	Jumlah atlet dibina	215	205,00	300,00	146,34	Disparpora	★
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>						
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	181	138,00	313,00	226,81	Disparpora	★
2	Jumlah sarana Prasarana Olahraga Masyarakat yang Berfungsi Baik	816	808,00	785,00	97,15	Disparpora	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disparpora, 2018.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan indikator program Jumlah pemuda yang dilatih dari target 390 orang dapat direalisasikan sebanyak 492 orang, dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 126,15%).

Sementara jumlah pemuda pelopor dan jumlah organisasi pemuda yang dibina dapat direalisasikan sebanyak 279 orang dari target 216 orang untuk pemuda pelopor dan 31 organisasi pemuda dari 27 target organisasi pemuda yang dibina. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pemuda pelopor dalam pembangunan masyarakat desa. Untuk itu diperlukan sosialisasi dan motivasi serta pembinaan kepada pemuda di Kabupaten Tegal.



Sementara untuk jumlah pelatihan kewirausahaan telah mencapai target capaian, yaitu 1 kali pelatihan dari target kinerja sebanyak 1 kali pelatihan juga. Meski demikian kurangnya sarana dan prasarana pelatihan kewirausahaan sedikit menghambat pelaksanaan program untuk lebih optimal lagi.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga untuk indikator jumlah atlet yang dibina baru sebanyak 300 atlet, sementara targetnya sebanyak 205 atlet. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga sudah meningkat; perkembangan prestasi pemuda dan olahraga; dan optimalnya pembinaan keolahragaan dan atlet-atlet berbakat. Ke depan, perlu dilakukan optimalisasi sarana dan prasarana olahraga masyarakat; penghargaan pada atlet yang berprestasi; serta fasilitasi olahraga bagi masyarakat penyandang cacat agar pembangunan bidang olah raga di Kabupaten Tegal dapat lebih semarak lagi.




Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga di tahun 2017 juga sudah berpredikat Sangat Tinggi. Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang berfungsi baik ditarget sebanyak 804 unit namun baru teralisasi 785 unit. Masih perlu dilakukan fasilitasi dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga masyarakat sehingga olahraga dapat menjadi kegiatan positif yang berkembang di masyarakat.

#### 14. URUSAN STATISTIK

Urusan Statistik diampu oleh Dinas Kominfo, terdiri dari 1 program dan 1 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Statistik.

**Tabel 2.122**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Statistik**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah						
1	Jumlah dokumen data statistik daerah yang terpublikasikan	30	6	6	100	Dinas Kominfo	

 Sangat Tinggi  Tinggi, Sedang  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinas Kominfo, 2018.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah terdiri dari 1 indikator, yaitu jumlah dokumen data statistik daerah yang terpublikasikan. Capaian kinerjanya sebanyak 6 dokumen dengan status capaian kinerja Sangat Tinggi (tercapai 100 %). Berikut disajikan Gambar Jumlah dokumen data statistik daerah yang terpublikasikan

Dokumen data statistik yang dipublikasikan berupa Kabupaten Tegal Dalam Angka (KDA), Nilai Tukar Petani (NTP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Harga Konsumen (IHK). Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan target kinerja ini adalah kurangnya ketepatan data dalam kompilasi sehingga rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kordinasi yang intens dengan SKPD lain sehingga data yang diperoleh lebih tepat, komplit dan up to date.

## 15. URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan Kebudayaan terdiri dari 3 program dan 11 indikator kinerja. Urusan Kebudayaan diampu oleh Dikbud. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kebudayaan tahun 2017.

**Tabel 2.123**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Kebudayaan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>						
1	Jumlah pertunjukan seni	3	3.00	6.00	200.00	Dikbud	★
2	Jumlah pameran seni	1	1.00	6.00	600.00	Dikbud	★
3	Jumlah misi/muhibah kesenian	1	1.00	16.00	1.600.00	Dikbud	★
4	Jumlah sarana pertunjukan seni	19	15.00	21.00	140.00	Dikbud	★
5	Jumlah pelaku seni yang dibina	3110	3110.00	3550.00	114.15	Dikbud	★
6	Jumlah kelompok kesenian yang dibina	397	360.00	331.00	91.94	Dikbud	★
7	Jumlah kebijakan pengembangan seni dan budaya	4	4.00	1.00	25.00	Dikbud	↓
8	Jumlah maestro seni	3	3.00	3.00	100,00	Dikbud	★
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>						
1	Jumlah BCB dan situs budaya yang dibangun/rehabilitasi	3	3.00	4.00	133.33	Dikbud	★
2	Jumlah naskah kuno yang dikaji	1	1.00	1.00	100.00	Dikbud	★
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>						
1	Jumlah pentas seni bukan asli Tegal	2	2.00	2.00	100.00	Dikbud	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinas Dikbud, 2018.

Capaian kinerja Urusan Kebudayaan menunjukkan variasi. Indikator kinerja yang status kerjanya Sangat Tinggi diantaranya jumlah pertunjukan seni sebanyak 25 kali, dari target sebanyak 6 kali.

Meski demikian jumlah pelaku seni yang dibina dan jumlah kelompok kesenian yang dibina realisasinya masih Sangat Rendah. Dari target 3.110 pelaku seni dibina, teralisasi 3.550. Sementara jumlah kelompok kesenian yang dibina, terealisasi 331 dari target 360 kelompok kesenian yang dibina.

Untuk itu diharapkan peran serta aktif masyarakat untuk memasyarakatkan seni dan budaya di Kabupaten Tegal. Terlebih kebudayaan merupakan salah satu misi dalam RPJMD tahun 2014-2019. Hal ini juga sesuai dengan kebijakan umum urusan kebudayaan adalah (1) Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai tradisional; (2) Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya; (3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya dan nilai-nilai tradisional.

## 16. URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan Perpustakaan terdiri dari 1 program dan 9 indikator. Urusan Perpustakaan diampu oleh Dinas Arpus. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perpustakaan.

**Tabel 2.124**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Perpustakaan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>						
1	Jumlah perpustakaan daerah	1	1	1	100	Dinas Arpus	★
2	Jumlah perpustakaan desa	41	31	55	100	Dinas Arpus	★
3	Jumlah perpustakaan instansi	54	48	43	89,58	Dinas Arpus	★
4	Jumlah perpustakaan keliling	2	1	3	300	Dinas Arpus	★
5	Jumlah perpustakaan rumah ibadah	16	12	16	133,33	Dinas Arpus	★
6	Jumlah perpustakaan silang terpadu	6	4	16	400	Dinas Arpus	★
7	Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah	40000	38.000	44.864	118,06	Dinas Arpus	★
8	Jumlah kunjungan perpustakaan daerah	21600	18.720	42.423	226,62	Dinas Arpus	★
9	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	13200	7.920	12.384	156,36	Dinas Arpus	★

★ Sangat Tinggi    ➡ Tinggi, Sedang    ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinas Arpus, 2018.

Capaian Kinerja Program (Outcome) ada 9 (sembilan) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebagian besar indikator kinerja telah terealisasi dengan baik dan berstatus sangat tinggi dan berstatus tinggi. Hambatan indikator kinerja yang tidak tercapai ada 3 yaitu :

1. Jumlah perpustakaan instansi dari target 48 OPD realisasi 43 OPD (89,58) status tinggi, masih kurang 5 OPD yang belum tercapai rencana akan di laksanakan pada tahun 2018, sehingga target kinerja perpustakaan instansi akan tercapai.




- Jumlah kunjungan perpustakaan daerah dari target 18.720 orang realisasi 15.777 orang (84,28) status tinggi, karena akhir tahun 2017 telah dilakukan stock opname sehingga pengunjung berkurang, selama stok opname buku perpustakaan tidak boleh dipinjamkan.
- Kunjungan perpustakaan keliling dari target 7.920 realisasi 12.384 (156,36%), Selain itu Dinas Arpusda juga mengembangkan perpustakaan desa, perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan instansi dn perpustakaan silang. Sehingga untuk meningkatkan cakupan pelayanan perpustakaan tidak hanya dilayani perpustakaan keliling.

## 17. URUSAN KEARSIPAN

Urusan Kearsipan diampu oleh Dinas Arpus. Indikator kinerja Urusan Kearsipan sebanyak 3, sementara programnya sebanyak 3 pula. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kearsipan

**Tabel 2.125**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Kearsipan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
1	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>						
1	Jumlah SKPD memiliki ruang arsip baik	54	54	48	88,89	Dinas Arpus	
2	<b>Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan</b>						
1	Jumlah sarana kearsipan SKPD berfungsi baik	54	54	48	88,89	Dinas Arpus	
3	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>						
1	Jumlah SKPD melakukan digitalisasi arsip	54	52	18	45	Dinas Arpus	

 Sangat Tinggi  Tinggi, Sedang  Rendah, Sangat Rendah.  
Sumber: Dinas Arpus, 2018.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal jumlah OPD Kabupaten Tegal menjadi 48 OPD, yang semula 54 OPD.

Dari Target Capaian RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah SKPD memiliki ruang arsip baik target 48 OPD terealisasi 48 OPD (100%).
- Jumlah sarana kearsipan SKPD berfungsi baik target 48 OPD terealisasi 48 OPD (100%).
- Jumlah SKPD melakukan digitalisasi arsip target 48 OPD terealisasi 18 OPD (37,5 %) status sangat rendah. Hal inikarena terbatasnya sarana dan prasarana seperti komputer dan scanner pada tiap – tiap OPD, dan keterbatasan SDM pengelola kearsipan.

Pada tahun 2018 rencana akan dilaksanakan pembinaan untuk menerapkan pengelolaan arsip secara digital di 30 OPD, sehingga target sampai dengan tahun 2018 tercapai.

## 2.2.3 FOKUS URUSAN PILIHAN

### 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indikator kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebanyak 14 dengan 8 program. Urusan Kelautan dan Perikanan diampu oleh DKPP. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan.

**Tabel 2.126**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Kelautan dan Perikanan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir</b>						
1	Nilai produksi perikanan laut (ribu Rp)	8.283.746	7.883.746	10.603.486	134,50	DKPP	★
2	Nilai produksi perikanan darat (ribu Rp)	1.564.155	14.641.550	75.021.174	512,38	DKPP	★
<b>2</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan</b>						
1	Jumlah kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan terbentuk	2	2,00	11,00	550,00	DKPP	★
1	Jumlah kegiatan masyarakat pengawasan sumber daya kelautan terlaksana	2	2,00	6,00	300,00	DKPP	★
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut</b>						
1	Jumlah pemberdayaan masyarakat	2	2,00	2,00	100,00	DKPP	★
<b>4</b>	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>						
1	Jumlah produksi perikanan darat (kg)	162,510	1.595.100	1.933.102,75	121,19	DKPP	★
<b>5</b>	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
	1 Jumlah produksi perikanan laut (kg)	1.006.905	1.005.405,00	1.441.201,00	143,35	DKPP	★
6	<b>Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan</b>						
	1 Persentase penyuluh perikanan memiliki kompetensi	93	87,00	88,00	101,15	DKPP	★
	2 Jumlah penyuluhan perikanan	18	12,00	17,00	141,67	DKPP	★
7	<b>Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>						
	1 Jumlah produksi perikanan laut (kg)	1006.905	1.005.405,00	1.441.201,00	143,35	DKPP	★
	2 Nilai produksi perikanan laut (ribu Rp)	8.283.746	7.883.746,00	10.603.486,00	134,50	DKPP	★
	3 Jumlah produksi perikanan darat (kg)	162.510	1.595.100,00	1.933.114,75	121,19	DKPP	★
	4 Nilai produksi perikanan darat (ribu Rp)	1.564.155	14.641.550,00	75.021.174,00	512,38	DKPP	★
8	<b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</b>						
	1 Penanaman mangrove (Ha)	121	117,00	117,00	100,00	DKPP	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: DKPP, 2018.

Realisasi capaian target indikator program nilai produksi perikanan laut pada tahun 2017 tercapai sebesar 134% dengan status capaian sangat tinggi. Tingginya nilai produksi ini disebabkan karena meningkatnya produksi perikanan laut pada tahun 2017 yang mencapai 1.441.201 kg dengan nilai produksi Rp. 10.603.486.000,-.

Pada tahun 2017 target indikator nilai produksi perikanan darat tercapai 512% dengan status capaian sangat tinggi. Tingginya persentase pencapaian target ini disebabkan selain meningkatnya produksi perikanan darat juga dipengaruhi oleh harga jual dari beberapa komoditas perikanan yang cukup tinggi salah satunya adalah harga udang vaname.

Persentase capaian target indikator jumlah produksi perikanan darat pada tahun 2017 mencapai 121% dengan status capaian sangat tinggi. Tingginya persentase pencapaian target produksi perikanan darat ini selain disebabkan karena berkembangnya jumlah pembudidaya ikan dan meningkatnya fungsi dari Balai Benih ikan (BBI). Selain itu juga didukung oleh kegiatan restocking di perairan umum.

Persentase capaian target indikator jumlah produksi perikanan laut pada tahun 2017 mencapai 143%. Tingginya capaian target jumlah produksi perikanan laut ini akibat dari meningkatnya sarana prasarana pelabuhan diantaranya lancarnya alur sungai, penambahan armada kapal dan meningkatnya sarana prasarana TPI Suradadi yang berdampak pada meningkatnya semangat para nelayan untuk melakukan aktifitas melaut (mayang).

## 2. URUSAN PARIWISATA

Urusan Pariwisata diampu oleh Disparpora. Terdapat 3 program dengan 6 indikator kinerja Urusan Pariwisata. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pariwisata pada tahun 2017.

**Tabel 2.127**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Pariwisata**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>						
1	Jumlah kunjungan Wisman	289	239	1.470	615,06	Disparpora	★
<b>2</b>	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>						
1	Jumlah promosi pariwisata	4	2,00	2,00	100	Disparpora	★
2	Jumlah kunjungan Wisatawan nusantara	426.081	422.081	1.052.487	249,36	Disparpora	★
4	Jumlah pemandu wisata budaya memiliki kompetensi (NonPNS)	1	1,00	2,00	200	Disparpora	★
<b>3</b>	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>						
2	Jumlah kampung wisata	4	4,00	4	100	Disparpora	★
3	Jumlah promosi wisata melalui media massa	3	2,00	2	100	Disparpora	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disparpora, 2018.

Indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah memenuhi target, yaitu 1.470 orang dibanding target sebanyak 239 orang, dengan status capaian Sangat Tinggi (tercapai 615,06%). Hal ini mengindikasikan bila pariwisata di Kabupaten Tegal cukup dikenal wisatawan mancanegara.

Selain itu capaian yang menggembirakan adalah jumlah kunjungan wisatawan nusantara, dari target sebanyak 422.081 orang, terealisasi 1.052.487 orang, atau dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 249,36%). Hal ini juga menunjukkan sektor pariwisata masih berpotensi untuk dikembangkan. Pada indikator jumlah kampung wisata juga telah melebihi

target yang diberikan pada tahun 2017, yaitu terealisasi 4 buah dari target 4 buah pada tahun 2017 ini, juga dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 100%). Membangun kampung wisata yang benar-benar eksis memang membutuhkan komitmen dan perhatian semua pihak, terutama pelaku pariwisata di Kabupaten Tegal dan pelaku pariwisata di tingkat nasional dan internasional.

### 3. URUSAN PERTANIAN

Urusan Pertanian diampu oleh Distankp dan DKPP. Urusan Pertanian terdiri dari 10 program dan 33 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pertanian pada tahun 2017.

**Tabel 2.128**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Pertanian**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>						
1	Jumlah sistem insentif pertanian	10	10,00	11	110	Dinas Tan & KP	★
2	jumlah petani yang terlatih pertahun	50	50,00	130	260	Dinas Tan & KP	★
3	Nilai Tukar Petani	112	110,00	105.01	95,46	Dinas Tan & KP	★
<b>2</b>	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perke bunan</b>						
1	Jumlah pasar induk pertanian	1	1,00	0	0	Dinas Tan & KP	↓
2	Jumlah promosi produk pertanian	4	4,00	4	100	Dinas Tan & KP	★
3	Jumlah petani bekerjasama dengan pelaku agribisnis	90	90,00	300	333	Dinas Tan & KP	★
4	Jumlah sarana prasarana infrastruktur pertanian	20	20,00	307	1.553,00	Dinas Tan & KP	★
5	Jumlah sistem informasi potensi pertanian	2	2,00	3	150,00	Dinas Tan & KP	★
<b>3</b>	<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perke bunan</b>						
1	Jumlah litbang/pemanfaatan litbang TTG pertanian yang dimanfaatkan	3	3,00	3	100,00	Dinas Tan & KP	★



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
	2	Jumlah penyuluhan TTG	4	4,00	5	125,00	Dinas Tan & KP	★
	3	Jumlah Rumah Pintar Petani (RPP)	5	4,00	15	375,00	Dinas Tan & KP	★
4	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perke bunan</b>							
	1	Jumlah produksi padi (ton) (GKG)	356.538	357.538,00	373.966	104,59	Dinas Tan & KP	★
	2	Jumlah produksi jagung (ton)	115.344	115.844,00	96.609	83,40	Dinas Tan & KP	➡
	3	Jumlah produksi kedelai (ton)	63	63	153	253,00	Dinas Tan & KP	★
	4	Jumlah produksi bawang merah (ton)	25.341	25.841	23.898	92,48	Dinas Tan & KP	★
	5	Jumlah produksi kentang (ton)	4.456	4.928,0	8.716	176,00	Dinas Tan & KP	★
	6	Jumlah produksi cabe (ton)	4.828	4928	5.948	120	Dinas Tan & KP	★
	7	Jumlah produksi kelapa (ton)	1.780	1.780,0	1.764	99,10	Dinas Tan & KP	★
	8	Jumlah produksi cengkeh (Ton)	106	51,00	0	0	Dinas Tan & KP	⬇
	9	Jumlah produksi Teh (Ton)	46	42	47,68	113,32	Dinas Tan & KP	★
	10	Jumlah produksi Tebu/Gula (Ton)	23.625	9.501,00	9,753	102,65	Dinas Tan & KP	★
	11	Jumlah produksi melati (ton)	9.486	6.800	5.194	76,58	Dinas Tan & KP	➡
5	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perke bunan lapangan</b>							
	1	Jumlah Penyuluh yang Lulus Sertifikasi	58	38,00	41	107,89	Dinas Tan & KP	★
	2	Jumlah Penyuluh Swadaya	187	140,00	155	110,71	Dinas Tan & KP	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
6	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>						
1	Persentase penurunan intensitas luas serangan OPT	1,14	1,15	0,00	0,00	DKPP	-
7	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>						
1	Jumlah produksi daging (kg)	5.808.587	5.798.587	9.784.502	168,74	DKPP	★
2	Jumlah produksi susu (liter)	719.950	717.950	713.428,00	99,37	DKPP	★
3	Jumlah produksi telur (kg)	4.954.109	4.944.109	10.249.993	207,32	DKPP	★
8	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</b>						
1	Konsumsi daging (Kg/kapita/tahun)	5,20	18,96	4,69	24,74	DKPP	↓
2	Konsumsi telur (Kg/kapita/tahun)	4,705	6,06	4,80	79,26	DKPP	→
3	Konsumsi susu (Kg/kapita/tahun)	0,410	16,47	0,43	2,61	DKPP	↓
9	<b>Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</b>						
1	Jumlah penerapan TTG peternakan	3	2,00	2,00	100,00	DKPP	★
10	<b>Program Pengembangan Peternakan</b>						
1	Jumlah Ternak terpelihara di Taman Satwa	28	24,00	66,00	275,00	DKPP	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinas Tan & KP; DKPP, 2018.

Capaian kinerja Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dapat dilihat dari salah satu alat ukur yang digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani yaitu Nilai Tukar Petani (NTP). Perkembangan Nilai Tukar Petani selama tahun 2017 (NTP= 102,72) berada di bawah target RPJMD senilai (NTP= 109). Hal ini berarti kemampuan/daya beli petani pada periode tahun 2017 lebih rendah dibandingkan keadaan pada tahun dasar. Selama tahun 2017 produksi padi dapat mencapai target produksi baik sesuai target RPJMD maupun target Nasional melalui gerakan upaya khusus pajale (Upsus Pajale). Peningkatan produksi padi dan peningkatan harganya memicu peningkatan penghasilan petani. Selain itu petani di sektor produk hortikultura khususnya bawang merah juga menikmati dari hasil peningkatan harga komoditi tersebut.

Indikator jumlah insentif pertanian pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani hampir memenuhi target. Dari rencana 10 jenis insentif baru terelisasi 9 insentif pertanian pada tahun 2017. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemenuhan target produksi dan mutu produk pertanian.

Indikator jumlah litbang/pemanfaatan litbang TTG pertanian yang dimanfaatkan telah sesuai target yang ditetapkan, yaitu 3 untuk pemanfaatan litbang TTG pertanian dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai Sangat Tinggi (tercapai 100%). Capaian kinerja Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dapat dilihat dari hasil pemanfaatan litbang pertanian pada beberapa kegiatan diantaranya (1) Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, berupa demplot budidaya tanaman cabe untuk pengendalian OPT terutama penyakit cabe (antraknosa/pathek). (2) Kegiatan Pengembangan Model usaha tani berbasis hamparan tersier padi, berupa demplot budidaya padi sistem jajar legowo dengan aplikasi probiotik (PGPR). (3) Kegiatan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/perkebunan berupa identifikasi, verifikasi dan sertifikasi tanaman buah unggulan Kab. Tegal yaitu duku Kesuben dan durian Jatinegara yang dilakukan oleh Balai Penelitian Sertifikasi Benih (BPSB Surakarta). Namun capaian kinerja kegiatan tersebut masih pada tahap verifikasi data jenis dan morfologi tanaman duku dan durian yang ada. Sementara Rumah Pintar Petani (RPP) terealisasi dari target 4 RPP dapat direalisasikan 6 RPP yaitu RPP yang berada di Lebaksiu.

Untuk indikator Jumlah Produksi Padi dari target 356.538 ton (GKG), dapat direalisasikan sebanyak 394.023. Status kinerja ini Sangat Tinggi (tercapai 110,52%). Meski demikian faktor iklim dan gangguan OPT perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada produksi pertanian.

Sementara untuk jumlah penyuluh yang lulus sertifikasi hanya 11 penyuluh dari target 38 penyuluh. Sementara jumlah penyuluh swadaya direncanakan 140 orang terealisasi 146 orang dengan status Sangat Tinggi (tercapai 104,29%). Hal ini disebabkan oleh persyaratan administrasi untuk menjadi penyuluh berertifikat yang belum terpenuhi. Untuk penyuluh swadaya, kendala yang dihadapi adalah rendahnya minat pemuda tani untuk menjadi petani dan menjadi penyuluh swadaya. Kaderisasi merupakan persoalan yang dihadapi Gapoktan di Kabupaten Tegal.

Dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019, program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak mempunyai indikator : Persentase penurunan intensitas luas serangan OPT (Organisma Penyakit Tanaman) dengan target tahun 2017 sebesar 1,15 Hektar. Pada kenyataannya Indikator tersebut tidak mencerminkan output dari kegiatan-kegiatan yang ada pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak atau dengan kata lain penggunaan indikator program kurang tepat.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak lebih tepat menggunakan indikator persentase ternak tervaksinasi atau persentase ternak terobati.

Oleh karena itu data capaian target indikator program tidak dapat disajikan karena data penurunan intensitas luas serangan OPT pada Dinas KPP tidak tersedia.

Pada tahun 2017, persentase capaian target indikator program peningkatan produksi hasil peternakan antara lain jumlah produksi daging (kg), jumlah produksi susu (liter), dan jumlah produksi telur (kg) tercapai dengan status pencapaian sangat tinggi bahkan jumlah produksi daging dan telur tercapai lebih dari 100%. Peningkatan produksi hasil peternakan ini didukung beberapa kegiatan antara lain kegiatan sentra peternakan rakyat, peningkatan sarana prasarana RPH penusupan dan pengolahan hasil peternakan.

Pada tahun 2017 persentase capaian target indikator program belum tercapai secara maksimal. Indikator konsumsi daging (Kg/kapita/tahun) dan konsumsi susu (Kg/kapita/tahun) mendapat status capaian sangat rendah. Sedangkan pada indikator konsumsi telur (Kg/kapita/tahun) mendapat status capaian tinggi.

Adapun faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian pada indikator konsumsi daging dan konsumsi susu ini disebabkan karena harga daging dan susu yang relatif lebih mahal dan juga faktor daya beli masyarakat yang masih rendah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan konsumsi daging dan susu antara lain melalui kampanye gemar makan daging dan minum susu.

#### 4. URUSAN PERDAGANGAN

Urusan Perdagangan terdiri dari 16 indikator kinerja dan 4 program. Urusan perdagangan diampu oleh Disdagkop UKM. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perdagangan padat tahun 2017.

**Tabel 2.129**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Perdagangan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan</b>						
1	Jumlah lembaga perlindungan konsumen	5	5,00	5,00	100	Disdagkop UKM	★
2	Persentase pengaduan konsumen ditangani	90	70,00	60,00	86	Disdagkop UKM	➡
3	Persentase alat ukur yang ditera	85	75,00	88,00	117	Disdagkop UKM	★
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>						
1	Nilai ekspor non migas (Rp)	121.280.610	117.280.610	209.619.490.505	178.733	Disdagkop UKM	★
2	Volume ekspor non migas (ton)	21000	18.500	61	339	Disdagkop UKM	★
3	Ekspor bersih perdagangan (Rp)	101.000.000	98.000.000	199.306.877.015	203	Disdagkop UKM	★
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>						
1	Jumlah pasar lelang daerah	1	1,00	1	100	Disdagkop UKM	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
2	Jumlah sistem informasi perdagangan	1	1,00	1	100	Disdagkop UKM	★
3	Jumlah pasar tradisional yang representatif	10 Pasar	6 Pasar	3	50	Disdagkop UKM	★
4	Jumlah retribusi pasar	26 pasar	26 pasar	26 pasar	100	Disdagkop UKM	★
5	Jumlah alat kebersihan pasar	5 unit	5 unit	26	520	Disdagkop UKM	★
4	<b>Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan</b>						
1	Jumlah kelompok pedagang kaki lima	55	45,00	47	104	Disdagkop UKM	★
2	Jumlah kelompok pedagang kaki lima dibina	14	10,00	16	160	Disdagkop UKM	★
3	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan	6.560	6.180,00	6.345	103,00	Disdagkop UKM	★
4	Jumlah kawasan PKL dan asongan	30	20,00	28,00	140	Disdagkop UKM	★
5	Jumlah kawasan PKL dan asongan yang dibina	20	13,00	18	138	Disdagkop UKM	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disdagkop UKM, 2018.

Pada program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan capaian kinerja jumlah lembaga perlindungan konsumen terdapat 3 lembaga, dari target sebanyak 5 lembaga. Lembaga perlindungan konsumen yang ada di Kabupaten Tegal antara lain BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), YAPEKNAS (Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional), LAPPEK (Lembaga Perlindungan Konsumen) dan LSM Merah Putih. Untuk indikator persentase alat ukur yang ditera sebanyak 70%, tercapai sesuai target sebesar 70%. Capaian kinerja yang menggembirakan ini dapat terwujud karena pemerintah semakin fokus menangani masalah perlindungan konsumen antara lain melalui pembentukan BPSK di Kabupaten Tegal. Disperindag juga aktif melakukan sosialisasi UU perlindungan konsumen di masyarakat maupun pelaku usaha serta mengenalkan BPSK kepada masyarakat. Hal ini dilakukan karena konsumen yang ada di masyarakat kita belum sepenuhnya cerdas sehingga mereka belum mengerti hak-hak mereka sebagai konsumen begitupun para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tegal kewajiban-kewajiban sebagai pelaku usaha.

Hal-hal yang masih perlu dilakukan diantaranya lebih mengintensifkan lagi sosialisasi Undang-undang Perlindungan Konsumen dan lebih mengenalkan BPSK di Kabupaten Tegal; lebih mengintensifkan pelaksanaan tera yang ada di wilayah Kabupaten Tegal selain menera pemilik UTTP di pasar, peneraan juga dilakukan pada alat ukur/kilometer pelanggan PDAM. Usaha lain yang perlu dilakukan adalah melaksanakan kegiatan pasar tertib ukur tingkat nasional yang diajukan adalah pasar Trayeman dan memperoleh penghargaan tingkat nasional. Hal ini karena kesadaran pemilik UTTP untuk menera alat UTTPnya masih rendah. Selain itu Kabupaten Tegal belum mempunyai UPTD meteorologi. Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan di masa yang akan datang adalah mengajukan pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Tegal menjadi pasar tertib ukur. Selain itu ke depan perlu diinisiasi wilayah Kabupaten Tegal menjadi daerah tertib ukur dan membentuk UPTD Meteorologi.

Capaian kinerja outcome program urusan ini antara lain Volume Ekspor Non Migas dari target 17.500 ton dapat direalisasikan sebanyak 1.074.243,00. Kriteria kinerja ini *Sangat Tinggi* (tercapai 6.138,53%). Indikator lainnya adalah Jumlah Kelompok PKL dibina, dari target 8 kelompok dapat direalisasikan 8 kelompok. Status capaian kinerja ini *Sangat Tinggi* (tercapai 100%).

Sementara program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dilakukan kegiatan pembinaan PKL dan asongan telah dilaksanakan adapun yang dibina adalah PKL dan asongan yang berada di Jalan Letjen Suprpto. Capaian kinerja program ini terhitung menggembirakan. Dari target 8 kelompok PKL yang dibina, pada tahun 2016 telah 8 kelompok PKL yang dapat dibina, atau telah mencapai target yang telah ditetapkan.



## 5. URUSAN PERINDUSTRIAN

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Disperinaker dengan 4 program dan 5 indikator kinerja. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perindustrian pada tahun 2017.

**Tabel 2.130**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPd Tahun 2017 Urusan Perindustrian**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
1	<b>Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</b>						
1	Jumlah pembinaan IKM	45	35	72	205,71	Disperinaker	★
2	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>						
1	Jumlah Izin Usaha IKM Baru	35	25	25	100		★
2	Jumlah kerjasama IKM	16	12	12	100	Disperinaker	★
3	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>						
1	Jumlah produk SNI	12	7	6	85,71	Disperinaker	➡

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
4	Program Penataan Struktur Industri						
1	Jumlah klaster industri aktif	17	11	10	90,9	Disperinaker	

★ Sangat Tinggi  Tinggi, Sedang  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disperinaker, 2018.

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, dilaksanakan oleh Disperinnaker dengan sasaran capaian jumlah pembinaan IKM. Oleh Disperinnaker, capaian sasaran jumlah pembinaan IKM ini tidak hanya dilakukan melalui program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi saja, Ketiga program lain juga turut menunjang untuk capaian sasaran ini. Dari target 35 IKM, jumlah IKM yang dibina pada tahun 2017 telah melebihi target dengan jumlah sebanyak 72 IKM yang meliputi 30 IKM Makanan Minuman di klaster makanan di daerah pariwisata yang meliputi Kec. Bojong dan Kec. Bumijawa, 20 IKM Kabupaten Tegal penerima sertifikasi halal, 20 IKM penerima fasilitasi pendaftaran merk, dan 2 IKM yang mendapat pendampingan GKM. Hasil lain yang dicapai dalam program ini adalah penambahan fasilitas mesin peralatan desain kemasan dan pengembangan prototype traktor combine. Untuk fasilitas mesin peralatan desain kemasan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan dalam bidang bidang kemasan produk bagi IKM Kabupaten Tegal. Sedangkan Pengembangan Prototype Traktor Combine, dimaksudkan untuk mendorong inovasi – inovasi teknologi tepat guna bagi IKM, khususnya yang bergerak di bidang logam dan permesinan.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, memiliki capaian sasaran jumlah izin baru IKM dan jumlah kerjasama IKM. Untuk jumlah izin baru IKM, target izin usaha IKM sebanyak 25, bisa dipenuhi. Saat ini terdapat 6 kelompok IKM binaan Disperinnaker yang sudah berbadan hukum diantaranya : Koperasi Logam RRT, Koperasi Logam Komponen Kapal Mandiri Sejahtera, Koperasi Logam Komponen Otomotif Tegal Manufactur Part, Koperasi Kayu Karya Jati, Koperasi Makanan Anggrek dan Koperasi Kerupuk Mie Barokah Mandiri. Sementara untuk usaha perseorangan, sebagian besar IKM yang menjadi binaan disperinaker sudah memiliki izin usaha dalam bentuk Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Sedangkan untuk jumlah kerjasama IKM, target sebanyak 12 dapat tercapai. Kerjasama tersebut meliputi : kerjasama IKM logam dengan PT.Komatsu, PT.Berdikari Metal Engineering, PT.Dharma Polymetal, PT.Sumitomo, PT.Lemigas, Polytron, PT. SAS Solo, Kerjasama dengan Yayasan Dharma Bhakti Astra, Kerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional, Kerjasama dengan SMK N 2 Bojonegoro, Kerjasama IKM Shuttlecock dengan PB.Djarum Kudus, dan Kerjasama IKM Makanan dengan PT.Trans Retail Indonesia.

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri , capaian kinerja pada masih belum optimal, tercapai 1 jumlah produk SNI, yakni produk Shuttlecock IKM Larissa, dari target sebanyak 7 produk SNI. Kendala utama tidak tercapainya sasaran program ini karena prosedur persyaratan untuk memperoleh SNI sangat rumit. Sektor IKM utamanya industri kecil, masih banyak kelemahan dari sisi produksi dan manajemen.. Disperinaker telah melakukan pembinaan rangka peningkatan kualitas produk baik melalui pendampingan- pendampingan. Sebagai rencana tindak lanjutnya adalah bekerja sama dengan BSN untuk memfasilitasi sertifikat SNI bagi 5 pelaku usaha yakni : IKM Kecap, IKM Alat Kesehatan, IKM Kompor Gas, IKM Bola Kaki, IKM Handsprayer.

Program Penataan Struktur Industri, menargetkan ada 11 klaster industri aktif pada tahun 2017. Secara umum, klaster industri di Kabupaten Tegal sudah berjalan namun belum optimal karena luasnya cakupan rantai nilai dalam klaster. Agar lebih optimal, dalam

membina klaster industri , pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perinnaker berfokus pada pendekatan sentra atau Kelompok Usaha Bersama. Bentuk pembinaan yang dilakukan dengan fasilitasi HAKI bagi IKM dalam klaster / sentra dan penerapan GKM. Klaster industri existing ada di Kabupaten Tegal adalah klaster industri komponen kapal, shuttlecock, komponen otomotif, batik, makanan ringan, tahu dan kerupuk mie. Sementara klaster / kelompok baru yang terbentuk diantaranya : Pagubuyuban IKM MAPAN, Kelompok Pengrajin Otomotif Tegal Manufacture Part dan Kelompok Pengrajin Makanan Sentra Pariwisata Kecamatan Bojong dan Bumijawa.

Dari target 30 IKM, jumlah IKM yang dibina pada tahun 2016 telah sesuai target, yaitu 30 IKM, atau dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 100%). Untuk Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dilakukan dalam bentuk pembinaan IKM. Dengan adanya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan bantuan hibah baik berupa uang maupun barang disyaratkan kelompok harus memiliki badan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut maka Disperindag memotivasi IKM untuk membuat badan hukum secara mandiri.

Capaian kinerja pada Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri juga telah mencapai target, yaitu dari target 5 produk SNI telah tercapai 5 produk SNI pula. Meskipun demikian, upaya mendorong pengrajin agar mendaftarkan produknya dan ber-SNI perlu terus didorong. Hal ini terjadi karena prosedur persyaratan untuk memperoleh SNI sangat ketat. Sektor industri kecil kapasitasnya masih lemah dan sistem mutu belum berjalan dengan baik sehingga berpengaruh terhadap kualitas produk. Disperindag telah melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas produk baik melalui sosialisasi maupun lewat uji laboratorium. Sebagai rencana tindak lanjutnya adalah fasilitasi sertifikat SNI wajib bagi industri kecil dari pemerintah

Pada Program Penataan Struktur Industri permasalahan yang dihadapi secara umum klaster industri berjalan aktif namun tidak maksimal dan melemahnya nilai tukar rupiah sehingga berpengaruh terhadap harga bahan baku. Pembinaan dalam bentuk peningkatan akses pasar dan fasilitasi uji laboratorium serta pembinaan lainnya telah dilakukan sehingga target 9 klaster industri telah tercapai pada tahun 2016. Klaster industri yang ada di Kabupaten Tegal antara lain klaster industri komponen kapal, *shutelcock*, komponen otomotif, batik, makanan ringan, tahu dan kerupuk mie.

## 6. URUSAN TRANSMIGRASI

Urusan transmigrasi terdiri dari 1 program dengan 2 indikator kinerja. Urusan Transmigrasi diampu oleh Disperinaker. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2017.

**Tabel 2.131**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPDTahun 2017 Urusan Transmigrasi**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
1	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>						
1	Jumlah kerjasama transmigrasi	1	1,00	1,00	100,00	Disperinaker	★
2	Jumlah transmigran	67	57,00	59,00	103,50	Disperinaker	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.  
Sumber: Disperinaker, 2018.



Untuk memberikan kesempatan pada masyarakat/keluarga yang tidak mempunyai aset/fasilitas tapi memiliki kemampuan untuk bekerjaterutama mengelolahan di bidang tanah dimungkinkan untuk mengikuti Transmigrasi diluar pulau Jawa. Capaian jumlah transmigran tahun 2017 bertambah 4 KK dari periode tahun sebelumnya. Permasalahan adanya pembatasan kuota dari ProvisinJateng mulai 2017 setiap Kabupaten/Kota hanya dapat kuota 4 KK.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai instrumen untuk mencapai indikator masing-masing kinerja adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan Kegiatan Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai indikator masing-masing kinerja adalah dengan ditiadakannya bantuan sosial maka para transmigran tidak mendapatkan modal untuk membuka lahan di daerah tujuan. Sering terjadi transmigran pulang ke daerah asal dikarenakan Pemerintah Daerah tujuan tidak menepati poin-poin dalam KSAD. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan agar permasalahan dapat diatasi dan target kinerja dapat dicapai adalah peningkatan anggaran untuk sharing pendanaan dalam pembangunan kawasan transmigrasi.

## 2.2.4 FOKUS URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

### 1. URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN




Urusan Administrasi Pemertintahan dari 15 program, 30 indikator dan diampu oleh Set DPRD, Setda, BPKAD. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Administrasi Pemertintahan.

**Tabel 2.132**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Administrasi Pemerintahan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
1	<b>Program peningkatan kapasitas perwakilan daerah lembaga rakyat</b>						
	1   Jumlah Perda ditetapkan	8	8,00	11,00	137,50	Set DPRD	★
	2   Rata-rata waktu (bulan) pembahasan Perda	1	1,00	1,08	91,00	Set DPRD	★
	3   Jumlah Perda inisiatif DPRD	1	1 Perda	1,00	100,00	Set DPRD	★
2	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah</b>						
	1   Jumlah koordinasi kepala daerah dengan Muspida/SKPD	60	60	52,00	86,67	Setda (Bag. Pem)	➡
3	<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan</b>						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
	<b>daerah</b>						
1	Rata-rata waktu (bulan) penyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah	4	4	4,00	100,00	Setda (Bag. Org)	★
2	Jumlah Standar Satuan Harga	1	1	1,00	100,00	Setda (Bag. Org)	★
3	Jumlah peraturan tentang APBD	4	4	6,00	150,00	BPKAD	★
		1 perda penetapan, 1 perda perubahan; 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan	1 perda penetapan, 1 perda perubahan; 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan	1 perda APBD, 1 perda perubahan APBD, 1 perbup penjabaran perubahan APBD, 1 perbup penggeseran APBD, 1 perda pertanggungjawaban APBD, 1 perbup penjabaran pertanggungjawaban APBD, perbup penatausahaan pelaksanaan APBD			
4	Jumlah sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah	2 (1 SIMDA Keuangan dan 1 SIMDA BMD)	2 (1 SIMDA Keuangan dan 1 SIMDA BMD)	2,00 (1 SIMDA Keuangan Online berbasis cloud server)	100,00	BPKAD	★
<b>4</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>						
1	Jumlah pedoman pengelolaan keuangan desa	2	2	2,00	100,00	Setda (Bag. Pem)	★
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>						
1	Jumlah kerjasama antar daerah	10	10	15,00	150,00	Setda (Bag. Pem)	➡

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan						
1	Jumlah raperda	10	10	22,00	220,00	Setda (Bag. Hukum)	★

 Sangat Tinggi 
  Tinggi, Sedang 
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Set DPRD; Setda; BPKAD; 2018.

Jumlah Perda ditetapkan sebanyak 11 Perda dari target 12 Perda pada tahun 2017, dengan demikian status kinerja indikator ini Sangat Tinggi (tercapai 91,67%).

Sementara indikator yang status kinerja rata-rata waktu (bulan) pembahasan Perda dari target yang direncanakan selama 1 bulan, realisasi di lapangan selama 1,08 bulan. Hal ini disebabkan oleh padatnya kegiatan DPRD sehingga waktu pembahasan Perda relatif kurang.

Pada Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ditetapkan 1 indikator kinerja, yaitu jumlah koordinasi kepada daerah dengan Muspida/SKPD. Dari target sebanyak 60 kali, realisasi pada tahun 2017 sebanyak 52 kali. Hal ini disebabkan oleh perubahan peraturan tentang pemberian uang representatif bagi Forkompinda yang semula dianggarkan melalui APBD namun juga dianggarkan melalui APBN sehingga APBD tidak direalisasikan karena terjadi duplikasi anggaran. Sementara untuk indikator rata-rata waktu (bulan) penyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah dan jumlah satuan standar harga telah sesuai dengan target kinerja, yaitu masing-masing 4 bulan dan 1 standar satuan harga. Hal ini karena perencanaan kegiatan dilakukan dengan baik dan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan time schedule yang ditetapkan.

Jumlah pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan sebanyak 5 pedoman pada tahun 2017, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 2 pedoman. Tidak ada permasalahan yang berarti dalam penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa. Sementara untuk indikator jumlah Raperda yang direncanakan 10 raperda telah direalisasikan sebanyak 22 Raperda dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 220%). Dalam penyusunan Raperda tidak ditemukan kendala yang berarti. Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan Raperda adalah pembahasan dengan SKPD pemrakarsa dan SKPD terkait Raperda, public hearing untuk menampung aspirasi stakeholders dan penyampaian Raperda menjadi Prolegda di DPRD. Kendala seringkali dijumpai dalam penyusunan Prolegda karena menyesuaikan dengan dinamika kerja DPRD.

Jumlah Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah direncanakan 4 peraturan dan direalisasikan sebanyak 6 peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan APBD 2017 dari penatausahaan, penetapan, pergeseran, perubahan sampai pertanggungjawaban APBD selama tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2017.

## 2. URUSAN PENGAWASAN

Urusan Pengawasan dari 3 program, 6 indikator dan diampu oleh Inspektorat. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pengawasan.

**Tabel 2.133**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Pengawasan**

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Akhir RPJMD (2019)	Target 2017	Realisasi 2017	Persentase Capaian (%)	Status Capaian 2017	
1	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>						
	1	Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	144	128	128	100,00	★
	2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	95,00	92,00	84,32	91,65	★
3	Opini WTP BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	<b>Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>						
		Jumlah aparatur pemeriksa memiliki kompetensi	35	26	43	165,38	★
		Jumlah pelatihan teknis aparatur pemeriksa	4	4	10	250,00	★
3	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>						
		Jumlah kebijakan/pedoman prosedur pengawasan	6	5	13	260,00	★

★ Sangat Tinggi    ➡ Tinggi, Sedang    ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tegal 2018.

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tegal dapat dilihat capaian pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu penyelenggaraan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Untuk melihat hal tersebut, penilaian capaian kinerja difokuskan pada 3 program utama yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Berdasarkan data capaian kinerja program, dalam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, pada indikator Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan terealisasi 128 obyek pengawasan dari target sebesar 128 obyek pengawasan atau tercapai sebesar 100 %. Pada indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan terealisasi sebesar 84,32 % dari target sebesar 92 % atau tercapai sebesar 91,65 %. Sedangkan pada indikator Opini WTP BPK, tercapai opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 yang diterima pada tahun 2017. Untuk opini LKPD Tahun 2017 baru didapatkan pada tahun 2018. Rendahnya capaian Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan disebabkan oleh banyaknya temuan

BPK yang sulit ditindaklanjuti/kadaluwarsa dan temuan pengembalian kerugian negara/daerah yang terkait dengan pihak ketiga. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengusulkan penghapusan temuan yang kadaluwarsa kepada BPK RI namun hingga saat ini belum ada keputusan. Permasalahan dalam pencapaian opini WTP untuk LKPD Tahun 2017 adalah penataan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan BPKAD yang belum selesai, tingginya temuan pemeriksaan BPK dan dan rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah percepatan kegiatan verifikasi dan rekonsiliasi aset tetap (BMD), peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kegiatan monitoring, evaluasi, konsultasi, revidu, dan audit, serta optimalisasi peran pendampingan Inspektorat dalam penyusunan LKPD melalui asistensi, monitoring, dan revidu.

Dalam Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, pada indikator Jumlah aparatur pemeriksa memiliki kompetensi tercapai 43 orang dari target sebesar 30 orang atau tercapai sebesar 143,33 %, dan pada indikator Jumlah pelatihan teknis aparatur pemeriksa terlaksana 10 pelatihan dari target 4 pelatihan atau tercapai 250 %. Pencapaian program ini tidak mendapatkan kendala karena terdapat peningkatan jumlah auditor dari pembentukan dan inpassing jabatan, dan banyaknya kegiatan pelatihan/diklat yang direncanakan pada tahun 2017 dengan anggaran yang mencukupi.

Dalam Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, hingga akhir tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Tegal telah menyusun 13 kebijakan/prosedur pengawasan yang terdiri dari Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Inspektur Kabupaten Tegal dari target sampai dengan akhir 2017 sebanyak 5 kebijakan/prosedur atau tercapai 260 %. Dalam program ini tidak terdapat kendala, dan faktor pendorong percepatan penyusunan kebijakan dan prosedur adalah berlakunya peraturan perundang-undangan dan upaya peningkatan kapabilitas APIP yang mengamanatkan pemerintah daerah menyusun beberapa kebijakan/prosedur tentang pengawasan.




### 3. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Urusan Perencanaan Pembangunan terdiri dari 9 program dan 9 indikator kinerja. Urusan Perencanaan Pembangunan diampu oleh Bappeda dan BPBD. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2017.

**Tabel 2.134**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Perencanaan Pembangunan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
1	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>						
1	Jumlah sistem informasi daerah aktif	3	3	3	100	Bappeda & Litbang	★
2	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>						
1	Jumlah kerjasama pembangunan yang termanfaatkan	5	5	7,00	140,00	Bappeda & Litbang	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
3	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh</b>						
1	Jumlah kebijakan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang telah ditindaklanjuti	4	4	4	4	Bappeda & Litbang	★
4	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar</b>						
1	Cakupan pelayanan SPAM di kota kecamatan	18	12	16,00	133,33	Bappeda & Litbang	★
5	<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>						
1	Jumlah aparatur perencana kabupaten yang memiliki kompetensi perencana	15	12	12,00	100,00	Bappeda & Litbang	★
6	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>						
1	Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	11	2	2,00	100,00	Bappeda & Litbang	★
7	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>						
1	Jumlah klaster yang difasilitasi	30	20	25,00	125,00	Bappeda & Litbang	★
8	<b>Program perencanaan sosial budaya</b>						
1	Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang diimplementasikan	5	5	6,00	120,00	Bappeda & Litbang	★
9	<b>Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana</b>						
1	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	2	2	6,00	100,00	BPBD	★

 Sangat Tinggi
  Tinggi, Sedang
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Bappeda & Litbang, BPBD, 2018.

Indikator jumlah sistem informasi daerah aktif teralisasi 3 sistem informasi daerah aktif dari target kinerja 3 sistem informasi daerah aktif, atau dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 100%). Sistem informasi daerah aktif meliputi SIPD (Sistem Informasi Profil/Pembangunan Daerah), SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Simas (Sistem Informasi Masyarakat Miskin). Kendala yang dihadapi dalam penyediaan sistem informasi daerah aktif adalah kurangnya SDM, komunikasi dan ketidaksepahaman dalam berjejaring dengan SKPD terkait.

Untuk indikator jumlah kerjasama pembangunan yang termanfaatkan tercapai 7 kerjasama dari target 5 kerjasama dengan demikian indikator ini berpredikat Sangat Tinggi (tercapai 140%). Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama pembangunan dengan IPB, BPPT, Kemendikbud, UPS, UGM, Unsoed dan Universitas Guna Dharma. Pada indikator jumlah kebijakan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang telah ditindaklanjuti belum ada. Hal ini karena kebijakan yang ada saat ini masih bersifat makro (dalam lingkup Kabupaten) dan belum ada kebijakan satu sektor (lingkup kecamatan). Sedangkan indikator cakupan Pelayanan SPAM di Kota Kecamatan telah tercapai 16 Kecamatan dari target 12 kecamatan atau dengan predikat Sangat Tinggi (tercapai 133,33%). Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan indikator ini adalah beberapa kecamatan memiliki kontur yang relatif susah untuk penyediaan SPAM dan belum disertai adanya saluran SPAM di setiap kecamatan.

Jumlah Aparatur Perencana Kabupaten yang memiliki kompetensi perencana adalah 12 orang, telah mencapai target yaitu 12 orang dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 100%). Permasalahan yang dihadapi adalah minat yang rendah terhadap jabatan fungsional termasuk fungsional perencana. Untuk itu rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu dengan arahan dan dorongan dari pimpinan kepada karyawan/wati agar mengikuti diklat fungsional dimaksud. Jumlah Dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu ada 2, yaitu RKPD dan RKPD Perubahan. Untuk mewujudkan indikator ini realtif tidak ditemui hambatan.

Indikator jumlah klaster yang difasilitasi adalah 16 klaster, sementara target indikator ini sebanyak 20 klaster. Pelaksanaan indikator ini melalui program perencanaan pembangunan ekonomi, kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi (FEDEP). Permasalahan yang dihadapi adalah keseriusan semua pihak dalam upaya mempertahankan klaster dan meningkatkan status sentra menjadi klaster.

Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang diimplementasikan sebanyak 6 dokumen terdiri dari RAD MDG's, RAD PUS, SPKD, RAD PPK (RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi), Masterplan TIK, dan Kajian Pengembangan Situs Samedo. Jumlah ini di atas target sebanyak 5 dokumen, sehingga capaian kinerjanya Sangat Tinggi (tercapai 120%). Indikator ini dicapai melalui kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS).

Sementara untuk indikator jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana telah tercapai 6 dokumen dari target 2 dokumen.

#### 4. URUSAN KEUANGAN

Urusan Keuangan dari 1 program, 3 indikator dan diampu oleh BPKAD. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pengawasan.

**Tabel 2.135**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Keuangan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
3	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>						
1	Rata-rata waktu Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah	4 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	100	BPKAD	★
2	Jumlah Peraturan tentang APBD dan aset	7	7	7	100	BPKAD	★
		1 Perda APBD, 1 perda perubahan APBD, 1 perbub penjabaran penetapan APBD, 1 perbub penggeseran APBD, 1 perda pertanggungjawaban APBD, 1 perbub pengelolaan BMD,	1 Perda APBD, 1 perda perubahan APBD, 1 perbub penjabaran penetapan APBD, 1 perbub penggeseran APBD, 1 perda pertanggungjawaban APBD, 1 perbub pengelolaan BMD,	1 Perda APBD, 1 perda perubahan APBD, 1 perbub penjabaran penetapan APBD, 1 perbub penggeseran APBD, 1 perda pertanggungjawaban APBD, 1 perbub pengelolaan BMD,			
3	Jumlah sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah	2 (1 SIMDA keuangan dan 1 SIMDA BMD)	2 (1 SIMDA keuangan dan 1 SIMDA BMD)	4 (1 SIMDA keuangan Online berbasis cloud server, 1 SIMDA BMD), SP2D Online, e-BTL	200	BPKAD	★

★ Sangat Tinggi    ➡ Tinggi, Sedang    ↓ Rendah, Sangat Rendah.  
Sumber: BPKAD, 2018.



BPKAD sebagai Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah mempunyai indikator pada Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- 1) Rata-rata waktu Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 2) Jumlah Peraturan tentang APBD dan Aset Daerah
- 3) Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan capaian kinerja sangat tinggi masing masing 100%, 100% dan 150%.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penunjang pengelolaan pendapatan untuk tahun ini memperoleh prestasi yang patut dibanggakan dalam rangka penggalan pendapatan daerah khususnya pajak bumi dan bangunan yang selama ini tidak pernah mencapai target, tetapi pada tahun 2017 telah mencapai target realisasi sebesar 105,16 % dan untuk BPHTB mencapai target realisasi sebesar 132,44 %.

Pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebanyak 11 macam pajak daerah dengan target setelah perubahan sebesar Rp. 87.429.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 97.209.063.740,- ( 111,19 %).

Dipenghujung tahun 2017 (Desember 2017) BP2D Kabupaten Tegal telah meloungching aplikasi pajak online via smartphone yang ada pada goggle play ( Info PBB – Info PBB Kab Tegal). Terobosan ini dalam rangka memudahkan wajib pajak melihat dan membayar kewajiban PBBnya.




## 5. URUSAN KEPEGAWAIAN

Urusan Keuangan dari 3 program, 11 indikator dan diampu oleh BKD. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pengawasan.

**Tabel 2.136**  
**Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2017 Urusan Kepegawaian**

No	Indikator Kinerja Program (Outcame)	Target Akhir RPJMD (2019)	Target 2017	Realisasi 2017	Persentase Capaian (%)	OPD	Status Kinerja 2017
<b>1</b>	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>						
	Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan	200 PNS (II=11, III=36, IV=153)	40 PNS (II=0, III=8, IV=32)	51 PNS (II=0, III=8, IV=43)	127,50	BKD	★
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya</b>						
	Jumlah Peserta Diklat Teknis	70 PNS	60 PNS	62 PNS	103,33	BKD	★
	Jumlah Peserta Diklat Fungsional	40 PNS	30 PNS	172 PNS	573,33	BKD	★
	Persentase Jabatan Struktural yang Terisi	94,00%	94,00%	93,78%	99,76	BKD	★
	Persentase CPNS yang mengikuti Prajabatan Diklat	100,00	100,00	0	0	BKD	↓
<b>3</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>						
	Jumlah CPNS	2.000 CPNS	1.400 CPNS	252 CPNS	18,00	BKD	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Akhir RPJMD (2019)	Target 2017	Realisasi 2017	Persentase Capaian (%)	OPD	Status Kinerja 2017
	Jumlah PNS Tugas Belajar	24 PNS	24 PNS	5 PNS	20,83	BKD	★
	Jumlah Kasus Kepegawaian	40 kasus	45 kasus	26 kasus	173,08	BKD	★
	Jumlah PNS yang mendapat Hukuman Disiplin	20 PNS	22 PNS	21 PNS	104,76	BKD	★
	Jumlah Pejabat Struktural yang dinilai kompetensinya	6 Pejabat	6 Pejabat	44 Pejabat	733,33	BKD	★
	Jumlah Jabatan Fungsional Baru (non Guru dan Kesehatan)	43 JF	21 JF	22 JF	104,76	BKD	★

 Sangat Tinggi 
  Tinggi, Sedang 
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: BKD, 2018.

## a) Program Pendidikan Kedinasan

### 1) Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan

Pada tahun 2017 jumlah peserta Diklatpim adalah sejumlah 51 orang dari target 40 orang dan capaian kinerjanya adalah 127,50%. Indikator peserta diklat pim dipengaruhi oleh alokasi anggaran, sehingga semakin besar anggaran yang disediakan maka akan semakin tinggi realisasi kinerja yang diperoleh. Terdapat ± 241 pejabat yang belum mengikuti Diklat pim merupakan salah satu permasalahan tersendiri karena kegiatan ini adalah pengiriman peserta ke lembaga Diklat dengan berkontribusi pendanaannya. Dibutuhkan dana ± Rp 7.389.375.000,- belum termasuk adanya penambahan pejabat yang promosi.

## b) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

### 1) Jumlah Peserta Diklat Teknis

Jumlah Peserta Diklat Teknis ditargetkan untuk mengirimkan 60 orang peserta Diklat Teknis. Untuk mencapai target tersebut, BKD telah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal pola cost sharing/pengiriman dengan realisasi 62 peserta Diklat dengan capaian kinerja 103,33 %. Tidak ada permasalahan yang menonjol dalam indikator kinerja ini, selain belum maksimalnya BKD sebagai Instansi Teknis bidang Kediklatan.

### 2) Jumlah Peserta Diklat Fungsional

Jumlah Peserta Diklat Fungsional ditargetkan untuk mengirimkan 30 orang peserta Diklat dengan realisasi jumlah peserta Diklat Fungsional sebanyak 172 orang dengan capaian kinerja sebesar 573,33%. Diklat fungsional tersebut antara lain Diklatsar Satpol PP, Diklatsar dan penjenjangan Jabfung, Diklat Jabfung pola cost sharing, Diklat kearsipan elektronik, diklat manajemen kepegawaian dan dan diklat service excellent. Meskipun capaian dari indikator kinerja ini sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan, BKD masih terkendala dengan belum terwujudnya kebijakan Diklat Satu Pintu. Padahal diklat fungsional sangat dibutuhkan bagi para Pejabat Fungsional Tertentu dalam proses kepangkatannya.

### 3) Persentase jabatan struktural yang terisi

Indikator kinerja presentase jabatan struktural yang terisi ditargetkan sebesar 94%. Untuk mencapai target tersebut, BKD telah melaksanakan kegiatan Pangangkatan dan Pengisian Jabatan Struktural dan kegiatan Rekrutmen Calon Pejabat Kabupaten Tegal melalui seleksi terbuka dengan realisasi sebesar 92,36% jabatan struktural yang terisi, dengan capaian kinerja sebesar 98,26% dari target yang telah ditetapkan.

#### **4) Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan**

Terhitung mulai 01 Maret 2017 terdapat 252 CPNS pengalihan dari Kemenkes sejumlah 224 CPNS Formasi Bidan, dan dari Kementan sejumlah 28 CPNS Formasi Penyuluh Pertanian. Sehubungan dengan keterbatasan dana dan waktu, maka tahun 2017 tidak melaksanakan diklat Prajabatan bagi CPNS sehingga realisasi kinerja indikator ini adalah 0%. Tahun 2018 direncanakan akan dilaksanakan Diklat Prajabatan bagi CPNS tersebut baik dengan pola pengiriman maupun penyelenggaraan.

#### **c) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

##### **1) Jumlah CPNS**

Pada Tahun 2017, indikator kinerja Jumlah CPNS ditargetkan sebesar 1.400 orang namun hanya terealisasi sejumlah 252 CPNS yang merupakan pengalihan dari Kemenkes dan Kementan, sehingga hanya terealisasi sejumlah 18%. Surat Menpan & RB Nomor : B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN Tahun 2015 merupakan kendala utama dalam pencapaian indikator kinerja ini mengingat penambahan pegawai merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Upaya yang telah dilaksanakan adalah dengan pengurangan pagu anggaran 2017 pada perubahan anggaran dan mengajukan pencabutan moratorium CPNS dan melaporkan kekurangan pegawai kepada KemenPAN RB.

##### **2) Jumlah PNS Tugas Belajar**

Indikator kinerja Jumlah PNS Tugas Belajar ditargetkan sejumlah 24 orang dan terealisasi hanya 5 orang Tugas belajar baru. Selain rendahnya minat PNS yang mendaftar, indikator ini juga dipengaruhi oleh jumlah lembaga pemerintah pusat yang memberikan beasiswa tugas belajar. Hal ini karena Pemda tidak dapat memberikan bantuan belajar secara full karena keterbatasan dana. Kerjasama dengan instansi pusat dan perguruan tinggi terus dilakukan selain sosialisasi kepada PNS dalam rangka menarik minat dan sungguh-sungguh mengikuti seleksi tugas belajar.

##### **3) Jumlah kasus kepegawaian**

Jumlah kasus kepegawaian pada tahun 2017 ditargetkan sejumlah 45 orang. Untuk mencapai target tersebut, BKD telah melaksanakan kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, pembinaan disiplin pegawai, dan pengelolaan presensi pegawai dengan realisasi sejumlah 26 kasus kepegawaian yang ditangani oleh BKD, dengan capaian kinerja sebesar 173,08% dari target yang telah ditetapkan. Target kinerja ini merupakan target negatif, dimana realisasi yang lebih rendah dari target yang telah ditetapkan merupakan prestasi.

##### **4) Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin**

Pada tahun 2017, indikator kinerja jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin ditargetkan sejumlah 22 orang. Untuk mencapai target tersebut, BKD telah melaksanakan kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan pembinaan disiplin pegawai serta pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang terkena sakit menahun dengan realisasi sejumlah 21 PNS yang mendapat hukuman disiplin dari 25 kasus yang tertangani, dengan capaian kinerja sebesar 104,76% dari target yang telah ditetapkan. Adapun rincian realisasi hukuman disiplin adalah hukuman disiplin tingkat ringan 5 pegawai, hukuman disiplin tingkat sedang 4 pegawai, dan hukuman disiplin tingkat berat 12 pegawai.

## 5) Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya

Pada tahun 2017, indikator jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya ditargetkan sejumlah 6 orang dengan realisasi sejumlah 44 orang (733,33%). Uji kompetensi bagi pejabat struktural dilaksanakan sebagai bagian dari proses seleksi terbuka JPT Pratama dan proses evaluasi bagi pejabat JPT Pratama.

## 6) Jumlah jabatan fungsional baru (non guru dan kesehatan)

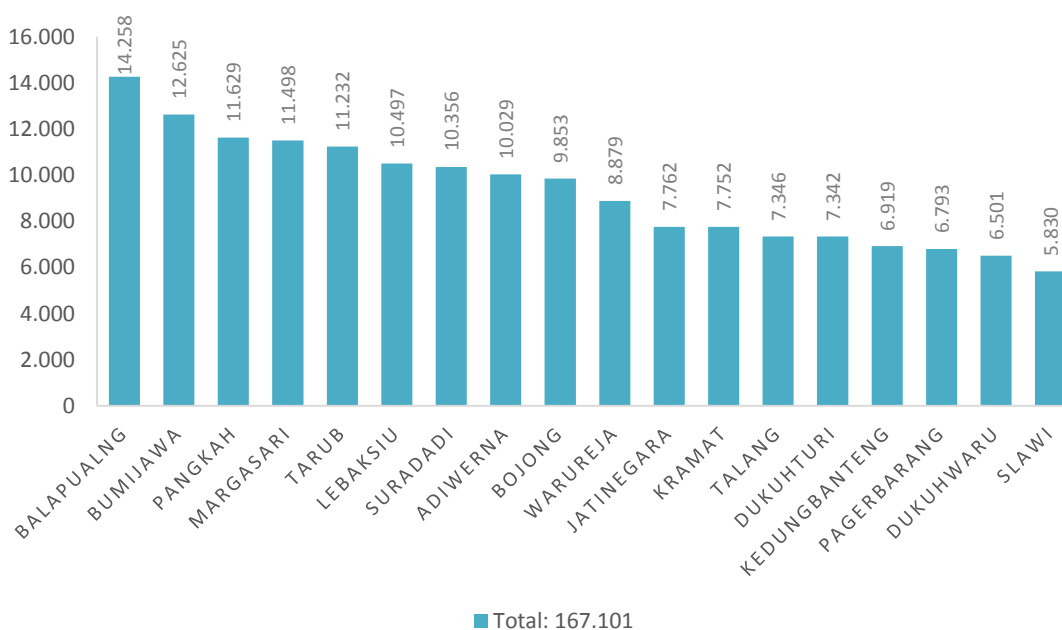
Jumlah jabatan fungsional baru (non guru dan kesehatan) ditargetkan sejumlah 21 orang. Untuk mencapai target tersebut, telah dilaksanakan Kegiatan Penataan Jabatan Fungsional Khusus (JFK) dan Kegiatan Penataan Administrasi Mutasi, Evaluasi dan Alih Fungsi PNS dengan realisasi sejumlah 22 jabatan fungsional baru (non guru dan kesehatan), dengan capaian kinerja sebesar 104,76% dari target yang telah ditetapkan.

### 2.3. Data Kewilayahan

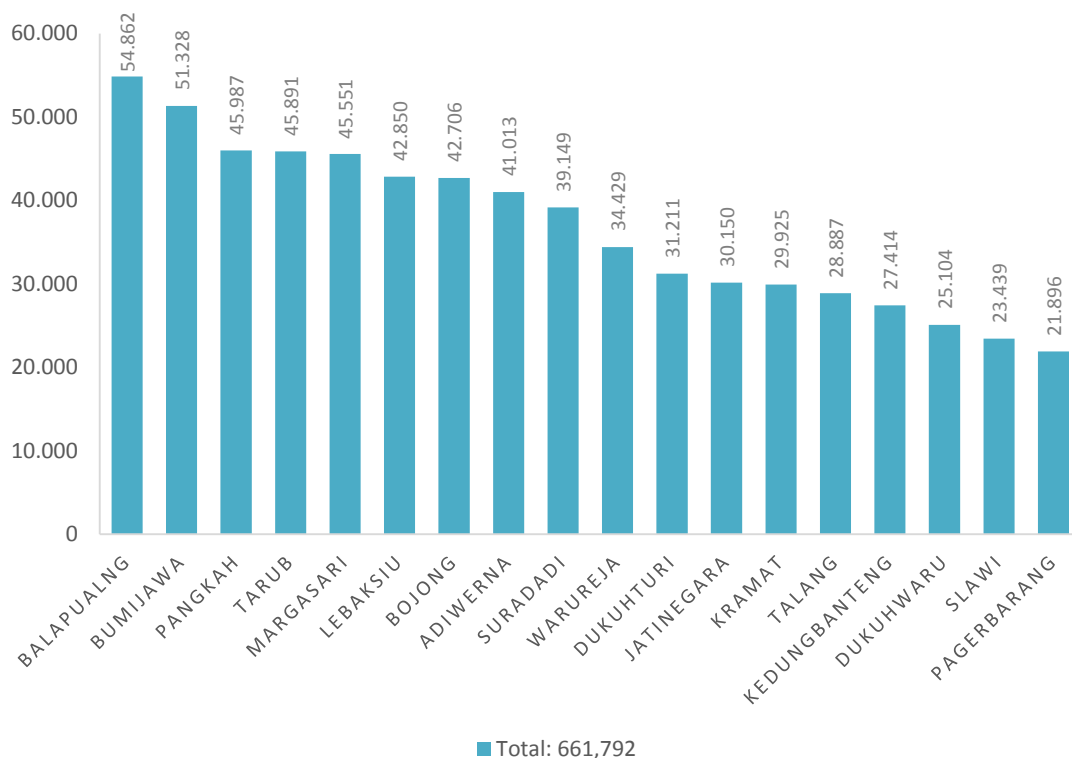
#### 1. Kemiskinan

Pada tahun 2008 dan 2011 dilakukan sensus Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). PPLS merupakan sensus untuk mengetahui data by name by address 40% penduduk kesejahteraan terendah di satu wilayah kab/kota. Pada tahun 2015 dilakukan pemutakhiran data PPLS dengan melakukan sensus ulang disertai instrumen pertanyaan tambahan. Pemutakhiran data PPLS 2011 pada tahun 2015 tidak disebut PPLS 2015 tetapi disebut PBDT 2015. PBDT mendata 40% penduduk dengan kesejahteraan terendah di setiap kab/kota. (Kab. Tegal jumlahnya 661.792 jiwa).

Dari hasil Basis Data Terpadu Tahun 2015 dapat di ketahui jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Tegal sejumlah 167.101 Rumah tangga, untuk jumlah rumah tangga miskin Kecamatan yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebanyak 14.258 Rumah tangga, sedangkan terkecil adalah Kecamatan Slawi dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 5.830 Rumah Tangga. Gambaran lebih terperinci dapat dicermati gambar berikut ini.



Gambar 2.9. Jumlah Rumah Tangga Miskin Kecamatan Kabupaten Tegal Hasil Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015  
Sumber: PBDT, 2015.



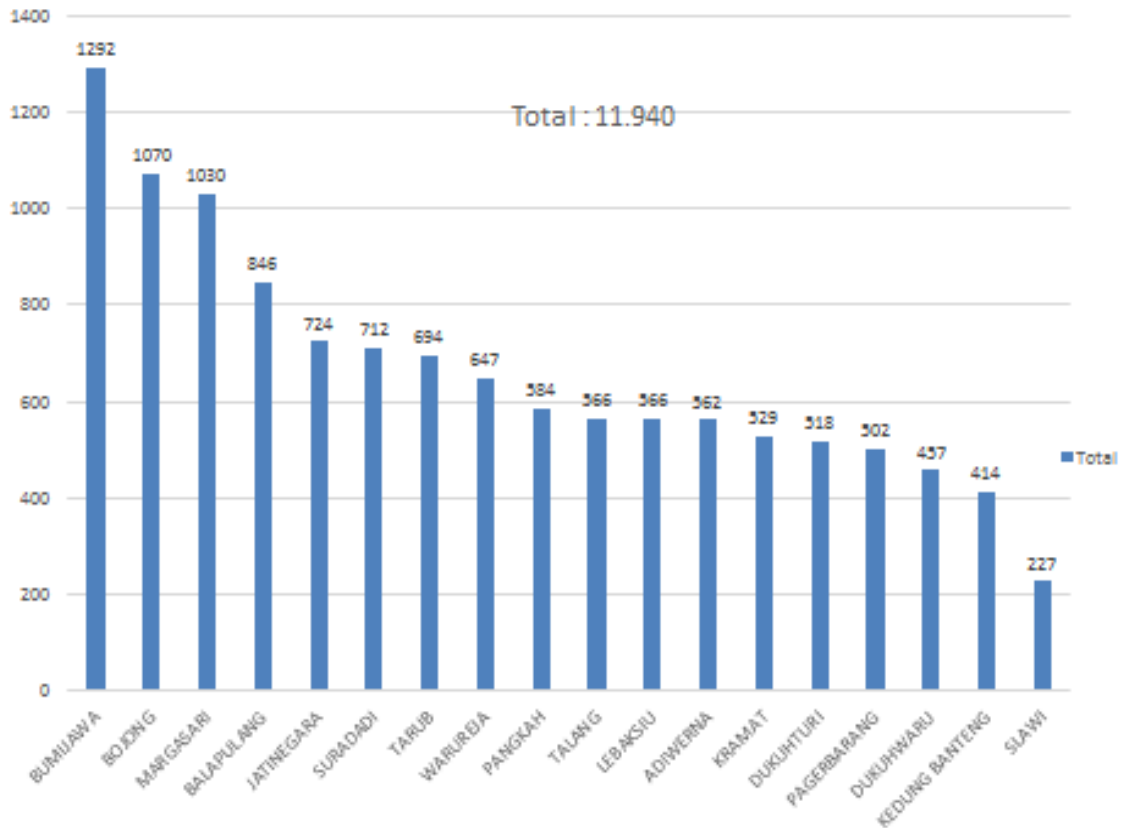
Gambar 2.10. Jumlah individu Miskin Kecamatan Kabupaten Tegal Hasil Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015  
Sumber: PBDT, 2015.

Untuk jumlah individu miskin Kabupaten Tegal hasil BDT tahun 2015 adalah sejumlah 661.792 individu untuk jumlah yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebesar 54.862 individu yang kedua yaitu kecamatan Bumijawa sebanyak 51.328 individu dan urutan yang ke tiga adalah kecamatan Pangkah sebanyak 45.987 individu sedangkan jumlah individu miskin yang paling sedikit adalah kecamatan Slawi yaitu sejumlah 21.896 individu.

Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

## 2. Anak Putus Sekolah

Anak usia sekolah tidak sekolah atau oleh publik sering disebut anak putus sekolah adalah keadaan di mana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan salah satu hak anak, sebagaimana diatur dalam Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak. Sementara anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, dihitung sejak dari kehidupan dalam kandungan.

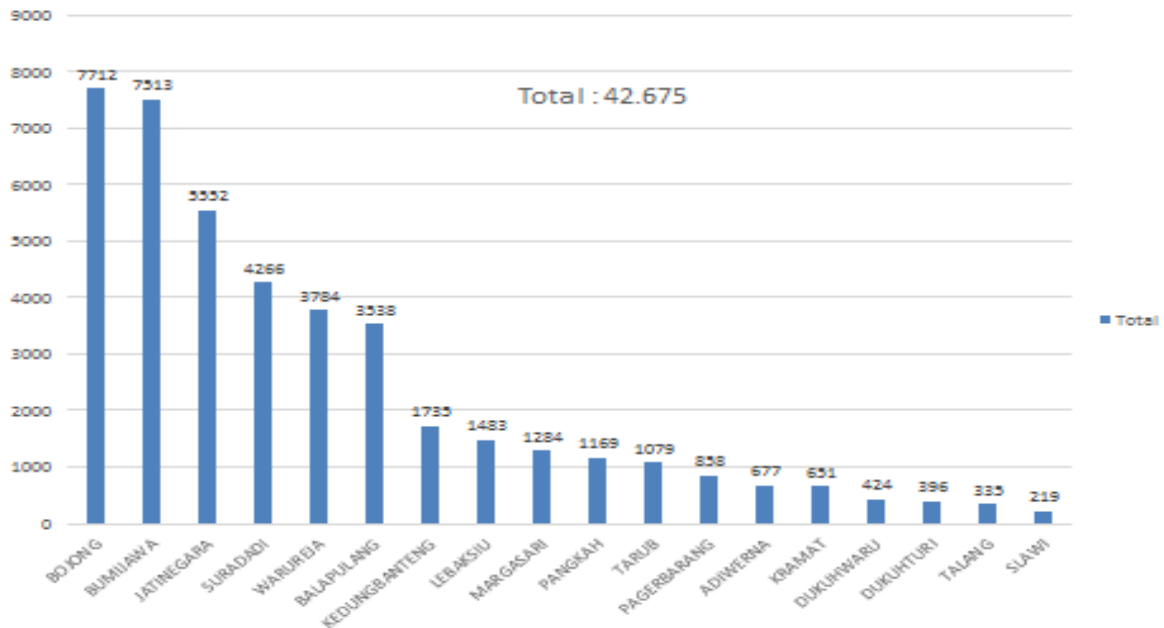


Gambar.2.11. Anak Putus Sekolah Usia 7-15 tahun  
Sumber: PBDT, 2015

Kondisi di banyak kecamatan menggambarkan bahwa penyebab anak usia sekolah tidak sekolah tidak hanya faktor pendidikan. Faktor-faktor non pendidikan yang mempengaruhi kondisi anak usia sekolah tidak sekolah diantaranya budaya belajar, status kesehatan, kondisi mental psikologis, tuntutan ekonomi untuk bekerja hingga kebutuhan khusus seperti disabilitas. Mempertimbangkan banyak dimensi ini diperlukan strategi dan kebijakan penuntasan anak putus sekolah yang bersifat holistik dan multistakeholders sehingga kebijakan yang dilaksanakan dapat memiliki daya ungkit optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

### 3. Rumah Tidak Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Tegal terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman dan rumah tidak layak huni. Jumlah RTLH di Kabupaten Tegal sebanyak 42.675 unit. Terbanyak di Kecamatan Bojong sebanyak 7712 unit dan paling sedikit di Kecamatan Slawi sebanyak 219 unit. Untuk selengkapnya dapat dicermati gambar berikut.

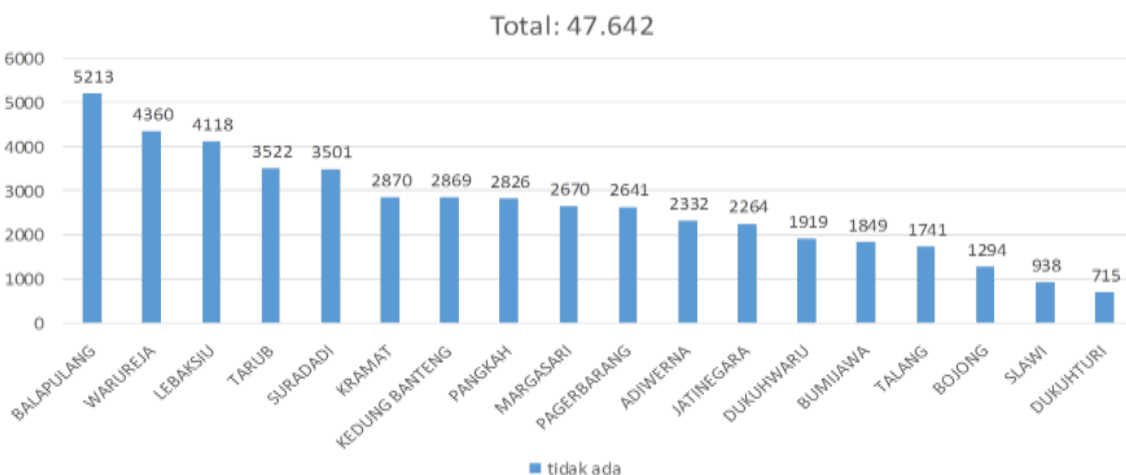


Gambar. 2.12. Rumah Tidak Layak Huni pilah Kecamatan  
 Sumber: PBDT 2015

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan RTLH antara lain karena beban dan kapasitas Pemerintah Desa yang terbatas dalam mengawal pengelolaan anggaran. Pemerintah desa dan masyarakat lebih fokus pada program DD dan ADD akhirnya pencairan dana bantuan oleh masing-masing desa pada akhir tahun dan pelaksanaan fisiknya juga akhir tahun.

#### 4. Fasilitas Buang Air Besar

Jamban merupakan salah satu fasilitas yang menunjang kesehatan masyarakat dalam sistem sanitasi masyarakat. Keberadaan dan penggunaan jamban sehat oleh setiap individu akan mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat karena limbah individu dapat dikelola secara higienis. Dari data yang ada, masih terdapat 47.642 rumah tangga yang belum memiliki jamban. Dari jumlah tersebut, paling sedikit berada di Kecamatan Dukuhturi. Sementara paling banyak terdapat di Kecamatan Balapulang, satu kecamatan kantong kemiskinan di Kabupaten Tegal. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati gambar berikut.



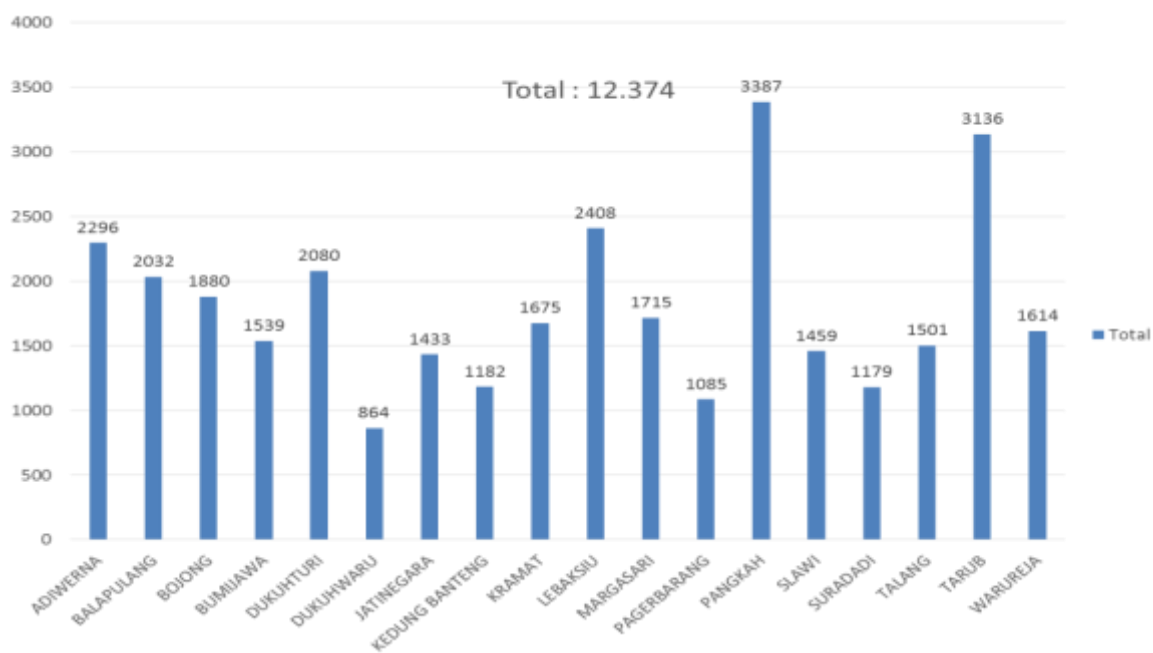
Gambar.2.13. Penduduk Tidak Berjamban Sehat  
 Sumber: PBDT, 2015

Sejumlah program telah diinisiasi untuk menuntaskan kebutuhan jamban masyarakat. diantarProgram Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membangun tangki septik sehat sebesar Rp. 100 juta bagi tiap desa. Selain itu masih ada Program Hibah Air Limbah Setempat APBN yaitu stimulan bagi Pemkab/Pemkot untuk membangun tangki septik.

## 5. Difabel

Difabel (Different Ability) adalah seseorang yang keadaan fisik atau sistem biologisnya berbeda dengan orang lain pada umumnya. Perilaku merupakan manifestasi dari gejala-gejala kejiwaan yang ada. Jadi perilaku difabel merupakan perilaku seseorang, yang mana seseorang tersebut memiliki ketidakmampuan/ kecacatan fisik maupun mental untuk melakukan sesuatu. Ada sebagian orang yang menjadi difabel sejak lahir namun ada juga yang menjadi difabel karena mengalami suatu peristiwa.

Jumlah difabel di Kabupaten Tegal tercatat sebanyak 12.374 jiwa. Difabel terbanyak berada di Kecamatan Pangkah sebanyak 3.387 jiwa. Sementara paling sedikit difabel tercatat di Kecamatan Dukuhwaru sebanyak 864 jiwa. Jenis-jenis difabel yang ada antara lain tuna daksa, psikososial, mental retradiasi, tuna netra, low vision, hingga down syndrome. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada gambar berikut.



Gambar.2.14. Jumlah Difabel per kecamatan

Sumber: PBDT 2015

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkiprah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Penyandang difabilitas potensial yang ditangani dalam panti suatu saat akan dilepas agar bisa mandiri dan ada bimbingan lanjut bagi penyandang cacat, sehingga tidak menjadi beban bagi keluarga. Dinas Sosial tidak hanya menangani kemiskinan dan bencana saja, tetapi juga memunculkan penanganan terhadap penyandang cacat. LBK dan KUBE diberikan untuk penyandang difabel ringan yang masih bisa mengatasi masalahnya sendiri, sedangkan penyandang cacat berat 100% tergantung pada orang lain, sehingga dengan adanya data by name by address perlu di-cover dengan jaminan sosial.



## **2.4. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **2.4.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal ditelaah merujuk pada Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2017 dan diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Tegal, adalah sebagai berikut :

#### **1. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan batas psikologis seseorang disebut hidup layak. Apabila seseorang berada dalam kategori berada di bawah garis kemiskinan, dimungkinkan kondisi kehidupannya masih belum layak. Di Kabupaten Tegal tren angka kemiskinan selalu menurun setiap tahun. Meskipun demikian tantangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin masih menjadi salah satu prioritas kebijakan pembangunan di Kabupaten Tegal. Prioritas itu Kemiskinan di Kabupaten Tegal disebabkan kurangnya pendapatan untuk menutup kebutuhan hidup sesuai garis kemiskinan. Untuk itu diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin atau mengganti pendapatan penduduk miskin dengan bantuan sosial. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan publik di Kabupaten Tegal. Capaian kinerja penanggulangan kemiskinan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, angkanya berada pada kisaran 10,58 dan menurun pada tahun 2014 menjadi 9,87. Pada tahun 2015 dan 2016 naik masing-masing menjadi 10,09 dan 10,10. Pada tahun 2017 angkanya kembali turun menjadi 9,9%. Angka ini masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,01% dan rata-rata nasional sebesar 10,64%.

#### **2. Pelayanan Dasar Pendidikan**

Sederet permasalahan pelayanan pendidikan dasar disebabkan beberapa hal, antara lain: belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar, terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga kependidikan, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan, utamanya dari keluarga kurang mampu, serta kondisi sekolah yang kurang representatif sehingga menjadi permasalahan prioritas pembangunan Kabupaten Tegal. Untuk meningkatkan kinerja pembangunan di sektor pendidikan perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan keberpihakan pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan program pendidikan nonformal dan informal. Program-program ini didesain untuk menjamin setiap anak usia sekolah dan penduduk Kabupaten Tegal memperoleh layanan pendidikan di sekolah baik formal dan nonformal. Dengan demikian diharapkan Angka Partisipasi Kasar dan Murni pendidikan akan meningkat. Kondisi eksisting pembangunan pendidikan secara agregat di Kabupaten Tegal masih menggambarkan persoalan akses pendidikan yang belum didapat dinikmati oleh sebagian masyarakat. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) misalnya, di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Data tahun 2012 menunjukkan angka 5,78 tahun, meningkat menjadi 5,85 tahun pada tahun 2013. Pada tahun 2016 angkanya menjadi 6,54 tahun. Sedangkan Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan seseorang berusia di atas 7 tahun dimungkinkan akan mengenyam pendidikan sepanjang hidupnya. Dari data yang ada, HLS Kabupaten Tegal menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap tahun. Bila tahun 2012 angkanya 11,16 tahun, tahun 2015 telah menjadi 12 tahun dan tahun 2016 sebesar 12,01 tahun.

### **3. Derajat kesehatan masyarakat**

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui dukungan dana dan fasilitas/sarana dan prasarana kesehatan serta dukungan sumberdaya manusia bidang kesehatan yang belum memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Salah satu permasalahan kesehatan yang menonjol adalah permasalahan yang dihadapi untuk menurunkan Angka Kematian bayi dan Balita adalah tatalaksana neonatus di puskesmas belum dilaksanakan sebagaimana mestinya; RS rujukan masih belum memiliki alkes pelayanan neonatus yang memadai; masih ada nakes belum mengetahui kegawatdarutan neonatus (kualitas SDM berdampak pada kualitas pelayanan); penyebab kematian bayi masih dominan karena BBLR (berat bayi lahir rendah) berhubungan dengan asupan gizi ibu hamil; penyebab tidak langsung adalah pendidikan ibu yang masih rendah. Permasalahan kesehatan yang perlu mendapat penanganan serius dan akseleratif adalah isu bayi, balita dan ibu. Angka Kematian Bayi diukur per 1.000 kelahiran. Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Tegal dari tahun 2013 sampai dengan 2016 cenderung meningkat setiap tahunnya, sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan.

### **4. Pengangguran**

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tegal meningkat antara tahun 2012-2015, tetapi menurun di tahun 2017 (data tahun 2016 tidak tersedia dari BPS). Secara umum, gap antara TPT Kabupaten Tegal dengan TPT Provinsi Jawa Tengah menjadi menurun di tahun 2017. Meskipun demikian, tingkat TPT yang mencapai 7,33% masih relatif tinggi; bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2012. Angka ini jauh menurun dibanding angka TPT tahun sebelumnya yang sebesar 9,52%. Meskipun berada pada posisi cukup rendah, perlu diperhatikan bahwa tahun-tahun sebelumnya sejak tahun 2012 angka TPT cenderung meningkat, yaitu 6,05%, 6,93% pada tahun 2013, 8,47% pada tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati gambar 4.11. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemkab Tegal agar APBD dan kebijakan yang ditetapkan dapat memberikan daya ungkit yang besar untuk mengurangi tingkat pengangguran. Perhatian terhadap pengangguran perlu diberi porsi yang lebih. Dari total penduduk miskin di Kabupaten Tegal, 49,26% diantaranya adalah pengangguran, sementara 50,74% diantara bekerja namun berpenghasilan rendah di bawah garis kemiskinan.

### **5. Rendahnya Daya Saing Ekonomi Lokal**

Berdasar data PDRB pengeluaran, daya saing Kabupaten Tegal masih relatif rendah. Sekitar 85% perekonomian Kabupaten Tegal ditunjang dari konsumsi masyarakat, sekitar 24% ditunjang dari investasi, dan mengimpor sekitar 19% total perekonomian. Hal ini mengindikasikan bahwa daya saing Kabupaten Tegal masih relatif belum kuat dan investasi masih relatif kecil. Perekonomian Kabupaten Tegal secara umum ditopang oleh tiga sektor besar yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Sektor perdagangan, khususnya perdagangan retail didominasi oleh pelaku UMKM dalam skala kecil dan menengah dan juga industri rumah tangga yang menghasilkan produk-produk lokal seperti kerajinan dan kuliner. Keberadaan para pelaku UMKM tersebut tersebar pada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Tegal dan diantaranya terpusat pada sentra-sentra kerajinan, seperti kerajinan batik, kerajinan kulit dan produk kuliner seperti tahu atau makan ringan berbahan baku lokal. Kondisi saat ini muncul perspektif dari masyarakat mengenai lemahnya akses permodalan bagi UMKM, terbatasnya kesempatan untuk promosi dan akses pemasaran bagi produk-produk UMKM lokal dan juga kurangnya pelatihan atau pembinaan terhadap para pelaku UMKM. Terkait dengan hal tersebut di sisi lain banyak tenaga kerja usia produktif yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan bekerja di sektor-sektor informal. Kondisi tersebut memunculkan isu perlunya pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja bagi para pekerja usia produktif. Beberapa masalah lain yang terjadi adalah belum adanya database yang baik, serta manajemen produksi dan pemasaran produk Kabupaten Tegal yang belum baik. Hal ini tentu akan mengurangi daya saing Kabupaten Tegal.

## 6. Belum Optimalnya Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal masih menjadi fokus perhatian utama, diantaranya yang terkait secara langsung dengan kepentingan publik adalah:

- a. **Infrastruktur Jalan dan Jembatan**

Pada sektor infrastruktur Jalan dan Jembatan, berdasarkan data Kabupaten Tegal mempunyai 3 ruas Jalan Nasional (Arteri Primer) dengan panjang 68 Km, 2 Jalan Provinsi (Jalan Kolektor Primer) dengan panjang 55,21 km, dan 516 ruas Jalan Kabupaten (Kolektor dan lokal) dengan panjang 847,27 Km. Dari data kondisi jalan 5 tahun terakhir belum ada peningkatan yang signifikan terkait dengan jumlah jalan yang kondisinya baik, bahkan jumlah jalan yang rusak makin bertambah.
- b. **Sarana Transportasi**

Secara letak Kabupaten berada di wilayah yang sangat strategis dimana secara transportasi dilintasi 3 Jalan Arteri yaitu Jalur Pantura, Ruas Jalan Tegal – Cilacap, dan Ruas Ketanggungan – Prupuk. Hal ini menyebabkan Kabupaten Tegal menjadi Jalur padat baik untuk transportasi penumpang maupun barang. Terdapat 5 Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi dan 11 trayek angkutan kota dan perdesaan. Disamping itu terdapat titik /simpul pemberangkatan bus penumpang jurusan Kabupaten Tegal – Jakarta.
- c. **Infrastruktur Persampahan**

Kabupaten Tegal memiliki tiga macam sarana persampahan, yaitu tempat pembuangan akhir (TPA) berjumlah satu, tempat pembuangan sementara (TPS) berjumlah 105 TPS, dan bank sampah berjumlah 85. Ketiga macam sarana tersebut tersebar di Kabupaten Tegal, TPA berada di Desa Penujah, TPS tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tegal kecuali pada Kecamatan Pagerbarang dan Waruteja, lalu bank sampah tersebar pada setiap kecamatan di Kabupaten Tegal kecuali di Kecamatan Suradadi, Talang, Jatinegara, Lebaksiu, Balapulung, dan Pagerbarang. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2016 sebesar 1.429.386 jiwa, maka keberadaan infrastruktur persampahan masih jauh dari memadai.
- d. **Infrastruktur Sanitasi**

Berdasarkan data profil sanitasi cakupan layanan untuk *on site system* sebesar 65% dari total penduduk Kabupaten Tegal, yaitu terdiri atas sistem *on site individual* (tangki septik) mencakup 63,85% dan sistem *on site komunal* (MCK, MCK++) mencakup 1,15%. Jumlah rumah yang belum mempunyai sarana jamban sebesar 13,12%. Sedangkan untuk drainase belum tersedia dan terdata dengan baik.
- e. **Infrastruktur Jaringan Air Bersih**

Sebagaimana data yang terpaparkan dalam bab 2 di atas cakupan layanan air bersih perpipaan dengan PDAM baru memenuhi 17%, Pamsimas mencapai 8%, sedangkan sisanya non perpipaan mencapai 75%. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan berupa jumlah penduduk yang telah memiliki akses air minum baik dari pelayanan PDAM, PAMSIMAS dan sumur pribadi di Kabupaten Tegal mencapai 78,75%.
- f. **Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan tingkat pelayanan dan pusat kegiatan, Kabupaten Tegal dapat dibagi menjadi 4 wilayah: 1) Kecamatan Slawi, Adiwerna, dan Kramat yang merupakan wilayah yang mempunyai sarana dan prasarana memadai, 2) Pangkah, Talang, Tarub, Margasari, Dukuhturi, Dukuhwaru, dan Balapulung dimana didominasi oleh kegiatan perdagangan dan industri seperti di Kecamatan Pangkah yang terdapat pasar sebanyak 3 dan di Kecamatan Talang dengan sentra industrinya; 3) Kecamatan Lebaksiu, Suradadi, Bumijawa, Warureja, Bojong, Jatinegara dimana memiliki kegiatan perekonomian yang cukup beragam dan potensi pertanian yang cukup bagus. Dan 4) Kecamatan Pagerbarang

dan Kedungbanteng dimana Perkembangan masing-masing kecamatan masih tergolong lamban karena terdapat faktor-faktor yang menghambat perkembangannya. Wilayah 4 ini yang perlu perhatian khusus untuk agar dapat sejajar dengan kecamatan lainnya.

## **6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**

Kinerja sebuah instansi atau unit kerja seringkali berujung pada permasalahan sumber daya manusia. Alasan yang dikemukakan oleh SKPD seringkali akibat permasalahan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada. Pembinaan kepegawaian membutuhkan beberapa instrumen antara lain: pemetaan kompetensi pegawai, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan kompetensi pegawai, seleksi terbuka penempatan jabatan, penataan pegawai sesuai dengan kompetensinya, dan tersusunnya data profil pegawai secara baik serta penerapan sistem *reward and punishment*. Untuk itu penataan sistem manajemen sumberdaya manusia perlu menjadi perhatian dengan baik. Penataan kepegawaian dibutuhkan untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Sumber daya manusia yang kompeten juga merupakan sumber daya utama bagi pewujudan reformasi birokrasi di Kabupaten Tegal.

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi, karena menyangkut hajat hidup seluruh warga negara mulai lahir hingga menemui ajalnya. Mengingat strategisnya urusan administrasi kependudukan, maka Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara berkualitas. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan administrasi kependudukan antara lain akta kelahiran, akta kematian dan Kartu Keluarga sebelum tahun 2012 masih menggunakan sistem manual. Baru pada tahun 2012 menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Meskipun telah menggunakan SIAK, untuk pencatatan akta kematian yang rendah karena minat masyarakat untuk mencatatkan kematian keluarganya juga rendah. Masyarakat mendaftarkan kematian keluarganya hanya ketika akan memproses waris secara resmi di pengadilan. Apabila waris diselesaikan secara kekeluargaan, masyarakat umumnya tidak membuat akta kematian bagi keluarganya yang telah meninggal.

## **7. Peningkatan daya saing pariwisata dan pengembangan destinasi wisata lokal**

Pariwisata adalah salah satu sektor yang mempunyai daya ungkit yang sangat kuat terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah atau bahkan suatu negara. Industri pariwisata yang kuat, maju dan berkembang sangat berdampak signifikan terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah. Banyak daerah yang perekonomiannya berkembang pesat karena didukung oleh perkembangan pariwisata di daerahnya. Saat ini semakin banyak bermunculan destinasi pariwisata baru di daerah-daerah di sekitar Kabupaten Tegal. Semakin mudahnya akses transportasi untuk menjangkau daerah-daerah tersebut, antara lain adanya jalan Tol, semakin meningkatkan persaingan dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata. Di sisi lain kecenderungan wisatawan baik lokal maupun luar daerah ataupun mancanegara untuk berwisata tidak lagi terbatas menikmati obyek wisata yang sudah ada, tetapi juga untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam berwisata. Dengan demikian diversifikasi obyek wisata semakin dibutuhkan dan disisi lain pengembangan fasilitas-fasilitas terhadap obyek wisata yang ada juga diperlukan.

Dengan semakin meningkatnya persaingan di bidang pariwisata tidak hanya dengan daerah-daerah sekitarnya tapi juga di daerah-daerah lain maka daya saing pariwisata di Kabupaten Tegal harus semakin ditingkatkan, tidak hanya dengan pembenahan obyek-obyek wisata yang sudah ada dan populer seperti Guci, Purwahamba atau Cacaban, tetapi juga dengan

mengembangkan potensi destinasi-destinasi pariwisata baru yang ada di beberapa wilayah kecamatan atau desa di Kabupaten Tegal. Saat ini muncul adanya anggapan dari masyarakat bahwa pemerintah Kabupaten Tegal belum serius dalam membenahi obyek wisata yang ada di Kabupaten Tegal dan juga kurang memberi perhatian terhadap pengembangan potensi obyek-obyek wisata yang ada di beberapa wilayah kecamatan atau desa. Kondisi ini memunculkan adanya isu mengenai peningkatan daya saing pariwisata di Kabupaten Tegal dan pengembangan destinasi wisata lokal sebagai alternative tujuan wisata baru di Kabupaten Tegal.

#### **2.4.2. Isu Strategis Daerah**

Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Tegal, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019 dapat dirumuskan sebagai berikut :

##### **1. Kemiskinan**

Kemiskinan masih menjadi isu pembangunan di Kabupaten Tegal Tahun 2019, mengingat sampai dengan bulan Maret 2017 persentase kemiskinan Kabupaten Tegal masih cukup tinggi sebesar 9,9%, walaupun masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,01% dan rata-rata nasional sebesar 10,64%. Jika dibandingkan rata-rata jumlah penduduk miskin se-Jawa Tengah, Kabupaten Tegal berada pada ranking ke 24. Selama 4 (empat) tahun terakhir dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, terdapat fluktuasi terhadap tren jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal, dimana pada Tahun 2014 persentase kemiskinan sebesar 9,83% (Jawa Tengah 13,8%), kemudian meningkat di Tahun 2015 menjadi 10,09% (Jawa Tengah 13,58%) dan di Tahun 2016 sebesar 10,10% (Jawa Tengah 13,27%), selanjutnya mengalami penurunan di Tahun 2017 menjadi sebesar 9,9% (Jawa Tengah 13,01%).

Namun demikian jika melihat dari indeks kedalaman kemiskinan di Tahun 2016 pada angka 1,03 dapat diketahui rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Ada peningkatan kesejahteraan pada masyarakat dengan kategori miskin. Demikian pula jika melihat dari indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Tegal di Tahun 2016 pada angka 0,23 artinya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin rendah. Penduduk miskin semakin homogen kasus, karakter atau keadaannya, sehingga program penanggulangan kemiskinan semestinya relatif mudah untuk menentukan sarannya. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan perlu terus dilaksanakan secara sistematis melalui sinergitas program dan lintas OPD dengan fokus dan lokus sasaran sesuai data base kemiskinan yang disepakati.

##### **2. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu aspek dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur keberhasilan pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Tegal pada Tahun 2013-2016 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tersebut, IPM Kabupaten Tegal meningkat dari 63,50 pada Tahun 2013, menjadi 64,10 pada Tahun 2014, kemudian meningkat menjadi 65,04 pada Tahun 2015, dan kembali meningkat menjadi 65,84 pada Tahun 2016. Rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2016 sebesar 1,24 lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 0,9. Komponen utama yang menjadi tolok ukur pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah dari sektor kesehatan dan sektor pendidikan.

Derajat kesehatan dan status kesehatan masyarakat diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH), dimana pada Tahun 2016 mencapai 71,02 tahun. Sedangkan pembangunan sektor pendidikan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, yang dapat dilihat dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk. Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal cukup besar, dimana terjadi kecenderungan peningkatan HLS dalam kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016, yaitu 11,63 tahun pada Tahun 2013 meningkat menjadi 12,01 tahun pada Tahun 2016. Indikator lain adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS), selama kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 mengalami peningkatan, yaitu pada Tahun 2013 rata-rata lama sekolah 5,85 tahun, maka di Tahun 2016 menjadi 6,54 tahun.

Isu lain terkait dengan adanya bonus demografi, secara kuantitas penduduk usia kerja akan meningkat dalam kurun waktu lima tahun ke depan, tentunya harus ada antisipasi untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka masih menjadi pekerjaan rumah utama Pemerintah Kabupaten Tegal. Meskipun demikian ada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka jika pada Tahun 2014 sebesar 8,47% kemudian meningkat menjadi 9,52% di Tahun 2015, maka pada Tahun 2017 menurun menjadi 7,33%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan, yaitu 5,68% di Tahun 2014, menjadi 4,99% di Tahun 2015, kemudian kembali turun pada angka 4,57% di Tahun 2017. Perlu ada kebijakan dan program yang dapat mengantisipasi tingginya angka pengangguran, karena akan dapat berdampak pada timbulnya masalah-masalah di masyarakat, seperti peningkatan jumlah penduduk miskin, kriminalitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta permasalahan sosial lainnya.

### **3. Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif**

Sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Tegal telah bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke kategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal. Sumbangan terbesar masih dari kategori Industri Pengolahan dimana pada Tahun 2013 sebesar 31,57% meningkat di Tahun 2016 menjadi 33,34%. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang pada Tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 16,70% menurun menjadi 14,84% di Tahun 2016. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor pada Tahun 2016 berada pada posisi kedua penyumbang kontribusi PDRB memberikan kontribusi sebesar yang sebesar 16,49%, sedangkan pada Tahun 2014 masih pada posisi ketiga dengan kontribusi sebesar 14,84%. Adapun subkategori yang memberikan kontribusi terbesar dan sangat dominan dalam kategori Industri Pengolahan pada Tahun 2016 adalah Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 60,21%.

Memperhatikan data struktur perekonomian Kabupaten Tegal, maka perlu ada keberpihakan kebijakan maupun program untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perdagangan dengan terus mengembangkan potensi sektor industri. Pemanfaatan potensi bahan baku yang berlimpah dari sektor pertanian dengan produktifitas industri makanan dan minuman tentu akan memiliki daya ungkit perekonomian lokal yang cukup signifikan. Daya saing ekonomi lokal harus didukung dengan inovasi dan kreativitas daerah sehingga dapat terus menumbuhkan pelaku-pelaku usaha baru terutama pada lapangan usaha industri kreatif. Menumbuhkembangkan industri kreatif harus didukung oleh kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, jejaring informasi dan tata laksana berbasis ilmu pengetahuan dengan mengutamakan penelitian, teknik rekayasa dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual.

#### **4. Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah**

Beberapa masalah dan potensi terkait sarana prasarana dan infrastruktur wilayah antara lain masih kurang memadainya sarana perniagaan; sarana transportasi umum; sarana persampahan; prasarana jalan; prasarana air bersih; prasarana drainase dan prasarana sanitasi. Kondisi sarana perniagaan berupa pasar masih menjadi prioritas untuk dilakukan pembangunan maupun rehabilitasi. Sarana transportasi umum berupa terminal, perlu ada perhatian untuk optimalisasi fungsi Terminal Dukuhsalam dan Terminal Adiwerna. Sarana persampahan dengan jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang hanya satu di Desa Penujah, maka perlu ada penambahan jumlah TPA untuk mengatasi volume sampah yang terangkut.

Selain itu juga kurangnya jumlah sarana pengangkut sampah berupa truk dan gerobak yang belum efektif kinerjanya. Masih ada kesenjangan antara produksi sampah dengan volume sampah yang terangkut, data di Tahun 2016 produksi sampah sebanyak 458 m kubik sedangkan volume sampah yang terangkut hanya 289,89 m kubik. Isu yang lain adalah masih tingginya kerusakan prasarana jalan kabupaten antar wilayah kecamatan. Data Tahun 2016 jalan kewenangan Kabupaten yang dalam kondisi baik hanya ada 44,15%, kondisi sedang 13,85%, kondisi rusak 18,81% dan kondisi rusak berat 24,18%. Prasarana drainase dan sanitasi juga perlu mendapatkan perhatian khusus, karena semakin banyaknya areal pemukiman maka drainase dan sanitasi seringkali menjadi permasalahan. Adanya pembatasan kewenangan dalam pengembangan infrastruktur wilayah antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa, maka perlu ada kesamaan pemahaman dan tanggungjawab dalam perencanaan dan penganggaran program kegiatan pembangunan sarana prasarana infrastruktur di wilayah.

#### **5. Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik**

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tegal. Dengan isu strategis reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Tegal bertekad untuk mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani. Masih banyak permasalahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Tegal, jika dilihat dari delapan aspek yaitu aspek manajemen perubahan; aspek peraturan perundang-undangan; aspek kelembagaan; aspek ketatalaksanaan; aspek sumber daya aparatur; aspek pengawasan; aspek akuntabilitas kinerja dan aspek pelayanan publik. Dalam hal ketatalaksanaan, e-government sebagai sarana untuk mendukung kinerja organisasi belumlah diterapkan secara optimal.

Belum ada sistem informasi yang terintegrasi sehingga sistem dan aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing SKPD belum bisa terbangun dan terkonsolidasi dalam satu jejaring. Optimalisasi sistem informasi dalam wujud e-government yang terintegrasi menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam ketatalaksanaan birokrasi. Pemanfaatan teknologi sistem informasi tentunya akan mendukung kecepatan, ketepatan, kecermatan dan biaya murah dalam memberikan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dasar perlu menjadi perhatian utama, dimana pelayanan pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik akan langsung mendapatkan respon dari masyarakat dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di daerah. Salah satu wujudnya berupa penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik.

#### **6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal**

Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata akan memberikan kontribusi dalam mendorong dan mempercepat

pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Tegal memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keberagaman budaya yang dapat dijadikan sebagai wahana kepariwisataan. Pengembangan “pariwisata yang kekinian” tidak lagi hanya mengandalkan indahnya bentang alam, tetapi juga dengan memadukan potensi-potensi sektor lainnya, seperti mengembangkan potensi wisata industri, wisata pendidikan, wisata kesehatan, dan wisata kebudayaan serta dikaitkan dengan potensi-potensi lain yang dapat dinilai sebagai sebuah keunikan untuk menjadi daya tarik wisata, baik wisatawan lokal maupun manca negara.

Kabupaten Tegal yang berlokasi pada simpul persinggahan mobilitas antar daerah khususnya di lingkup pantai utara Jawa ditunjang akses jalan tol trans Jawa yang sudah terbangun, dan dengan kondisi topografi yang heterogen, serta memiliki karakteristik budaya lokal yang unik, tentunya memiliki banyak potensi wisata yang layak dikembangkan. Dampak positif bagi pariwisata Kabupaten Tegal dengan terbukanya akses jalan tol ruas pantai utara Jawa, perlu diantisipasi dengan perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata. Isu terkait dengan budaya dan kearifan lokal adalah perlunya upaya menggali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat yang mengedepankan pengetahuan, seni, budaya, bahasa Tegal dan industri kreatif melalui pengembangan strategi kebudayaan sebagai sarana pembinaan mental yang berbudi luhur yang dibarengi dengan pengembangan nilai-nilai tradisi, sejarah dan kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, yang didukung dengan pengembangan sistem informasi budaya, tanpa mengesampingkan upaya pelestarian dan pengembangan potensi budaya lokal.

### **2.4.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

#### **2.4.3.1. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar**

##### **1. Urusan Pendidikan**

- a. Belum meratanya akses pendidikan di setiap kecamatan dan perbandingan jumlah siswa yang belum berimbang.
- b. Belum seluruhnya pendidikan terakreditasi dan belum adanya kode etik profesional kinerja yang mendukung pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal
- c. Belum meratanya tenaga pendidik dan kependidikan
- d. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana dan alat praktek masih belum memenuhi standar minimal pendidikan menengah pertama
- e. Belum optimalnya akses teknologi informasi dan penerapan TIK untuk pengelolaan pendidikan dan mendukung realisasi manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel

##### **2. Urusan Kesehatan**

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana kesehatan
- b. Belum seluruhnya pelayanan kesehatan terakreditasi
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk pelayanan e-logistic
- d. Belum siapnya SDM kesehatan dalam melakukan proses pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
- e. Terus meningkatnya jumlah kasus penyakit tidak menular
- f. Masih rendahnya budaya sehat masyarakat
- g. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ODHA
- h. Belum optimalnya fasilitas kesehatan bagi tenaga kerja

##### **3. Urusan Pekerjaan Umum**

- a. Belum optimalnya tingkat pelayanan jaringan jalan dan jembatan yang disebabkan antara lain masih terdapat jalan yang rusak, masih banyak jembatan yang kondisinya kurang baik.
- b. Belum tersedianya database jalan dan jembatan yang baik yang mudah di update dan berbasis spasial IRMS, sehingga perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan masih berbasis anggaran dimana belum berbasis database dan kebutuhan.



- c. Belum terintegrasinya jalan dan jembatan dengan kelengkapan pendukungnya, sebagian besar jalan kabupaten belum dilengkapi dengan fasilitas pendukung (kelengkapan) jalan seperti rambu-rambu, penerangan dan marka jalan, selain itu fasilitas drainase, trotoar, dan bahu jalan juga masih belum optimal.

#### **4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

- a. Belum adanya database perumahan dan pemukiman yang valid dan update yang mencakup berapa jumlah bangunan rumah, jenis, ijin bangunan, status kepemilikannya, dan kelayakan.
- b. Belum komprehensifnya penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Tegal. Dokumen rencana penanganan lingkungan permukiman (RPLP) belum diacu sepenuhnya oleh Desa dalam pembangunan infrastruktur di permukiman terkait dengan penanganan kawasan kumuh.
- c. Belum adanya regulasi terkait dengan perijinan perumahan dalam bentuk perumahan pengembang maupun kavling rumah. Hal ini berakibat pada kurangnya fasilitas perumahan (drainase, sampah, jalan) khususnya pada kavling yang dikembangkan secara individu.

#### **5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

- a. Masih adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain disebabkan oleh radikalisme, terorisme, kriminalitas dan intoleransi umat beragama.
- b. Belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum
- c. Belum tercukupinya jumlah dan kapasitas linmas di Kabupaten Tegal

#### **6. Urusan Sosial**

- a. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan sosial baik formal maupun non formal
- b. Belum optimalnya penanganan PMKS dan rehabilitasi

### **2.4.3.2. Urusan Pemerintah Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

#### **1. Urusan Tenaga Kerja**

- a. Terbatasnya Lapangan kerja/kesempatan kerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang meningkat setiap tahunnya.
- b. Masih rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
- c. Kurang optimalnya fasilitas dan safety bagi tenaga kerja

#### **2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Rendahnya pemenuhan hak anak
- b. Belum terhimpunnya Data pilah serta informasi gender dan anak secara optimal
- c. Belum efektifnya kelembagaan, pelayanan, jaringan Pengurusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUHA)
- d. Masih tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

#### **3. Urusan Pangan**

- a. Masih rendahnya pola konsumsi yang melakukan diversifikasi pangan, dengan mengonsumsi makanan nonberas dan nonterigu.
- b. Masih perlunya dorongan untuk peningkatan produksi pangan

#### **4. Urusan Pertanahan**

- a. Belum optimalnya pengelolaan aset milik pemda dimana banyak aset yang belum tersertifikasi.
- b. Belum optimalnya penggunaan TI dalam pertanahan

## **5. Urusan Lingkungan Hidup**

- a. Belum adanya konsep (masterplan/roadmap) pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pencemaran udara dan air, karena pencemaran ini mayoritas akibat aktivitas usaha kecil yang telah digeluti masyarakat

## **6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terutama terkait pencatatan akta kematian
- b. Penyediaan dan distribusi blangko KTP elektronik yang kurang efektif dan efisien.
- c. Kurang optimalnya akses pelayanan administrasi kependudukan.
- d. Belum optimalnya Kartu Identitas Anak (KIA)

## **7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

- a. Masih rendahnya kualitas SDM aparatur Desa.
- b. Kurang optimalnya peran pendamping Desa.
- c. Masih kurangnya sarpras terkait teknologi informasi.
- d. Masih rendahnya akses permodalan bagi masyarakat desa.

## **8. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

- a. Terbatasnya ketersediaan Penyuluh KB (PKB)
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait KB mandiri

## **9. Urusan Perhubungan**

- a. Masih belum optimalnya kualitas layanan transportasi
- b. Masih kurang memadainya prasarana dan fasilitas perhubungan serta fasilitas dan pengamanan LLAJ
- c. Pelayanan Angkutan yang belum optimal dan belum ditunjang dengan kelengkapan sarana dan prasarana Perhubungan
- d. Masih kurang memadainya sarana pengujian kendaraan bermotor

## **10. Urusan Komunikasi & Informatika**

- a. Belum Meratanya ketersediaan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika
- b. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah atas Penguasaan Teknologi Informasi
- c. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan publik dan penyebaran informasi
- d. Belum terkoordinasi dengan baik pemanfaatan sistem informasi yang dikelola oleh masing-masing OPD

## **11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

- a. Belum Optimalnya Peran Koperasi Dalam Dunia Usaha
- b. Masih rendahnya kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- c. Kurangnya Pembinaan Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- d. Kurang optimalnya penumbuhan wirausaha baru

## **12. Urusan Penanaman Modal**

- a. Belum Terintegrasinya Pelayanan dan Kebijakan Perizinan untuk Meningkatkan Iklim Investasi
- b. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan
- c. Keterbatasan jumlah pegawai yang menangani teknis perijinan
- d. Rendahnya kapasitas pegawai dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi.

### **13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

- a. Masih kurangnya jumlah pemuda pelopor dalam pembangunan di desa.
- b. Masih rendahnya prestasi di bidang pemuda dan olahraga untuk tingkat Provinsi dan Nasional.
- c. Belum optimalnya pengelolaan sarana prasarana olahraga.
- d. Masih kurangnya penumbuhan wirausaha pemuda.

### **14. Urusan Statistik**

- a. Belum optimalnya pengelolaan data sektoral yang terdapat di masing-masing OPD
- b. Belum optimalnya tingkat keterisian dan validasi atas komponen data sektoral.
- c. Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi data sektoral yang sumber datanya tersebar di beberapa OPD.

### **15. Urusan Kebudayaan**

- a. Belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.
- b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melestarikan warisan budaya.
- c. Rendahnya minat masyarakat terutama generasi muda terhadap tradisi dan kesenian tradisional
- d. Belum optimalnya kolaborasi antara kebudayaan dengan pariwisata dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

### **16. Urusan Perpustakaan**

- a. Belum optimalnya digitalisasi perpustakaan (e-library),
- b. Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan perpustakaan.
- c. Belum memadainya SDM bidang perpustakaan baik secara kuantitas dan kualitas.

### **17. Urusan Kearsipan**

- a. Belum optimalnya digitalisasi arsip daerah,
- b. Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan arsip daerah.
- c. Belum memadainya SDM bidang kearsipan baik secara kuantitas dan kualitas.

## **2.4.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

### **1. Urusan Kelautan dan Perikanan**

- a. Belum optimalnya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- b. Kurang optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan.
- c. Masih rendahnya upaya peningkatan keanekaragaman produk olahan yang berbahan baku ikan.
- d. Belum Optimalnya Produksi dan Produktivitas Budidaya Perikanan

### **2. Urusan Pariwisata**

- a. Kurang optimalnya infrastruktur pendukung pariwisata
- b. Kurang optimalnya pemanfaatan jejaring dalam promosi obyek wisata
- c. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan destinasi wisata
- d. Belum baiknya sinkronisasi pengelolaan obyek wisata oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, maupun pihak swasta.

### **3. Urusan Pertanian**

- a. Belum optimalnya infrastruktur pendukung pertanian.
- b. Adanya alih fungsi lahan pertanian.
- c. Belum optimalnya penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian.
- d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas penyuluh pertanian.
- e. Masih terbatasnya akses permodalan dan ketersediaan sarana dan prasarana peternakan.

#### **4. Urusan Perdagangan**

- a. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan serta pengelolaannya
- b. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana serta penataan lahan relokasi PKL
- c. Belum optimalnya pelayanan metrologi
- d. Belum terbangunnya jejaring perdagangan antara suplai bahan baku untuk produksi dan pasar hasil produksi.

#### **5. Urusan Perindustrian**

- a. Belum optimalnya pengembangan Industri Kecil Menengah
- b. Masih rendahnya kualitas produksi
- c. Belum optimalnya penataan struktur industri melalui pengembangan klaster industri

#### **6. Urusan Transmigrasi**

- a. Animo untuk bertransmigrasi cukup banyak, tetapi ada pembatasan kuota pemberangkatan oleh Pemerintah Provinsi setiap tahun hanya 4 Kepala Keluarga
- b. Kurang optimalnya fasilitasi dari Pemerintah Provinsi untuk penyiapan lokasi/daerah tujuan dari Transmigran.

### **2.4.3.4. Urusan Penunjang Pemerintahan**

#### **1. Urusan Pengawasan**

- a. Belum optimalnya implementasi Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
- b. Masih rendahnya capaian persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- c. Masih rendahnya kapasitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- d. Belum optimalnya Pembangunan Zona Integritas, yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### **2. Urusan Perencanaan Pembangunan**

- a. Masih belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data sektoral serta informasi permasalahan aktual dari OPD untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan.
- b. Masih belum optimalnya dukungan hasil kajian penelitian dan pengembangan terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
- c. Masih belum optimalnya sinergitas kebijakan dan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

#### **3. Urusan Keuangan**

- a. Belum optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah.
- b. Belum optimalnya penggalan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari luar APBD.
- c. Berkas kelengkapan pertanggungjawaban keuangan masih belum sederhana.
- d. Tingkat penyerapan anggaran belum sesuai dengan target rencana penyediaan dana setiap bulan/triwulan.

#### **4. Urusan Kepegawaian**

- a. Manajemen sumber daya manusia belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, kinerja pegawai dan organisasi.
- b. Keterbatasan jumlah dan masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur.
- c. Belum optimalnya pemberian reward dan punishment terhadap kinerja aparatur.